

2025



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA



www.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2025–2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja tahun 2025, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Program Sekretariat Utama tahun 2025 dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra 2025-2029.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

Jakarta, 26 Februari 2026

Sekretaris Utama,



Irjen Pol Dr. Jayadi, SIK, MH

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
<i>MILESTONE</i> KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
BAB IV	116
PENUTUP	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Sekretariat Utama	4
Gambar 2 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Status Pegawai	5
Gambar 3 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar 4 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Rentang Usia	6
Gambar 5 Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja	7
Gambar 6 Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama	19
Gambar 7 Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama	19
Gambar 8 NKO Sekretariat Utama Tahun 2025	36
Gambar 9 Tren NKO Sekretariat Utama 2021-2025	37
Gambar 10 Tren Realisasi Indikator Persentase kerja sama yang efektif Sekretariat Utama Tahun 2021-2025	39
Gambar 11 Tren 'Indeks RB BPOM' di Lingkup Sekretariat Utama Tahun 2023-2025	53
Gambar 12 Indikator Pembentuk Indeks RB di Lingkup Settama	54
Gambar 13 Tren Realisasi Indikator Indeks Opini Publik Sekretariat Utama Tahun 2021-2025	64
Gambar 14 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin	66
Gambar 15 Tren Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama Tahun 2021-2025	70
Gambar 16 Perbandingan IPP Sekretariat Utama dengan Unit Pusat di Lingkungan BPOM Tahun 2025	72
Gambar 17 Tren Realisasi Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Sekretariat Utama Tahun 2021-2025	76
Gambar 18 Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama Tahun 2025	78
Gambar 19 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama dan Unit Eselon I di Lingkungan BPOM Tahun 2025	79
Gambar 20 Tren Realisasi Indikator "Nilai AKIP Sekretariat Utama"	85
Gambar 21 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2025 Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM	88
Gambar 22 Tren Realisasi Indikator "Nilai Kienerja Anggran Sekretariat Utama"	92
Gambar 23 Rincian NKA Sekretariat Utama Tahun 2025 per Indikator Pembentuk	94
Gambar 24 Perbandingan NKA Sekretariat Utama dengan Unit Eselon I di Lingkungan BPOM Tahun 2025	94
Gambar 25 Perbandingan Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama dengan unit Eselon I di Lingkungan BPOM Tahun 2025	99
Gambar 26 Range Capaian Indikator Tingkat Efisiensi	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah JFT di Lingkup Sekretariat Utama	6
Tabel 2 Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya	7
Tabel 3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	8
Tabel 4 Perbandingan Sasaran Program, Indikator, dan Target Berdasarkan Rancangan Renstra dan Renstra Final	17
Tabel 5 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program (IKSP) Sekretariat Utama Tahun 2025-2029	20
Tabel 6 RKT Sekretariat Utama Tahun 2025	21
Tabel 7 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2025	23
Tabel 8 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025	26
Tabel 9 Perbandingan Rancangan Renstra, RKT, dan PK Sekretariat Utama Tahun 2025	27
Tabel 10 Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2025	28
Tabel 11 Rincian Anggaran per Sasaran Program Tahun 2025	30
Tabel 12 Rincian Anggaran per Sasaran Program Tahun 2025 pada PK Revisi	30
Tabel 13 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program	31
Tabel 14 Perhitungan NKO Tahunan	32
Tabel 15 Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	32
Tabel 16 Predikat NKO	32
Tabel 17 Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029	33
Tabel 18 Pencapaian IKSP Sekretariat Utama Tahun 2025	35
Tabel 19 Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2025	38
Tabel 20 Perbandingan Kinerja Persentase Kerjasama yang Efektif dengan K/L lainnya	41
Tabel 21 Matriks Kendala, Rekomendasi dan RTL Persentase Kerja sama yang Efektif	42
Tabel 22 Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2025	46
Tabel 23 Kategori Indeks Efektivitas KIE	47
Tabel 24 Perbandingan Indikator "Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan Efektif" dengan K/L Lain	48
Tabel 25 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Persentase UPT yang Melaksanakn KIE secara Efektif	49
Tabel 26 Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2025	51
Tabel 27 Indeks RB BPOM di Lingkup Settama tahun 2023 – 2025	54
Tabel 28 Perbandingan Indikator "Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama" dengan K/L Lain	55
Tabel 29 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	57
Tabel 30 Perbandingan Kinerja Indeks Opini Publik dengan K/L Lainnya	67
Tabel 31 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Indeks Opini Publik	68
Tabel 32 Kategori Nilai IPP	72
Tabel 33 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai IPP	73
Tabel 34 Bobot Komponen Pengungkit Penilaian Satuan kerja/Unit Kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/WBBM	77
Tabel 35 Rincian Bobot Indikator Hasil Satuan Kerja/Unit Kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/WBBM	77

Tabel 36 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai Pembangunan ZI	80
Tabel 37 Perbandingan Nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2022-2025	88
Tabel 38 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai AKIP ZI	89
Tabel 39 Kategori nilai NKA	93
Tabel 40 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai Kinerja Anggaran	95
Tabel 41 Kategori Nilai Maturitas Manajemen Risiko	98
Tabel 42 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai Indeks Manajemen Risiko	100
Tabel 44 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2025	105
Tabel 45 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Sekretariat Utama Tahun 2025	107
Tabel 46 Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2025	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025-2029	119
Lampiran 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025	126
Lampiran 3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025	129
Lampiran 4 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025 PER BULAN	132
Lampiran 5 CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025	133
Lampiran 6 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA PER IKSP S.D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025	141
Lampiran 7 MATRIKS EVALUASI KINERJA BIRO DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025	142
Lampiran 8 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO) SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025	154

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Sekretariat Utama telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yaitu: 1). Meningkatnya efektivitas kerja sama BPOM, 2). Meningkatnya efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan, dan 3). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program (IKSP).

Pada tahun 2025, dari 9 (sembilan) IKSP Sekretariat Utama, terdapat 6 (enam) IKSP dengan **kategori "Sangat Baik"** yaitu: 1). "Persentase kerja sama yang efektif" (100,18%); 2). Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama (101,39%); 3). Indeks Opini Publik (101,21%); 4). Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama (105,53%); 5). Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama (101,09%); 6). Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama (101,03%); 2 (dua) IKSP dengan **kategori "Baik"** yaitu: 1). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (100,00%); 2). Nilai AKIP Sekretariat Utama (97,70%); dan 1 IKSP dengan **kategori "Tidak Dapat Disimpulkan"** yaitu Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif (111,69%). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah 102,01% dengan kategori "Istimewa".

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2025 adalah Rp679.484.097.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, total blokir anggaran Sekretariat Utama sebesar Rp91.403.553.000,00. Pagu Sekretariat Utama dikurangi blokir adalah Rp588.080.544.000,00. Berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-353/AG/AG.4/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang pengesahan Revisi 5 DIPA BPOM: Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja K/L, Surat Dirjen Anggaran Nomor S-397/AG/AG.4/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pengesahan Revisi VI Pergeseran Anggaran Satker Lingkup BPOM TA 2025, dan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-566/AG/AG.4/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang, terdapat penambahan pagu dan pergeseran pagu antar satker di lingkungan

BPOM, sehingga pagu Sekretariat Utama menjadi Rp687.186.997.000,00. Realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN sejumlah Rp681.388.241.329,00 atau 99,16%.

Terdapat beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Kerja sama ditindaklanjuti dan peran aktif BPOM pada forum internasional telah berjalan, namun perlu ditingkatkan
2. Pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri
3. Perubahan kebijakan K/L Meso dalam pengelolaan RB General yang mengubah cara pengukuran capaian
4. Adanya persepsi negatif atau penurunan kepercayaan publik terhadap BPOM dan kebijakannya.
5. Penurunan nilai pada indikator kepuasan pelanggan yang diisikan oleh pengguna layanan yang memengaruhi capaian IPP secara keseluruhan
6. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik belum melibatkan stakeholder
7. Paramater penilaian pelayanan publik tidak sesuai dengan bisnis proses Biro-Biro sehingga banyak komponen penilaian yang tidak dapat dipenuhi
8. Berdasarkan hasil survei Implementasi Core Value BerAKHLAK, dampak program perubahan belum sepenuhnya bisa dirasakan secara nyata
9. Masih terdapat kesenjangan kompetensi pegawai
10. dengan standar kompetensi yang ditetapkan baik kompetensi teknis, kompetensi
11. manajerial maupun kompetensi sosial kultural
12. Terdapat indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang tidak mencapai target
13. Terdapat penurunan nilai kinerja perencanaan anggaran karena terdapat IKSP dan RO yang tidak mencapai target
14. penurunan nilai pada indikator revisi yang disebabkan adanya peningkatan frekuensi revisi DIPA Satker Settama.
15. Belum optimalnya koordinasi Tim SPI di lingkup Sekretariat Utama

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kehadiran/ perawakilan BPOM di forum internasional dan kerja sama bilateral.
3. Melakukan evaluasi target tahun 2026 dengan prinsip SMART-C
4. Monitoring pemberitaan/isu di media.
5. Meningkatkan publikasi informasi BPOM secara masif.
6. Mengoptimalkan hubungan dengan media.
7. Peningkatan pemahaman petugas terhadap penerapan standar pelayanan serta regulasi terbaru obat dan makanan

8. Sosialisasi yang lebih masif terkait Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
9. Melibatkan pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam proses reviu standar pelayanan
10. Melakukan reviu standar pelayanan publik
11. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mengakselerasi peningkatan pemahaman core value BerAKHLAK pada unit kerja
12. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang memadai
13. Melakukan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi
14. Melakukan reviu target dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pada masing-masing indikator yang tidak mencapai target
15. Penjadwalan dan pembatasan revisi DIPA hanya sesuai jadwal
16. Pembentukan dan optimalisasi Tim SPI di lingkup Sekretariat Utama dan pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai Juklak

MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025



BPOM kembali meraih Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025 dengan nilai sempurna 100,00 dan kategori AA (Istimewa). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas bersamaan dengan kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025



BPOM menerima penghargaan sebagai peringkat II atas penyelenggaraan kearsipan dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) pada kegiatan Peringatan Hari Kearsipan ke-54 tanggal 22 Mei 2025,. Selama kurang lebih 5 tahun BPOM selalu menduduki 3 besar dalam penyelenggaraan kearsipan



BPOM memboyong tiga penghargaan dari ajang *The 10th PR INDONESIA Awards* (PRIA) 2025 yang diselenggarakan *Public Relations Indonesia* (PR Indonesia). Ketiga penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh CEO Prominent PR Ika Sastrosuebrotto pada acara Satu Dekade PR Indonesia Awards (PRIA)



Sekretariat Utama menerima penghargaan sebagai Peringkat Kedua Satker dengan IKPA Terbaik Kategori Pagu Besar (>50 Miliar) pada tanggal 23 April 2025



BPOM kembali meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan dan lelang BMN di Jakarta. Kepala KPKNL Jakarta IV Bambang Sulistyono menyerahkan 2 penghargaan. Pertama, Terbaik Pertama kategori Satuan Kerja dengan Tertib Administrasi Berkas Permohonan Lelang Tahun 2025 dari Pelaksanaan Lelang Wajib Barang Milik Negara. Kedua, Terbaik Ketiga kategori Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara Terbaik. Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa BPOM telah melakukan upaya pengelolaan BMN dengan baik, termasuk dalam kualitas pelaporan.

BPOM kembali meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan dan lelang BMN di Jakarta. Kepala KPKNL Jakarta IV Bambang Sulistyono menyerahkan 2 penghargaan. Pertama, Terbaik Pertama kategori Satuan Kerja dengan Tertib Administrasi Berkas Permohonan Lelang Tahun 2025 dari Pelaksanaan Lelang Wajib Barang Milik Negara. Kedua, Terbaik Ketiga kategori Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara Terbaik. Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa BPOM telah melakukan upaya pengelolaan BMN dengan baik, termasuk dalam kualitas pelaporan.



BPOM masuk sebagai 5 besar Instansi “Komitmen, Dedikasi, dan Kontribusi Nyata dalam mendukung Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)” dari Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 10 September 2025



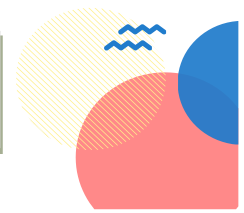
BPOM meraih penghargaan terbaik ke 3 terkait dengan JF Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Selasa, 14 Oktober 2025.



BPOM meraih penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) sebagai Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial



BAB I PENDAHULUAN



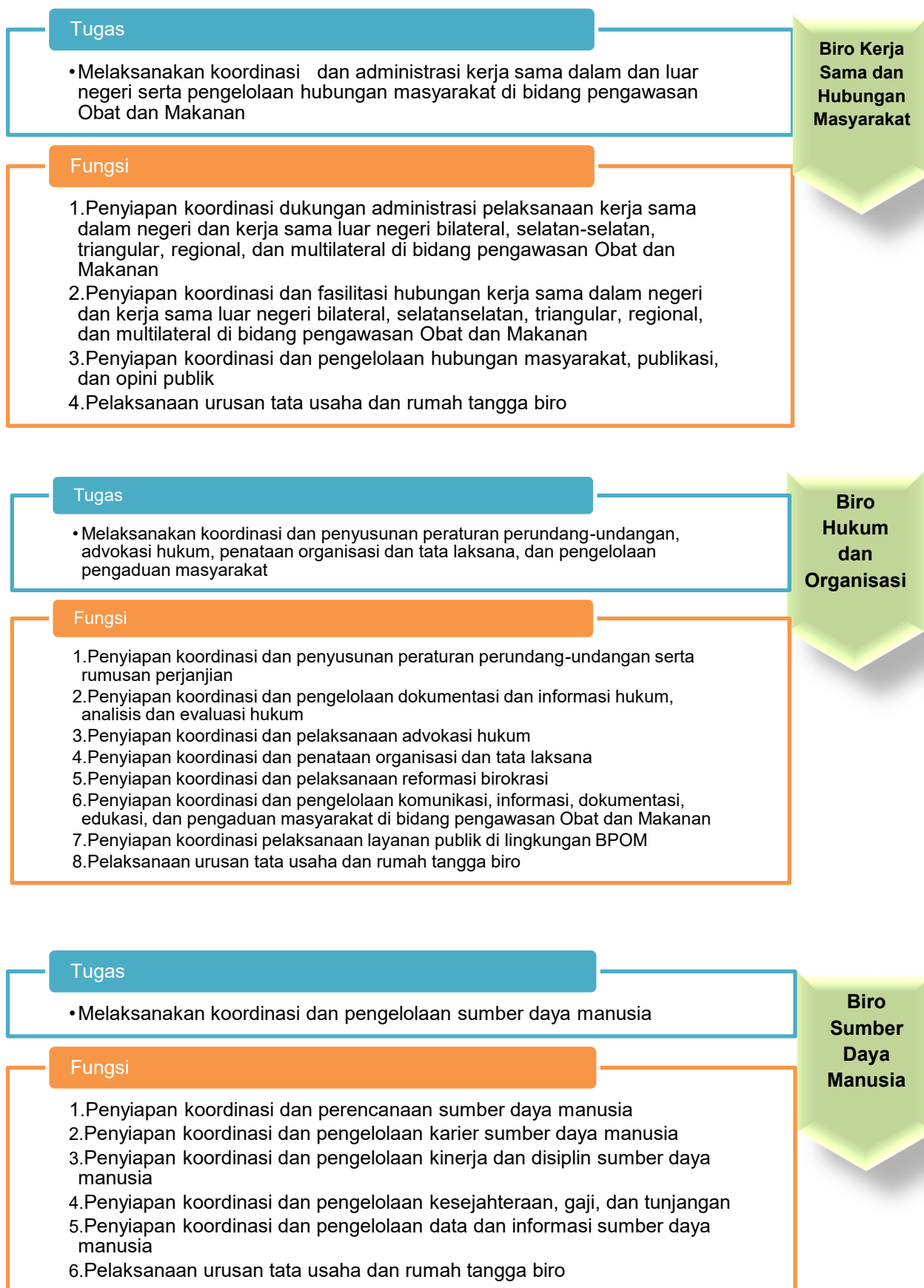
I.1. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

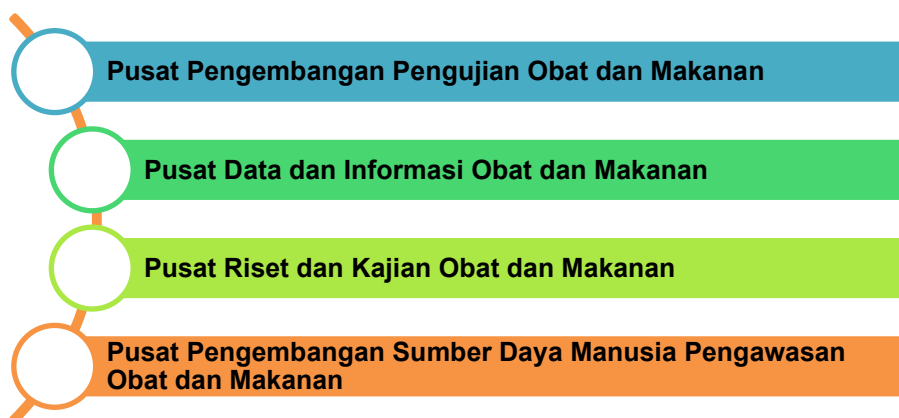
1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

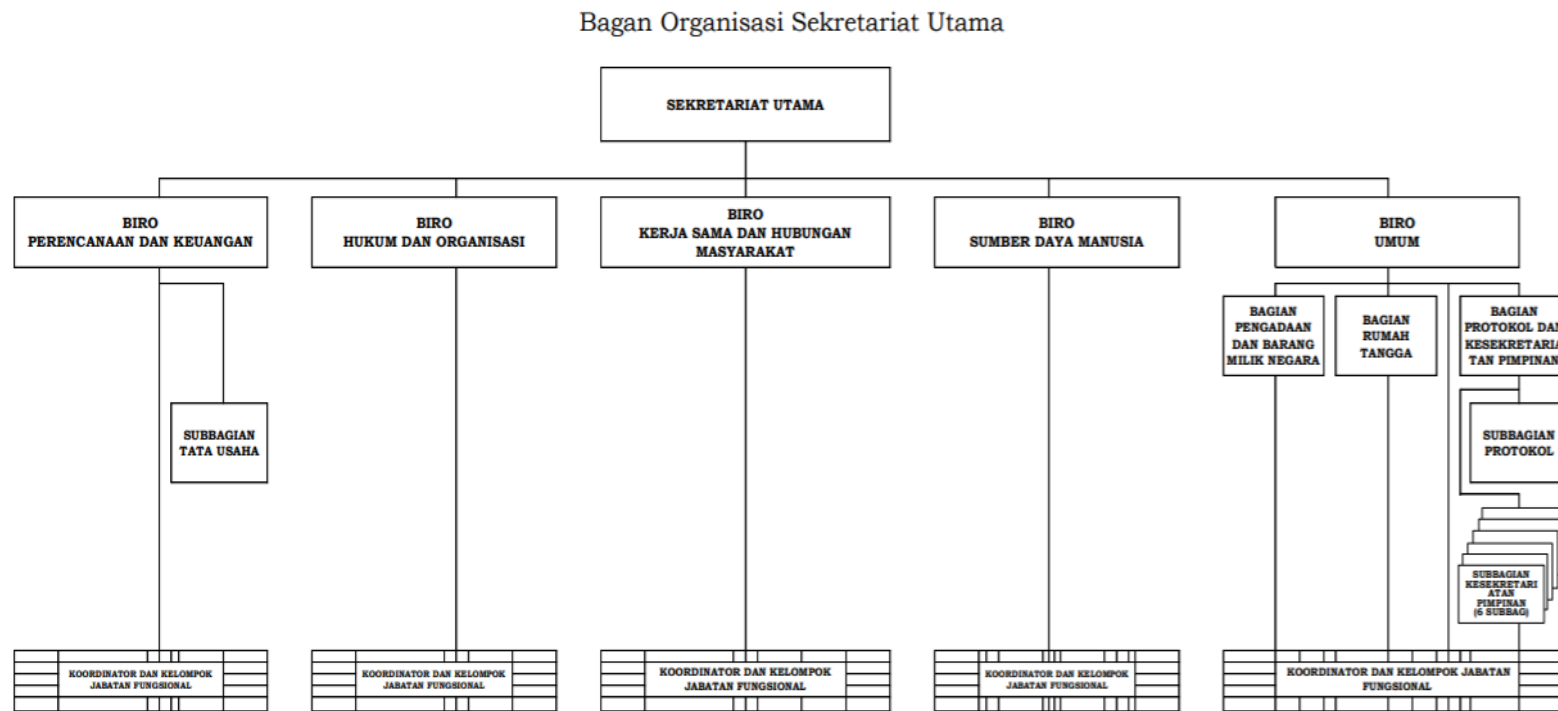
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:





Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:

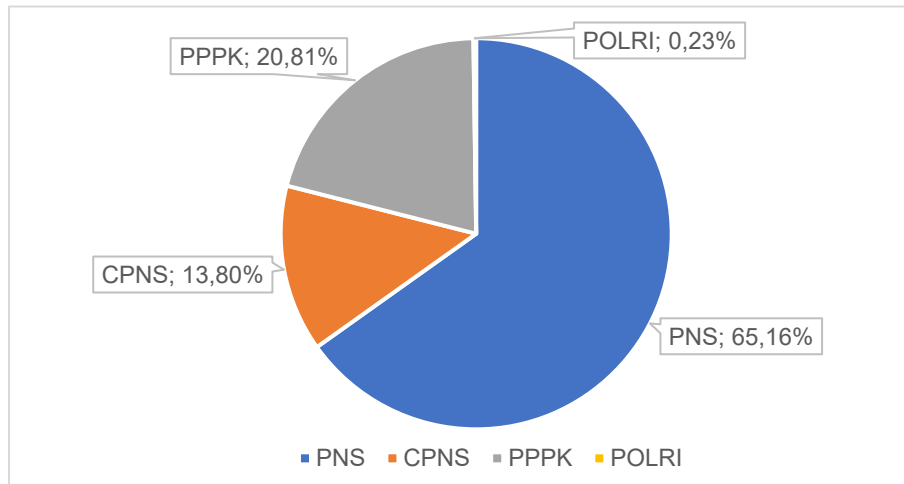




Gambar 1 Bagan Organisasi Sekretariat Utama

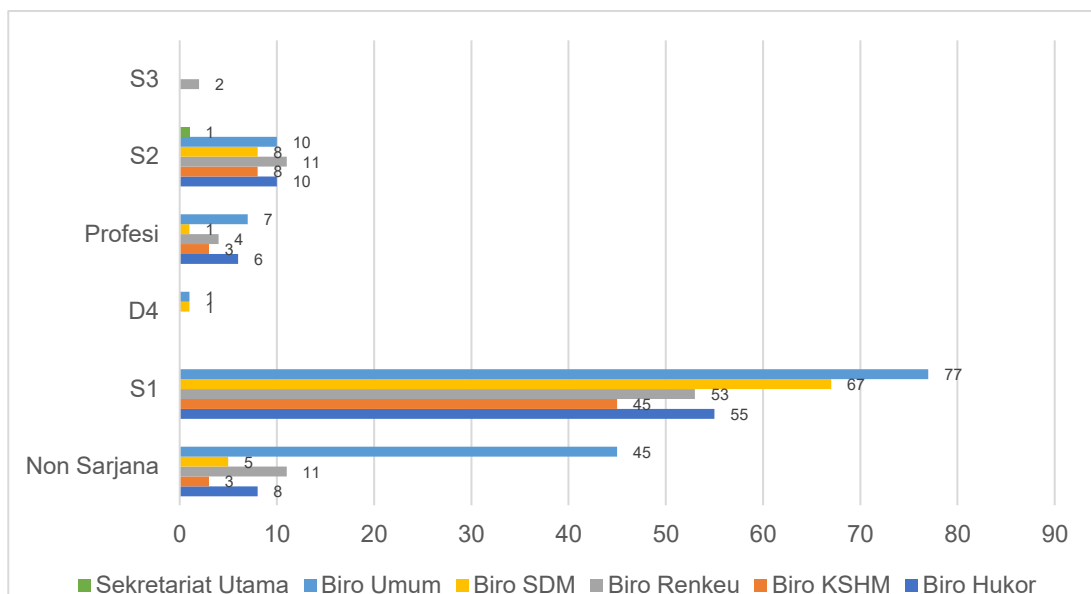
I.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, total pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama per 30 Desember 2025 sebanyak 442 pegawai terdiri dari 288 orang PNS, 61 orang CPNS, 92 PPPK, dan 1 POLRI dari total kebutuhan pegawai sebanyak 635 orang. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:



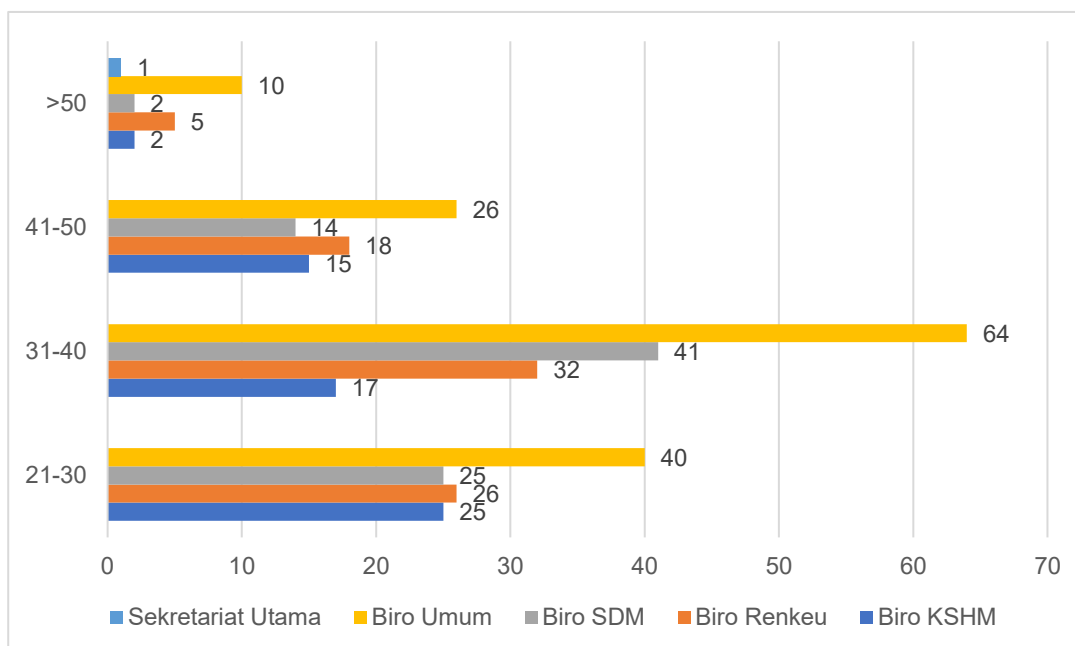
Gambar 2 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Status Pegawai

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 dan D4 sejumlah 299 orang (67,65%), diikuti S2 dan Profesi sejumlah 69 orang (15,61%), Non Sarjana sejumlah 72 orang (16,29%) dan jumlah terendah terdapat di pendidikan S3 yaitu 2 orang pegawai (0,04%).



Gambar 3 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 21-30 sejumlah 149 pegawai (33,71%), usia 31-40 sejumlah 185 pegawai (41,86%), usia 41-50 sejumlah 86 pegawai (19,46%), dan di atas 50 tahun sejumlah 22 pegawai (4,98%).

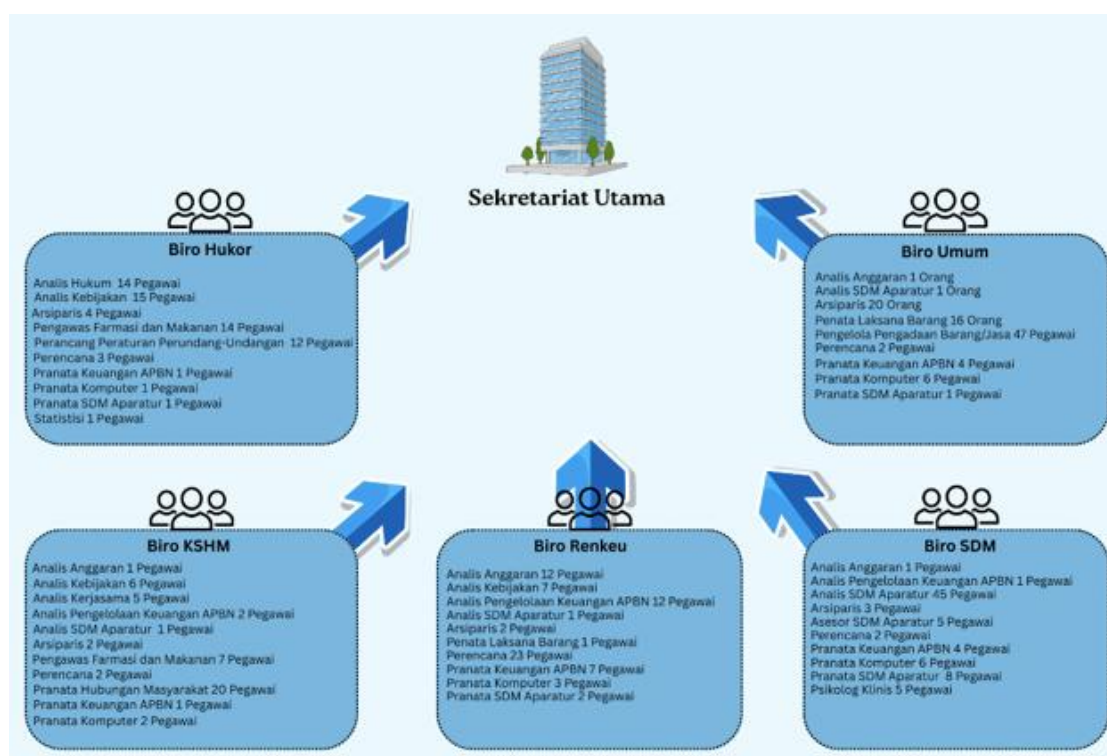


Gambar 4 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Rentang Usia

Sampai dengan Desember 2025 sebaran jabatan di Sekretariat Utama terdiri dari 18 orang pegawai dengan Jabatan Struktural, 364 orang pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan 60 orang pegawai Pelaksana. Jumlah pegawai dengan JFT pada setiap unit kerja di Sekretariat Utama sampai dengan Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah JFT di Lingkup Sekretariat Utama

No	Unit Kerja	Jumlah JFT
1	Sekretariat Utama	0
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	70
3	Biro Hukum dan Organisasi	66
4	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	49
5	Biro Sumber Daya Manusia	80
6	Biro Umum	99
	Total	364



Gambar 5 Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Sedangkan jumlah ASN yang ditingkatkan kariernya di lingkungan BPOM sampai dengan Desember 2025 sejumlah 991 orang pegawai dengan komposisi sebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2 Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Kenaikan Jabatan/Pangkat	751	Kenaikan Pangkat reguler, Kenaikan Pangkat Reguler, penyesuaian Ijazah, Tugas Belajar
Rotasi, mutasi dan promosi jabatan struktural	68	Jabatan yang telah diisi dari mutasi dan promosi jabatan struktural
Perpindahan Jabatan	61	Dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional
Perpindahan Jabatan dari JPT/JA ke JF	9	Dari Jabatan Pratama Tinggi/ Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Pengangkatan Pertama JF	-	-
Pengangkatan Kembali JF (Tubel, Struktural, CLTN)	25	Mekanisme Pengangkatan Kembali JF (Tugas Belajar, Struktural, CLTN, dll)
Pencantuman Gelar	77	Berdasarkan usulan SISFOV2 (baik yang belum/sudah keluar SK + prediksi pegawai tubel yang akan lulus)
Pelantikan PPPK	-	-

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pemberhentian Pejabat Struktural	-	-
Total	991	

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) sampai dengan Desember 2024 dibandingkan dengan eksisting sampai dengan Juni 2025. Data ABK untuk periode 2025-2029 akan disesuaikan setelah Rencana Strategis BPOM ditetapkan.

Tabel 3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretariat Utama	7	1	6	14%
2	Biro Hukum dan Organisasi	106	79	27	74%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	73	59	14	80%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	88	81	7	92%
5	Biro Sumber Daya Manusia	170	82	88	48%
6	Biro Umum	192	140	52	73%
Total		636	442	194	69%

I.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Sekretariat Utama BPOM dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan, dan potensi yang akan dihadapi Sekretariat Utama terkait kelembagaan BPOM yang kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

I.3.1. Isu Internal

1) Sumber Daya Manusia

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Sekretariat Utama harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Sekretariat Utama perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan strategis. Selain itu, Sekretariat Utama juga harus mempunyai strategi dalam mewujudkan profesionalitas SDM di Lingkungan Sekretariat Utama terutama melalui pengembangan pegawai baik dari sisi kemampuan teknis maupun *soft competency*. Selanjutnya, Sistem Manajemen

SDM perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan engagement pegawai terhadap organisasi.

2) Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas pelayanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan. Pada aspek layanan publik, peran pemenuhan sarana dan prasarana dilihat dari dua sisi pelanggan, internal dan eksternal. Dari sisi pelanggan internal, dalam hal ini pegawai BPOM, pemenuhan sarana kerja dan fasilitas umum di lingkungan kantor yang sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana yang berlaku, sangat mendukung optimalisasi kinerja pegawai. Sedangkan dari sisi pelanggan eksternal, ruangan layanan publik dengan fasilitas yang memadai, ketersediaan gedung parkir dan keamanan lingkungan kantor turut mempengaruhi penilaian layanan publik BPOM.

3) Keterbatasan Data Pendukung Perencanaan Pengawasan Obat dan Makanan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam menyusun perencanaan yang ideal perlu didukung dengan berbagai data dan informasi yang valid dan terkini sehingga mampu memberikan gambaran yang sesuai/relevan dengan kondisi saat ini. Dalam implementasinya BPOM telah menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam menyusun perencanaan seringkali masih dijumpai kendala keterbatasan data pendukung yang dapat digunakan sebagai input perencanaan kinerja. Untuk itu, Sekretariat Utama harus berupaya mendorong tersedianya data pendukung perencanaan pengawasan Obat dan Makanan baik melalui koordinasi bersama Unit Kerja yang melaksanakan riset (PRKOM) maupun melibatkan tenaga ahli.

I.3.2. Isu Eksternal

1) Implikasi Dinamika Perkembangan Peraturan Perundangundangan

Beberapa peraturan perundang-undangan pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundangundangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
- b. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
- c. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
- d. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2) Jejaring Kerjasama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM 23 mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, e-commerce, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan Obat dan Makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3) **Perkembangan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara online, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi publik dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi menjadi media BPOM untuk menunjukkan komitmen dalam keterbukaan informasi publik. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Sekretariat Utama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri di bidang Obat dan Makanan untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga pelosok. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan salah satu masalah potensial (*potential problem*), karena bila terdapat produk yang substandar dan produk ilegal termasuk palsu, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, pengawasan Obat dan Makanan harus mengikuti perkembangan teknologi dengan perubahan yang begitu cepat sehingga perlu diantisipasi dengan sistem dan infrastruktur yang memadai. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, serta semakin meningkatnya tren transaksi secara online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan

Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan aplikasi *QR Code* dan melakukan integrasi sistem management data *pre* dan *post market* menuju *one data* pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4) **Dinamika Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Secara Nasional**

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 90/2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah, dan sistem penganggaran terpadu.

Selain itu untuk komposisi anggaran menggunakan pendekatan *money follow program* yang berbasis pada program prioritas nasional dengan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Alokasi anggaran harus jelas digunakan untuk apa, dimana, seberapa besar, dan sebagainya. Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan

penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit.

Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan *Logic Model Theory*. BPOM telah mengenal dan menerapkan *Logic Model Theory*, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan kerangka pikir tidak mengalami kesulitan. Kerangka pikir penyusunan program tersebut akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.

Kapasitas Sekretariat Utama sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi umum masih perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil pembinaan dan pelayanan maupun tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Utama dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan sasaran organisasi BPOM. Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perlu terus ditingkatkan pembinaan terutama di bidang manajemen.
2. Perlu peningkatan *Human Capital Management*.
3. Perlu dilakukan penataan organisasi agar tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.
4. Perlu terus ditingkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan pelayanan publik.
5. Perlu ditingkatkan jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri.
6. Perlu penguatan akuntabilitas kinerja baik pada level organisasi BPOM maupun Unit Kerja.
7. Perlu penguatan pengawalan pembentukan dan implementasi regulasi.
8. Perlu peningkatan pemberian bantuan hukum terhadap kasus-kasus di bidang Obat dan Makanan.

9. Perlu penguatan *e-government*.
10. Perlu ditingkatkan sarana prasarana penunjang kinerja.
11. Perlu ditingkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup Sekretariat Utama sebagai wujud tata kelola pemerintah yang baik.

I.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Renstra Sekretariat Utama disusun berdasarkan Renstra Kepala BPOM tahun 2025-2029. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Sekretariat Utama ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi BPOM. Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2025-2029, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan serta opini publik BPOM.
2. Peningkatan kualitas manajemen ASN BPOM, serta optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan dan layanan publik BPOM yang prima.
3. Peningkatan efektivitas regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.
4. Penguatan dukungan koordinasi dan kerjasama BPOM dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan kepemimpinan BPOM di dunia internasional.
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan dan tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Sekretariat Utama meliputi:

1. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi, edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM dan sumber daya lain termasuk sarana prasarana penunjang kinerja secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam rangka kinerja pengawasan dan pelayanan publik yang prima.
3. Peningkatan kualitas kebijakan/regulasi BPOM yang implementatif sesuai kebutuhan publik serta penguatan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.

4. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan anggaran BPOM, serta organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses.
5. Penguatan efektivitas kerjasama BPOM bersama lintas sektor baik nasional maupun internasional.
6. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkup Sekretariat Utama termasuk peningkatan kualitas SDM serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan bisnis proses.

I.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama 2025-2029.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data pendukung lainnya yang diperlukan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

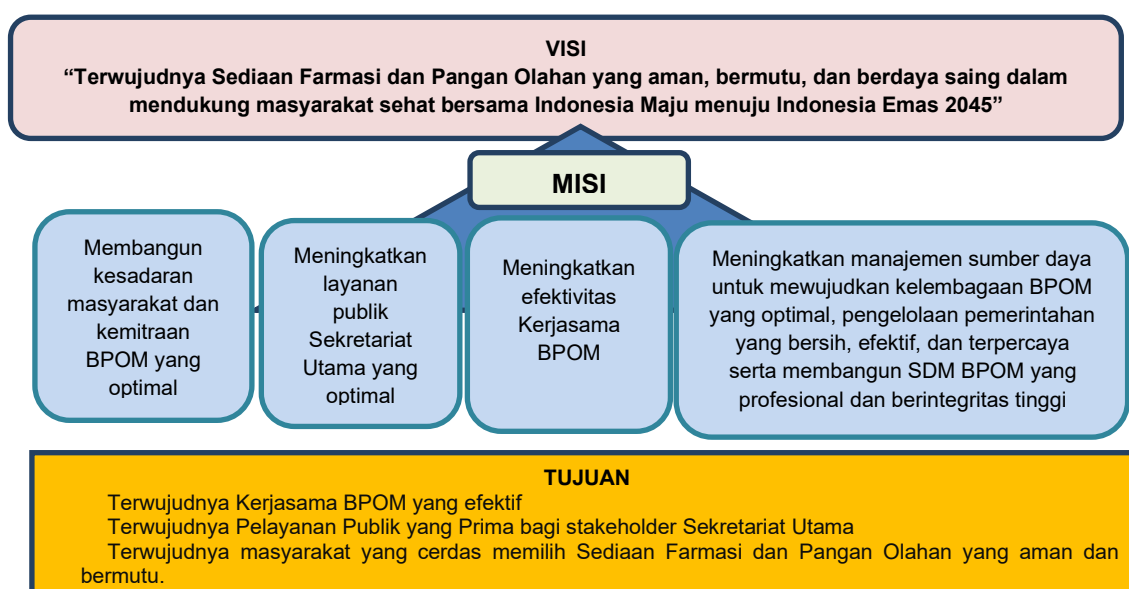
Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025-2029. Tahapan penyusunan Renstra K/L yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L yang telah disusun pada tahun 2024, penyusunan Rancangan Renstra K/L (didahului dengan Rancangan Awal Renstra K/L), dan Penyesuaian Rancangan Renstra K/L. Berdasarkan *timeline* penyusunan Renstra K/L yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, pada bulan Januari – Juni 2025 merupakan waktu untuk penyesuaian rancangan Renstra K/L. Penetapan Renstra K/L dilakukan pada bulan Juni 2025. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L, penetapan Renstra K/L dilakukan pada bulan Oktober. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja di tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen Rancangan Renstra BPOM dan Rancangan Renstra Sekretariat Utama tahun 2025-2029 yang selanjutnya dilakukan revisi dengan diterbitkannya Renstra BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.12.25.131 tanggal 5 Desember 2025. Perbandingan sasaran program, indikator, dan target berdasarkan Rancangan Renstra dan Renstra Final sebagai berikut:

Tabel 4 Perbandingan Sasaran Program, Indikator, dan Target Berdasarkan Rancangan Renstra dan Renstra Final

Semula							Menjadi						
Sasaran Program/Indikator		Target					Sasaran Program/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM						SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM					
1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif (%)	90,5	91	91,5	92	92,5	1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5	91	91,5	92	92,5
SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61	82	87	91	100	2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86	95	96	97	98
SP 3	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima							Dihapus					
3.1	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90		Pindah ke SP 3					
SP 4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama						SP 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama					
4.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34,60	34,70	34,80	34,90	35	3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33,80	33,90	34,00	34,10	34,20
4.2	Indeks Opini Publik	85,2	85,25	85,3	85,35	85,4	3.2	Indeks Opini Publik	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25
							3.3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90

Semula							Menjadi						
Sasaran Program/Indikator		Target					Sasaran Program/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
4.3	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	86,85	87,08	87,31	87,54	3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	86,85	87,08	87,31	87,54
4.4	Nlai AKIP Sekretariat Utama	83,81	84,31	84,94	85,49	85,97	3.5	Nlai AKIP Sekretariat Utama	83,81	84,31	84,94	85,49	85,97
4.5	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	5	5	5	5	3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	5	5	5	5
4.6	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	2,94	2,97	3,20	3,23	3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	2,94	2,97	3,20	3,23

Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama menjelaskan dukungan Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dan menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2025-2029 yaitu:



Gambar 7 Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Sasaran strategis Sekretariat Utama dijabarkan dalam sasaran program dan kegiatan berdasarkan *logic model* perencanaan. Sasaran program disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Sekretariat Utama, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Sekretariat Utama akan dapat mencapai sasaran program sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program (IKSP) Sekretariat Utama Tahun 2025-2029

Sasaran Program		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	IKSP 1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5	91	91,5	92	92,5
SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86	95	96	97	98
SP 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	IKSP 3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33,80	33,90	34,00	34,10	34,20
		IKSP 3.2	Indeks Opini Publik	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25
		IKSP 3.3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
		IKSP 3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	86,85	87,08	87,31	87,54
		IKSP 3.5	Nilai AKIP Sekretariat Utama	83,81	84,31	84,94	85,49	85,97
		IKSP 3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	5	5	5	5
		IKSP 3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	2,94	2,97	3,20	3,23

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKT Sekretariat Utama ditetapkan pada 19 September 2024. Matriks RKT Sekretariat Utama sebagai berikut:

Tabel 6 RKT Sekretariat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1.	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	a. Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5%
2.	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	b. Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61%
3.	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	c. Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,7
4.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	d. Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	31,69
		e. Indeks Opini Publik	85,15
		f. Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	91,09
		g. Nilai AKIP Sekretariat Utama	81,77
		h. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,58
		i. Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	3,4

II.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

II.3.1. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja (PK) ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 ditetapkan pada 11 Februari 2025. Pada tanggal 28 Agustus 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama berdasarkan Rancangan Renstra hasil dari forum penyesuaian Rancangan Renstra bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 15 Agustus 2025. Perubahan pada PK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2025

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program/Indikator		Target	Sasaran Program/Indikator		Target	
SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM		SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM		
1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5%	1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5%	Tetap
SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		
2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61%	2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86%	Perubahan target disebabkan adanya instrumen pengukuran efektivitas KIE yang baru. Target sebelumnya ditetapkan berdasarkan instrumen pengukuran yang lama. Penyesuaian target juga mempertimbangkan realisasi indeks efektivitas KIE TW I-II 2025
SP 3	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima			Dihapus		Dilakukan penggabungan dengan SP 4. Penggabungan tersebut selaras dengan penggabungan di level sasaran strategis BPOM terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program/Indikator		Target	Sasaran Program/Indikator		Target	
3.1	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,7		Pindah ke SP 3		
SP 4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama		SP 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama		Perubahan nomenklatur dengan menggabungkan SP 3 terkait pelayanan publik dan SP 4 terkait tata kelola pemerintahan. Penggabungan tersebut selaras dengan penggabungan di level sasaran strategis BPOM terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
4.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34,6	3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33,8	Terdapat penurunan target pada beberapa komponen pembentuk indeks antara lain: a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. b. Indeks Pelayanan Publik. c. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. d. Survei Kepuasan Masyarakat. Penurunan ini secara umum disebabkan adanya perubahan instrumen pengukuran serta adanya penambahan jumlah satker/unit kerja yang menjadi obyek pengukuran

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Program/Indikator		Target	Sasaran Program/Indikator		Target	
4.2	Indeks Opini Publik	85,2	3.2	Indeks Opini Publik	78,25	Penurunan target disebabkan adanya penyesuaian instrumen/aspek penilaian indeks
			3.3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,7	Tetap
4.3	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	Tetap
4.4	Nilai AKIP Sekretariat Utama	83,81	3.5	Nilai AKIP Sekretariat Utama	83,81	Tetap
4.5	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	Tetap
4.6	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	Tetap

Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 8 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Periode Pelaporan
1.	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	a. Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5%	Triwulanan
2.	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	b. Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86%	Tahunan
3.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	c. Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33,8	Tahunan
		d. Indeks Opini Publik	78,25	Tahunan
		e. Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,7	Tahunan
		f. Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	Tahunan
		g. Nilai AKIP Sekretariat Utama	83,81	Tahunan
		h. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	Tahunan
		i. Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	Tahunan

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu *e-performance*. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dibandingkan dengan Rancangan Renstra Setlama dan RKT tahun 2025, terdapat beberapa indikator yang berubah targetnya pada PK tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 9 Perbandingan Rancangan Renstra, RKT, dan PK Sekretariat Utama Tahun 2025

No	Indikator	Target				Justifikasi
		Rancangan Renstra	RKT 2025	PK 2025	Revisi PK 2025	
1.	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61	61	61	86	Target Renstra dan RKT ditetapkan berdasarkan instrumen pengukuran yang lama. Pada tahun 2025 terdapat instrumen pengukuran efektivitas KIE yang baru, sehingga dilakukan perubahan pada saat revisi PK 2025 pada bulan Agustus berdasarkan Renstra final. Penyesuaian target juga mempertimbangkan realisasi indeks efektivitas KIE TW I-II 2025
2.	Indeks RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	34,60	31,69	34,60	33,8	Target di RKT disusun sebelum nilai RB BPOM Tahun 2024 diterbitkan oleh KemenPANRB, sehingga pada Rancangan Renstra dan PK 2025 disesuaikan dengan realisasi tahun 2024. Pada bulan Agustus dilakukan revisi PK 2025 berdasarkan Renstra final. Penurunan target pada revisi PK 2025 disebabkan karena terdapat penurunan target pada beberapa komponen pembentuk indeks
3.	Indeks Opini Publik	85,2	85,15	85,2	78,25	Target di RKT disusun sebelum Indeks Opini Publik Tahun 2024 terbit, sehingga pada PK 2025 disesuaikan dengan realisasi tahun 2024. Pada bulan Agustus dilakukan revisi PK 2025

No	Indikator	Target				Justifikasi
		Rancangan Renstra	RKT 2025	PK 2025	Revisi PK 2025	
						berdasarkan Resntra final. Penurunan target disebabkan adanya penyesuaian instrumen/aspek penilaian indeks
4.	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	91,09	86,62	86,62	Target di RKT disusun sebelum Nilai Pembangunan ZI Tahun 2024 terbit, sehingga pada PK 2025 disesuaikan dengan realisasi tahun 2024
5.	Nilai AKIP Sekretariat Utama	83,81	81,77	83,81	83,81	Target di RKT disusun sebelum Nilai AKIP Tahun 2024 terbit, sehingga pada PK 2025 disesuaikan dengan realisasi tahun 2024
6.	Nilai Kinerja Anggaran Settama	5	91,58	5	5	Target di RKT merupakan nilai NKA, sedangkan pada Renstra dan PK ditargetkan dalam bentuk kategori NKA
7.	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	3,4	2,91	2,91	Target di RKT disusun sebelum Indeks Manrisk Settama Tahun 2024 terbit, sehingga pada PK 2025 disesuaikan dengan realisasi tahun 2024

II.3.2. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp679.484.097.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama pada 1 program sebagai berikut:

Tabel 10 Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	674.848.879.000
	Total	674.848.879.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama Tahun 2025 yang mengacu pada arah kebijakan BPOM berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.07.24.132 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan serta opini publik BPOM dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif.
2. Peningkatan kualitas manajemen ASN BPOM khususnya implementasi manajemen talenta, serta optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana BPOM dengan mengutamakan produk dalam negeri untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan serta layanan publik BPOM yang prima.
3. Peningkatan efektivitas dan simplifikasi regulasi serta advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.
4. Penguatan dukungan koordinasi dan kerja sama BPOM dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan kepemimpinan BPOM di dunia internasional untuk mendukung daya saing nasional.
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan melalui restrukturisasi organisasi dan tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital.

Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
- b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
- c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 11 Rincian Anggaran per Sasaran Program Tahun 2025

Program/Sasaran Program	Pagu
Program Dukungan Manajemen	674.848.879.000
1. Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	5.405.261.000
2. Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1.000.000.000
3. Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	1.350.000.000
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	667.093.618.000

Pada tanggal 28 Agustus 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama berdasarkan Rancangan Renstra hasil dari forum penyesuaian Rancangan Renstra bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 15 Agustus 2025. Terdapat perubahan pagu anggaran dibandingkan PK awal sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Anggaran per Sasaran Program Tahun 2025 pada PK Revisi

Program/Sasaran Program	Pagu PK Awal	Pagu PK Revisi
Program Dukungan Manajemen	674.848.879.000	779.376.940.000
1. Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	5.405.261.000	6.694.851.000
2. Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1.000.000.000	819.560.000
3. Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	1.350.000.000	-
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	667.093.618.000	-
5. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama		771.862.529.000

Penambahan pagu pada PK revisi disebabkan karena penambahan belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK tahap I dan II, pengisian jabatan, serta belanja perjalanan dinas penempatan CPNS.

II.4. PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Kriteria pencapaian IKSP berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM sebagai berikut:

Tabel 13 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%		-
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$		Sangat Efektif
Baik	$90\% < x \leq 100\%$		Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$		Kurang Efektif
Kurang	<60%		Tidak Efektif

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM¹

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: (1) Capaian Perjanjian Kinerja (PK) dan (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

¹ Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Tabel 14 Perhitungan NKO Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (3)	Nilai Akhir Capaian PK (4) $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$
1								
2								
3								
	Total Capaian PK (5)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (6)							
	Predikat NKO (7)							

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\%$

(2) = IKSP > 110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = (2) dikurangi dengan nilai predikat AKIP

(4) = $\{(2) \times (100\% - (3)) \times 100\}$

(5) = penjumlahan kolom (4)

(6) = (5) dibagi dengan jumlah IKSP

Tabel 15 Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

Predikat NKO sesuai tabel berikut:

Tabel 16 Predikat NKO

Predikat	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	> 110%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	

Predikat	NKO	Notifikasi Warna
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM²

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 17 Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2029

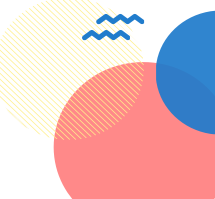
Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$70\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.

² Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



III.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Laporan kinerja tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai evaluasi program dan kegiatan selama tahun 2025. Evaluasi dilakukan pada 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.



III.1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 18 Pencapaian IKSP Sekretariat Utama Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	% CAPAIAN		NKO 2025
				2025	2029	2025	2025	2029	
1	Meningkatnya efektivitas kerja sama BPOM	1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif (%)	90,5	92,5	90,66	100,18	98,01	100,18
2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif (%)	86	98	96,05	111,69	98,01	110,00 (normalisasi)
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama (indeks)	34,20	33,80	34,27	101,39	100,20	100,20
		3.2	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama (indeks)	4,70	4,90	79,20	101,21	99,94	101,21
		3.3	Indeks Opini Publik (indeks)	85,2	79,25	4,96	105,53	101,22	105,53
		3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama (nilai)	86,62	87,54	87,56	101,09	100,02	101,09
		3.5	Nilai AKIP Sekretariat Utama (nilai)	83,82	85,97	81,88	97,70	95,24	97,70
		3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (predikat)	5	5	5	100,00	100,00	100,00
		3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama (indeks)	2,91	3,23	2,94	101,03	91,02	101,03
NKO									102,01

Kertas kerja pengukuran kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 per bulan dapat diakses pada Lampiran 4 atau melalui https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLFXfx0yfRLwS_P0uMQVvUzMLNxA5FMhBO3U_rHBK8o/edit?gid=0#gid=0

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Utama tahun 2025 adalah 102,01 dengan predikat “Istimewa” (Biru). Predikat AKIP Sekretariat Utama tahun 2025 adalah A, sehingga tidak dilakukan pengurangan terhadap capaian PK. Dari 9 (sembilan) IK, dilakukan normalisasi terhadap 1 IK yaitu “Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif” karena capaiannya lebih dari 110%.

2025

Money

Panduan

NKO

Data Tahun 2025

102.01%

Pagu

Data Tahun 2025

Rp 2,353,394,689,000

Realisasi Anggaran

Data Tahun 2025

Rp 1,804,226,104,836

Capaian

Data Tahun 2025

76.66%

Kerangka Kerja Logis

Pilih Unit Kerja

Sekretariat Utama

Pilih Bulan

Desember

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAIAN FINAL A X B
1	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33.80	34.27	101.39%	101.39%	100%	101.39%
2	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks Opini Publik	78.25	79.20	101.21%	101.21%	100%	101.21%
3	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4.70	4.96	105.53%	105.53%	100%	105.53%
4	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86.62	87.56	101.09%	101.09%	100%	101.09%
5	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Nlai AKIP Sekretariat Utama	83.81	81.88	97.70%	97.70%	100%	97.70%
6	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100%	100.00%
7	Tenwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2.91	2.94	101.03%	101.03%	100%	101.03%
8	Tenwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	(PK AWAL) Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	0.00	0.00	-	-	100%	-
9	Tenwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	(PK AWAL) Indeks Opini Publik	85.20	0.00	-	-	100%	-
10	Tenwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	(PK AWAL) Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	0.00	0.00	-	-	100%	-
11	Tenwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	(PK AWAL) Nlai AKIP Sekretariat Utama	0.00	0.00	-	-	100%	-
12	Tenwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	(PK AWAL) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	0.00	0.00	-	-	100%	-
13	Tenwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	(PK AWAL) Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	0.00	0.00	-	-	100%	-
14	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86.00	96.05	111.65%	110.00%	100%	110.00%
15	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90.50	90.66	100.18%	100.18%	100%	100.18%
16	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	(PK AWAL) Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4.70	0.00	-	-	100%	-

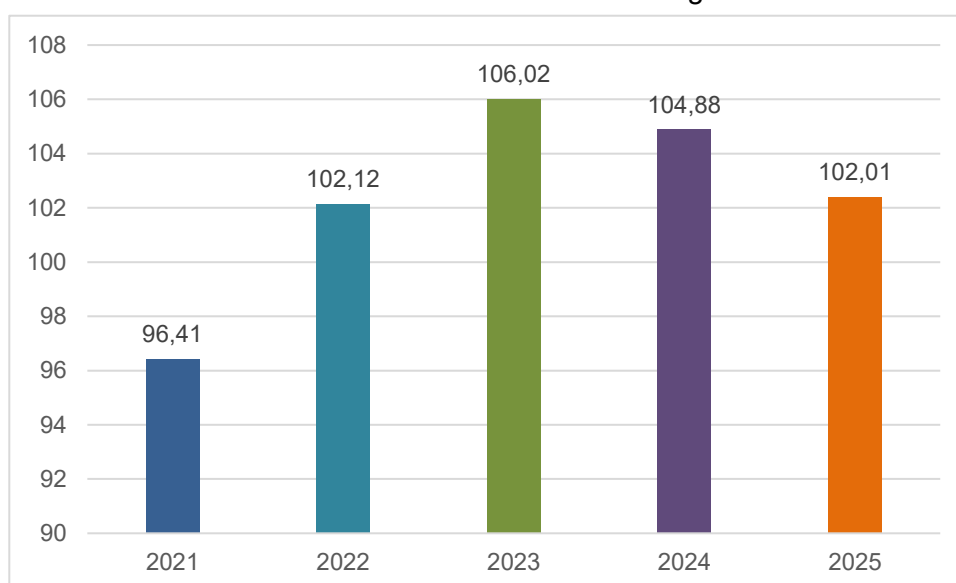
Gambar 8 NKO Sekretariat Utama Tahun 2025

Dari 9 (sembilan) IK yang dilakukan pengukuran, terdapat :

- 2 (dua) IK dengan kategori “Baik” yaitu: 1). Nilai AKIP Sekretariat Utama (97,70%) dan 2). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (100,00%).

- b. 6 (enam) IK dengan kategori “Sangat Baik” yaitu: 1). Persentase Kerja Sama yang Efektif (100,18%); 2). Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama (101,39%); 3). Indeks Opini Publik (101,21%); 4) Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama (105,53%); 5) Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama (101,09%); 6) Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama (101,03%).
- c. 1 (satu) IK dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu “Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif” (111,69%) dan dilakukan normalisasi menjadi 110,00%.

Tren NKO Sekretariat Utama tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 9 Tren NKO Sekretariat Utama 2021-2025

Sumber: Lapkin Settama

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa NKO Sekretariat Utama memiliki tren peningkatan selama periode tahun 2021-2023 dan menurun di tahun 2024 dan 2025. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 terdapat penambahan jumlah indikator yang tidak mencapai target. Pada tahun 2025 merupakan periode Renstra baru sehingga terdapat perbedaan sasaran program dan IK dibandingkan tahun 2021-2024. Namun demikian, NKO Settama tahun 2022-2025 mendapatkan kategori “Sangat Baik”.

III.1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1

Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama BPOM

IKSP:

1. Persentase Kerja Sama yang Efektif

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 19 Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2025

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2025
		T	T	R	%	
1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	92,5	90,5	90,66	100,18	98,01  Akan Tercapai
Capaian SS 1		100,18 (Sangat Baik)				

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama BPOM**” tahun 2025 adalah 100,18% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efektif untuk mencapai sasaran strategis.

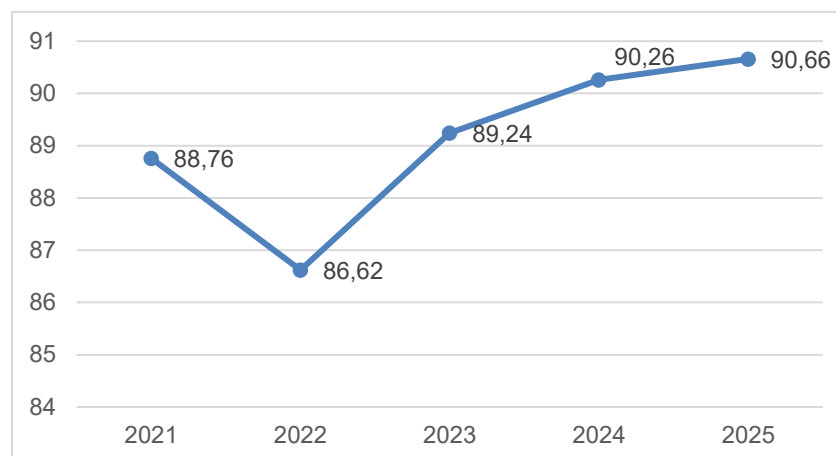
1.1. PERSENTASE KERJASAMA YANG EFEKTIF

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Persentase kerja sama yang efektif	92,5	90,5	90,66	100,18 (Sangat Baik)	98,01  Akan Tercapai

Realisasi indikator “Persentase kerja sama yang efektif” tahun 2025 adalah 90,66% dari target tahun 2025 sebesar 90,5%, sehingga capaian indikator adalah 100,18% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir

Renstra tahun 2029 sebesar 92,5%, maka capaian indikator adalah 98,01% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning). Namun demikian, capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan target akan tercapai di akhir tahun. Indikator ini merupakan lanjutan dari Renstra 2020-2024. Tren capaian indikator tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 10 Tren Realisasi Indikator Persentase kerja sama yang efektif Sekretariat Utama Tahun 2021-2025

Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2025. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 90,26%, maka terdapat peningkatan sebesar 0,44% pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung oleh pengawalan implementasi kerja sama sesuai dengan perencanaan. Penurunan dari tahun 2021 ke 2022 disebabkan oleh dikarenakan adanya perubahan *tools* penilaian indikator.

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri BPOM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara BPOM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara BPOM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan

non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi BPOM.

- b) Persentase peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran BPOM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara BPOM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\begin{aligned}\text{Persentase kerja sama yang efektif} &= [(A + B) / 2] \times 100\% \\ &= (90,77 + 90,54) / 2 = 90,66\%\end{aligned}$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- B. Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama internasional di bidang Obat dan Makanan.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama BPOM dengan mitra dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/ masukan oleh BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025, kerja sama yang dilakukan BPOM mengalami peningkatan efektivitas dan diharapkan meningkatkan peran strategis BPOM baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan dilakukan dengan indikator yang sejenis di K/L lain menggunakan data tahun 2024, karena data tahun 2025 belum diperoleh pada saat penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 20 Perbandingan Kinerja Persentase Kerjasama yang Efektif dengan K/L lainnya

No	K/L	Indikator	Realisasi 2024
1	BPOM	Persentase kerjasama yang efektif	90,26%
2	Basarnas	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
3	Biro Kerja Sama dan Humas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	89,5%
4	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Kementerian Hukum	Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang ditindaklanjuti	126,11%

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara umum semua K/L menggunakan indikator kerja sama yang ditindaklanjuti. Persentase kerja sama yang efektif di BPOM lebih rendah dibandingkan Basarnas dan Kementerian Hukum karena perbedaan lingkup kerja sama yang ditindaklanjuti, dimana kerja sama BPOM meliputi dalam dan luar negeri yang membutuhkan pemantauan lebih seksama.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra terkait kerja sama;
2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja sama yang sudah ada;
3. Memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan SOP maupun regulasi yang ada.

Tabel 21 Matriks Kendala, Rekomendasi dan RTL Persentase Kerja sama yang Efektif

Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Kerja sama ditindaklanjuti dan peran aktif BPOM pada forum internasional telah berjalan, namun perlu ditingkatkan	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama	Koordinasi dengan mitra kerja sama terkait implementasi kerja sama	Sepanjang Tahun (Selesai)	Y	SETTAM A/STRA/01	BPOM tidak dapat hadir dalam forum internasional dan pertemuan bilateral secara luring
Pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri	Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kehadiran/perwakilan BPOM di forum internasional dan kerja sama bilateral.	1. Mengikuti forum internasional dan menyelenggarakan pertemuan bilateral secara online 2. Berkoordinasi dengan K/L lain untuk menyampaikan masukan BPOM 3. Mengajukan tambahan anggaran	Sepanjang Tahun (Selesai)	Y	SETTAM A/STRA/01	BPOM tidak dapat hadir dalam forum internasional dan pertemuan bilateral secara luring

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu: 1). dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan dan 2). kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema KSST. Output yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja antara lain Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri seperti Badan Gizi Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian

Pertanian; Dharma Wanita Persatuan (DWP), BIG Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Organisasi Kemasyarakatan Persaudaraan Muslimah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Kebudayaan, dll;

- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral;
- 3) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain, Pertemuan terkait Rencana Renovasi Gedung Laboratorium AIFAESA I.P, Timor-Leste tanggal 15 Januari 2025, Pertemuan Kepala BPOM dengan Vice President United States of Pharmacopeia (USP) tanggal 27 Februari 2025, Pertemuan Kepala BPOM dengan Secretary Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (WI-DATCP) tanggal 13 Maret 2025, Pertemuan Kepala BPOM dengan CEO Health Science Authority (HSA) tanggal 22 April 2025, kunjungan kerja ke fasilitas manufaktur farmasi India di India tanggal 25-29 April, *courtesy visit* Duta Besar Sudan untuk Indonesia kepada Kepala BPOM tanggal 23 Mei 2025, Kunjungan Kerja ke Arab Saudi tanggal 29 Mei – 13 Juni 2025, Pertemuan Kepala BPOM dengan Deputy Secretary/Head of Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia tanggal 25 Agustus 2025, dl;
- 4) Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan United States of Pharmacopeia (USP) tanggal 7 Mei 2025, MoU antara BPOM dan National Medicines and Poisons Board (NMPB) Republik Sudan tanggal 3 Juli 2025, MoU antara BPOM dan The Center for Pharmaceutical Products Safety (CPPS) Uzbekistan mengenai tanggal 12 September 2025;
- 5) Pembahasan peninjauan kerja sama seperti Pertemuan Kepala BPOM dengan Commissioner NMPA di Beijing, RRT tanggal 11 November 202, Pertemuan Kepala BPOM dengan Perwakilan Emirates Drug Establishment (EDE) di Abu Dhabi, PEA tanggal 25 November 2025, Pertemuan Kepala BPOM dengan Duta Besar Tunisia di Jakarta tanggal 18 November 2025;
- 6) Partisipasi BPOM pada forum The 7th Asian Network Meeting (ANM) tanggal 23 April 2025, Penyusunan naskah akademik terkait Atase BPOM, Pertemuan Kepala BPOM dengan CEO Ghana FDA di Bali tanggal 30 Oktober 2025,

Pertemuan BPOM bersama Satgas Penanganan Cesium-137 dengan USFDA di Washington DC, Amerika Serikat tanggal 7 November 2025, dll;

- 7) Penyusunan posisi BPOM pada forum kerja sama regional pada pertemuan, ASEAN Trade in Goods Agreement upgrading Rules of Origin, ASEAN Trade Facilitation - Joint Consultative Committee, ASEAN Trade in Goods Agreement - Trade Negotiating Committee, 11th ASEAN Committee for Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS), 12th ASEAN Rapid Alert System For Food and Feed (ARASFF) National Contact Points Meeting and 10th ARASFF Steering Committee (SC) Meeting, ASEAN Trade Facilitation Joint consultative Committee (ATF-JCC), The 39th ACCSQ-PPWG Meeting, 6th ASEAN Health Cluster 3 (AHC 3) Meeting, Intersessional Meeting for the 7th AITIGA Sub-Committee on Rules of Origin (SCROO) tanggal 21 – 25 Juli 2025; Pertemuan Intersesi Task Force ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework (TF APRF), tanggal 29 Juli 2025, Pertemuan Kedua Action Plan Team on Healthcare/ Pharmaceuticals dalam kerangka IPEF pada tanggal 29 Agustus 2025, Pertemuan Sub-Working Group on Rules of Origin (SWG-ROO) ke-13 dalam kerangka ASEAN-Canada FTA (ACaFTA), tanggal 1 – 5 September 2025, The 9th ASEAN Health Cluster 4 Meeting tanggal 8 - 10 Oktober 2025, The 40th ACCSQ PPWG and its related meeting tanggal 3 - 7 November 2025, The 41st ACCSQ PFPWG and its related meeting tanggal 10 - 14 November 2025, The Intersessional Meeting on the Development of 2026-2030 Work Programme of ASEAN Health Cluster 4 on Ensuring Food Safety tanggal 15 Desember 2025, The Intersessional ASEAN Caucus Meeting of 9th ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) SC-STRACAP tanggal 16 Desember 2025, dll;
- 8) Penyusunan posisi BPOM pada forum kerja sama multilateral pada Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) Regulatory Meeting, Sixty-eighth session United Nations Commission on Narcotic Drug Meeting, Steering Committee Meeting of the Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products, masukan BPOM terhadap Initial Memorandum Committee on Consumer Policy pada Akses Keanggotaan Indonesia di OECD, Steering Group Meeting of South East Asia Regional Network (SEARN) tanggal 25 April 2025, Pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-78 tanggal 14 Mei 2025, Penyusunan Dokumen dalam rangka Kerja Sama Hibah dengan Gates Foundation tanggal 15 - 16 Mei 2025, FGD Pembahasan Hasil Studi Tujuan 1 dan 2, Pembaruan Analisis Kesenjangan Implementasi Trade Facilitation

Tabel 22 Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2025

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	98,00	86,00	96,05	111,69 (Tidak Dapat Disimpulkan)	98,01  Akan Tercapai
Capaian SS 2		111,69 (Tidak Dapat Disimpulkan)				

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis **“Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”** tahun 2025 adalah 111,69% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” (Abu-abu). Dengan demikian tidak dapat disimpulkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator dan targetnya.

2.1. PERSENTASE UPT YANG MELAKSANAKAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) DENGAN EFEKTIF

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	98,00	86,00	96,05	111,69 (Tidak Dapat Disimpulkan)	98,01  Akan Tercapai

Realisasi indikator “Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif” tahun 2025 adalah 96,05% dari target tahun 2025 sebesar 86,00%, sehingga capaian indikator adalah 111,69% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” (Abu-abu). Hal ini disebabkan karena IK tersebut merupakan IK baru di Renstra periode 2025-2029, sehingga belum terdapat *baseline* data. Realisasi tahun 2025 akan menjadi masukan untuk penetapan target kinerja tahun 2026. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 98,00%, maka capaian indikator adalah 98,01% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning). Namun demikian, capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan target akan tercapai di akhir tahun. Indikator ini merupakan indikator baru di

Renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Pengukuran indikator dilakukan dengan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE melalui survei efektivitas KIE oleh UPT kepada responden penerima manfaat KIE tatap muka dan KIE media, yang selanjutnya diinput pada aplikasi evaluasi KIE (<https://evaluasikie.pom.go.id>).

Target responden survei efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dikelompokkan berdasarkan fokus penilaian untuk memastikan validitas data. Untuk mengukur efektivitas KIE Tatap Muka, survei menargetkan peserta yang terdaftar sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan yang sedang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Sebaliknya, dalam studi efektivitas KIE Media, responden yang dilibatkan adalah masyarakat yang aktif mengakses berbagai kanal media BPOM atau telah menerima produk informasi terkait dalam kurun waktu satu bulan terakhir

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan merupakan ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang dilakukan Unit Penyelenggara KIE berdasarkan penerimaan audiens KIE, terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, serta pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat mauoun melalui media, diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Penilaian indeks efektivitas KIE diinterpretasikan dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 23 Kategori Indeks Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Tidak Efektif
65,01 - 75,00	Kurang Efektif

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
75,01 - 85,00	Cukup Efektif
85,01 - 95,00	Efektif
95,01 – 100,00	Sangat Efektif

Cara perhitungan “Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif” yaitu (jumlah UPT yang memiliki nilai Tingkat Efektivitas KIE minimal di angka 85,01 (Efektif) dibagi dengan jumlah total UPT) x 100%. Pada tahun 2025 terdapat 73 UPT dengan nilai Tingkat Efektivitas KIE minimal di angka 85,01 dari total 76 UPT yang melaksanakan KIE, sehingga realisasi indikator adalah 96,05%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KIE yang dilakukan UPT telah efektif dalam memberikan manfaat untuk penerima KIE.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan dilakukan dengan indikator yang sejenis di K/L lain, yaitu menggunakan indikator yang sama-rumpun: edukasi publik, dilaksanakan oleh unit wilayah, diukur dalam persentase cakupan implementasi program.

Tabel 24 Perbandingan Indikator “Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan Efektif” dengan K/L Lain

No	K/L	Indikator	Realisasi
1	BPOM	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	96,05% (2025)
2	BKKBN	Persentase kab/kota melaksanakan advokasi dan KIE	89% (2024)
3	Kemenkes	Persentase kab/kota melaksanakan promosi kesehatan	84% (2024)
4	OJK	Kabupaten/kota melaksanakan edukasi keuangan	72% (2024)

Indikator Persentase UPT BPOM yang melaksanakan KIE secara efektif merupakan indikator outcome karena mengukur keberhasilan implementasi KIE, bukan jumlah aktivitas yang dilakukan. Indikator ini merepresentasikan tingkat keberfungsian sistem penyelenggaraan KIE BPOM secara nasional, yaitu sejauh mana standar komunikasi publik telah terinternalisasi dan dilaksanakan oleh seluruh UPT.

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator Persentase UPT BPOM yang melaksanakan KIE secara efektif tahun 2025 sebesar 96,05% menunjukkan implementasi edukasi telah terlaksana hampir pada seluruh UPT. Dibandingkan

dengan indikator sejenis pada BKKBN tahun 2024 sebesar 89% dan Kementerian Kesehatan tahun 2024 sebesar 84%, tingkat pemerataan implementasi KIE BPOM lebih tinggi.

Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif dan menunjukkan kapasitas organisasi dalam memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan konsisten di seluruh wilayah kerja.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Komitmen yang tinggi unit pusat penyelenggara KIE dan UPT dalam melaksanakan KIE dengan efektif.
2. Pendampingan intensif Biro Hukum dan Organisasi dalam pengelolaan KIE.
3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan KIE secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, monev dan pelaporan.

Walaupun indikator telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan sebagai berikut:

Tabel 25 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Persentase UPT yang Melaksanakn KIE secara Efektif

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Belum semua UPT melaksanakan pengelolaan KIE secara optimal	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas untuk mengelola KIE sesuai pedoman 2. Membuat sistem monitoring dan evaluasi KIE yang komprehensif 3. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan seluruh unit	1. Implementasi Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE BPOM 2. Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE kepada Tim Pengelola KIE di UPT 3. Pemanfaatan WAG Koordinasi KIE sebagai forum komunikasi	2026 - 2029	Ya	SETTAMA /STRA/02	Pelaksanaan KIE BPOM belum sepenuhnya tepat sasaran

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
	penyelenggara KIE di pusat dan UPT	pelaksana KIE di lingkungan BPOM 4. Pendampingan pengelolaan KIE bagi unit penyelenggara KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi 5. Penyusunan tools/instrumen evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE unit penyelenggara KIE				

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif, sedangkan output yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja yaitu Layanan Bantuan Hukum.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- Pembuatan Pusat Data KIE BPOM melalui bit.ly/kataBPOMCORNER sebagai rujukan pedoman, materi serta monitoring pengelolaan KIE UPT.
- Uji coba instrumen survei efektivitas KIE 2025-2029.
- Pembuatan Subsite kataBPOM.pom.go.id bersama Pusat Data dan informasi.
- Pengembangan Aplikasi Evaluasi KIE versi 1.5 yang disesuaikan dengan instrumen survei efektivitas KIE 2025-2029.
- Pembuatan video series tutorial penggunaan Aplikasi Evaluasi KIE versi 1.5
- Penyusunan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK. 02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE BPOM.
- Pembuatan materi KIE dan konten edukasi yang dapat dimanfaatkan oleh unit penyelenggara KIE dan masyarakat.

- h) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE BPOM kepada seluruh UPT dan unit pusat terkait.
- i) Pendampingan intensif kepada UPT yang dilakukan oleh Tim Pendamping KIE Biro Hukum dan Organisasi per wilayah.
- j) Peluncuran dan sosialisasi penggunaan Subsite kataBPOM.
- k) Peluncuran dan sosialisasi Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5.
- l) Penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris Utama Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE dalam Rangka Upaya Konvergensi *Stunting*.
- m) Penyusunan *tools* monitoring dan evaluasi kesesuaian KIE UPT sesuai pedoman.
- n) Pemetaan dalam rangka penilaian UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman.

**Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal
Serta Layanan Publik yang Prima Dalam Koordinasi
Sekretariat Utama**

IKSP:

1. Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama
2. Indeks Opini Publik
3. Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama
4. Nilai Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Utama
5. Nilai AKIP Sekretariat Utama
6. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama
7. Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama

Tabel 26 Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2025

No	Indikator	2029	Capaian Tahun 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34,20	33,8	34,27	101,39	100,20 
2	Indeks Opini Publik	79,25	78,25	79,20	101,21	99,94 
3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,90	4,7	4,96	105,53	101,22 

No	Indikator	2029	Capaian Tahun 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
4	Nilai Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Utama	87,54	86,62	87,56	101,09	100,02 
5	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,97	83,81	81,88	97,70	95,24 
6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5	5	5	100,00	100,00 
7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	3,23	2,91	2,94	101,03	91,02 
Capaian SS 3			101,14 Sangat Baik			

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Dalam Koordinasi Sekretariat Utama"** tahun 2025 adalah 101,14% dengan kategori "Sangat Baik" (Biru). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efektif untuk mencapai sasaran strategis.

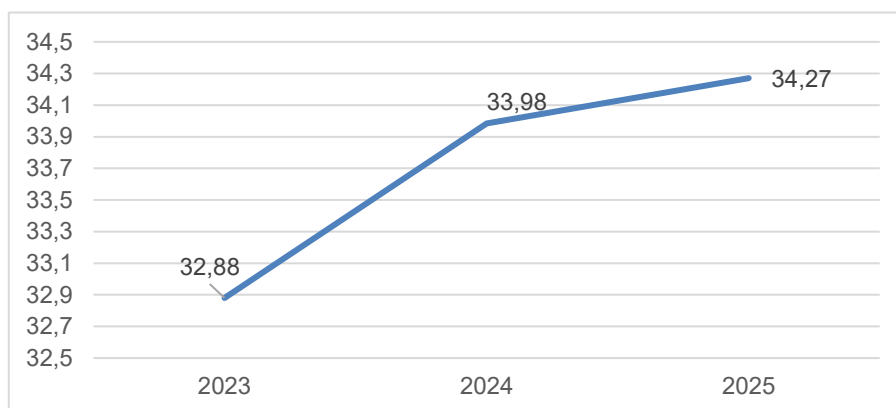
3.1 INDEKS RB BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34,20	33,80	34,27	101,39 (Sangat Baik)	100,20  Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator "Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama" tahun 2025 adalah 34,27% dari target tahun 2025 sebesar 33,80%, sehingga capaian indikator adalah 101,39% dengan kategori "Sangat Baik" (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 34,20, maka capaian indikator adalah 100,20% dengan kategori "Tercapai/ Melampaui" (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan target ke depan. Indikator ini merupakan IK baru di Renstra periode 2025-2029, namun Indeks RB BPOM telah dilakukan pengukuran sejak tahun 2023 dengan penilaian RB General dan RB Tematik.

Sehingga data untuk capaian Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama tahun 2023 – 2025 dapat diperoleh dengan tren sebagai berikut:



Gambar 11 Tren 'Indeks RB BPOM' di Lingkup Sekretariat Utama Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama memiliki tren peningkatan yaitu 32,88 pada tahun 2023 menjadi 34,27 di tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan pada kualitas tata kelola organisasi, efektivitas proses bisnis, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini mencerminkan semakin matangnya penerapan manajemen berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, dan konsistensi implementasi kebijakan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Reformasi Birokrasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas melalui kebijakan RB General dan RB Tematik. RB general berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso, sedangkan RB tematik berfokus pada penyelesaian masalah-masalah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekretariat Utama sesuai lingkup tugasnya memiliki peranan penting dalam pelaksanaan RB General, oleh karena itu Indeks RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan dalam mewujudkan birokrasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas sesuai dengan lingkup fungsi Sekretariat Utama.

Indeks RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dibentuk dari beberapa indikator sebagai berikut:

RB GENERAL

1. Nilai SAKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama;
2. Indeks Perencanaan Pembangunan;
3. Tingkat Digitalisasi Arsip;
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
5. Indeks Pengelolaan Aset;
6. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan;
7. Indeks Reformasi Hukum;
8. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
9. Indeks Sistem Merit;
10. Indeks Pelayanan Publik;
11. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
12. Opini BPK
13. Survei Kepuasan Masyarakat

Gambar 12 Indikator Pembentuk Indeks RB di Lingkup Settama

Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indeks RB BPOM di Lingkup Settama tahun 2023 - 2025 sebagai berikut:

Tabel 27 Indeks RB BPOM di Lingkup Settama tahun 2023 – 2025

No	Komponen RB	Nilai			Bobot	Skor Indeks			
		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
1	Nilai SAKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	61,00	61,35	61,60	4	2,44	2,45	2,46	↑
2	Indeks Perencanaan Pembangunan	88,74	97,5	97,94	2	1,77	1,95	1,96	↑
3	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,38	98,09	96,82	2	1,97	1,96	1,94	↓
4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,64	96,89	98,29	2	1,93	1,94	1,97	↑
5	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,32	3,3	3,79	2	1,66	1,65	1,90	↑
6	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	3	5	5	1,5	0,9	1,5	1,5	=

No	Komponen RB	Nilai			Bobot	Skor Indeks			
		2023	2024	2025		2023	2024	2025	
7	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	99,01	100	100	1,5	1,49	1,5	1,5	≡
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	84,9	88,25	88,26	2	1,7	1,76	1,77	↑
9	Indeks Sistem Merit	387,5	400	400	4	3,78	3,9	3,9	≡
10	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,78	4,91	4,8	1,5	1,45	1,47	1,44	↓
11	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,11	94,94	94,94	1,5	1,41	1,42	1,42	≡
12	Opini BPK	5	5	5	5	5	5	5	≡
13	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	92,22	93,47	93,97	8	7,38	7,48	7,52	↑
Total						32,88	33,98	34,27	

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan dilakukan dengan indeks RB di K/L lain yang bersumber dari laporan kinerja tahun 2024.

Tabel 28 Perbandingan Indikator "Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama" dengan K/L Lain

No	Komponen RB	Skor Indeks 2024	
		BPOM	Bappenas
1	Nilai SAKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	2,45	2,50
2	Indeks Perencanaan Pembangunan	1,95	1,82
3	Tingkat Digitalisasi Arsip	1,96	1,84
4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	1,94	1,83
5	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	1,65	1,86
6	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	0,6
7	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	1,5	1,5
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	1,76	1,49
9	Indeks Sistem Merit	3,9	3,71
10	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	1,47	1,03
11	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,42	1,4
12	Opini BPK	5	5
13	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	7,48	7,22
Total		33,98	30,77

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi indikator "Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama" di BPOM tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Kementerian PPN/Bappenas dengan selisih nilai 3,21. BPOM mendapatkan skor lebih tinggi pada aspek layanan, SDM, pengaduan, dan kepuasan masyarakat. Namun BPOM masih perlu penguatan pada arsitektur kinerja dan pengelolaan aset agar reformasi birokrasi tidak hanya unggul pada layanan, namun juga unggul pada manajemen strategis.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini didukung komitmen Sekretariat Utama dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan tata kelola pada indikator-indikator RB General yang menjadi objek penilaian. Beberapa indikator RB General telah memperoleh dan mempertahankan nilai maksimal seperti pada: a) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan; b) Indeks Reformasi Hukum (IRH); dan c) Opini BPK. Beberapa indikator lainnya mengalami peningkatan yang signifikan dan atau mendekati nilai sempurna yaitu pada: a) Indeks Perencanaan Pembangunan; b) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); c) Indeks Pengelolaan Aset (IPA); dan d) Indeks Sistem Merit.

Pencapaian ini juga didukung oleh rencana aksi RB General yang berkualitas dengan tingkat implementasi rencana aksi diatas 90%. Beberapa rencana aksi yang disusun dan dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi penilaian tahun sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan dan penetapan rencana kerja yang selaras dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra dan penyusunan dokumen anggarannya berdasarkan telaah APIP, Kementerian Keuangan dan Beppenas sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan DIPA yang berkualitas pada capaian Indeks Perencanaan Pembangunan.
2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Bimbingan Teknis bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada seluruh Satuan Kerja serta Monitoring dan Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang konsisten pada capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
3. Evaluasi dan peningkatan target PNBPN dari pemanfaatan BMN, peningkatan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan pemindahtanganan BMN

rusak berat melalui mekanisme lelang pada capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

4. Pengelolaan jabatan fungsional melalui mekanisme manajemen talenta, pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta Terintegrasi (Mentari) menggunakan Artificial Intelligence dalam menentukan suksesor dan pengisian jabatan melalui manajemen talenta pada capaian Indeks Sistem Merit.

Meskipun secara umum terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan, namun terdapat penurunan capaian pada beberapa indikator RB General yang umumnya disebabkan oleh perubahan penilaian dari K/L Meso seperti pada Tingkat Digitalisasi Arsip dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Tantangan lainnya adalah perubahan-perubahan kebijakan K/L Meso lainnya yang masih belum memiliki kejelasan penilaian sehingga evaluasi target kinerja tahun 2026 cukup sulit ditentukan. Identifikasi kendala/permasalahan secara detil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama

Kendala/Perm asalahan	Rekomendasi	RTL	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Perubahan kebijakan K/L Meso dalam pengelolaan RB General yang mengubah cara pengukuran capaian	Melakukan evaluasi target tahun 2026 dengan prinsip SMART-C	1. Masing-masing Unit Kerja Koordinator indikator berkoordinasi dengan K/L Meso 2. Melakukan koordinasi internal penetapan target RB Settama	TW I 2026	Tidak	-	-

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang mendukung capaian indikator antara lain: 1). Layanan pemantauan dan evaluasi, 2). Layanan manajemen keuangan, 3). Layanan

perencanaan dan penganggaran, 4). Layanan manajemen SDM, 5). Layanan umum, dan 6). Layanan perkantoran

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 10-12 Februari 2025 guna meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, khususnya dalam aspek penyajian data, analisis capaian kinerja, pemanfaatan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan, serta perumusan rencana tindak lanjut yang berbasis pada hasil kinerja.
2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertemakan “Efisiensi dan Digitalisasi Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Ekonomi Nasional” diselenggarakan pada 18-19 Maret 2025 guna merumuskan Arah Kebijakan BPOM tahun 2026.
3. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TA 2024 Unaudited tanggal 4-6 Februari 2025. LK BPOM TA 2024 Unaudited disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 28 Februari 2025.
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2024 audited yang telah disampaikan kepada BPK sesuai surat Kepala BPOM nomor KU.05.06.1.2.05.25.05 tanggal 7 Mei 2025 dan telah mendapati opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini ini dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 7a/LHP/XIX/5/2025 Tanggal 19 Mei 2025 yang disampaikan BPK kepada BPOM pada tanggal 2 September 2025 sesuai BAST LHP atas LK BPOM Tahun 2024 di DKI Jakarta dan Daerah Nomor: 6/T/BAST/DJPKN-VI/PPN.01/09/2025.
5. Penyusunan LK BPOM Semester I Tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai Surat Kepala BPOM Nomor B-KU.05.06.1.2.07.25.262 tanggal 28 Juli 2025 serta Penyusunan LK BPOM TW III Tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai Surat Kepala BPOM Nomor B-KU.05.06.2.10.25.558 tanggal 28 Oktober 2025.
6. Reviu dan pengesahan SOP Pengujian Kelayakan Transaksi dan Pencairan Anggaran Nomor SOP POM-12.01/CFM.04/SOP.01 pada tanggal 16 Desember 2025 yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

7. Reviu dan pengesahan SOP Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Nomor SOP POM-12.01/CFM.04/SOP.02 pada tanggal 16 Desember 2025 yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.
8. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan I, II, III, IV 2025 serta strategi pelaksanaan triwulan II, III, IV, dan TA 2026 bagi satuan kerja di Lingkungan BPOM tanggal 15 April 2025, 18 Juni 2025, 22 September 2025, dan 18 November 2025.
9. Asistensi/pembinaan satker secara luring maupun daring, utamanya untuk meningkatkan pemenuhan satker terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi instansi.
10. Monitoring dan bimtek terkait pengelolaan rekening bendahara, pemanfaatan sistem transaksi keuangan digita/cashless (KKP dan CMS)
11. Rekonsiliasi nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan diterima di muka (PDDM) baik per satker maupun per jenis layanan PNBP dilaksanakan tiap triwulan. Kegiatan ini merupakan mitigasi risiko salah saji PNBP dan PDDM pada laporan keuangan BPOM. Nilai PDDM sendiri merupakan akrual atas PNBP yang telah diterima BPOM. Semakin tinggi nilai PDDM mengindikasikan semakin tingginya sisa kewajiban BPOM/output layanan PNBP yang belum diselesaikan.
12. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra BPOM 2025-2029 tanggal 24-26 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas satuan kerja di Lingkungan BPOM dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.
13. Bimbingan teknis peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) tanggal 27-28 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman PPSPM terhadap berbagai regulasi pengelolaan keuangan, meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan teknis di lapangan, serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan guna menyempurnakan pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana APBN.
14. Workshop Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BPOM: Jelajah Media Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 22 - 23 Januari 2025. Kegiatan ini mencakup agenda penyerahan arsip statis dari BPOM kepada ANRI dan Pendandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis, serta pemaparan

materi oleh narasumber terkait Keterampilan Menulis Naskah Dinas yang Efektif.

15. Pemutakhiran Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2024 Unaudited yang diselenggarakan pada 21-24 Januari 2025. Pemutakhiran Data BMN dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menyusun dan menyajikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BMN yang akan disajikan dalam Laporan BMN. Kegiatan ini mencakup agenda pemaparan materi Penyusunan Laporan BMN oleh Dit. PKKN Kementerian Keuangan.
16. Pengelolaan Clearing House Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan, tantangan maupun peluang dalam Pengadaan Barang/Jasa yang melibatkan PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau pihak-pihak lain yang kompeten/terkait. Selama Triwulan I tahun 2025, telah terlaksana 3 kegiatan Clearing House yang meliputi Pembahasan Pengadaan Outsourcing Tahun 2025 Tanah Bumbu pada 24 Desember 2024, Persiapan Pembangunan Lanjutan Loka POM di Rejang Rebong pada 9 Januari 2025, dan Tata Cara Pembayaran pada Paket Pekerjaan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perancang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahap I Balai POM di Payakumbuh pada 12 Maret 2025.
17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pengadaan Barang/ Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Badan Pengawas Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025 sebagai upaya dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik pada proses pengadaan, maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan.
18. Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 secara daring yang dilaksanakan tanggal 13 Januari 2025 untuk mensoaislisasikan kegiatan pengawasan kearsipan yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2025 kepada seluruh Objek Pengawasan.
19. Sosialisasi Formulir Penilaian ASKI Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 kepada Unit Kerja di Pusat secara daring yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2025 sebagai persiapan dalam menghadapi pengawasan kearsipan internal dengan menggunakan formulir penilaian ASKI baru.
20. Kegiatan Pengawasan Kearsipan untuk Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja di Pusat.

21. Kegiatan pengasuransian gedung dan bangunan merupakan kegiatan rutin tahunan dilakukan pada awal tahun untuk pembayaran objek asuransi BMN Badan POM yang meliputi bangunan gedung kantor dan laboratorium.
22. Keikutsertaan dalam kegiatan Evaluasi Uji Coba Peralatan Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan untuk Deteksi Otomatis Bakteri Pathogen dan Logam Merkuri.
23. Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Satker di Lingkungan Badan POM.
24. Pembinaan SDM Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa pada Satker di Lingkungan Badan POM.
25. Pelaksanaan Asistensi Perencanaan Pengendalian Pelaksanaan Kontruksi di Satuan Kerja Balai POM di Kupang, Balai Besar POM Pekanbaru, dan Balai Besar POM di Medan.
26. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Kinerja Pengadaan Satker di Lingkungan BPOM
27. Pelaksanaan Implementasi Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
28. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.
29. Pelaksanaan Pendampingan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan BMN, Pengadaan dan Sarana Prasarana pada Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.
30. Penyerahan 741 SK CPNS dan Penandatanganan 347 Perjanjian Kinerja PPPK TA 2024 di Lingkungan Badan POM oleh Kepala Badan POM.
31. Pengelolaan Karier Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana, dan Manajemen Talenta SDM di Lingkungan Badan POM.
32. Reviu Kebutuhan ASN 2025-2029 sesuai dengan Renstra Badan POM 2025-2029.
33. Sosialisasi Keputusan Kepala Badan POM Nomor 414 Tahun 2025 tentang Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan POM.
34. Penerbitan Keputusan Kepala BPOM Nomor 402 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Non Pengawas Farmasi dan Makanan.
35. Sosialisasi PerBPOM Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan BPOM.

36. Pelaksanaan Gema Aksi Layanan Kepegawaian (Galaksi) dalam peningkatan Kinerja, Kesejahteraan, dan Disiplin Pegawai.
37. Monitoring dan Evaluasi RTL terhadap hasil penilaian SPAN-LAPOR Tahun 2024, di antaranya pada tanggal 25 September 2025 telah diselenggarakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! kepada seluruh Pejabat Penghubung LAPOR di lingkungan BPOM secara daring.
38. Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026 tanggal 4-5 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang ditunjuk sebagai Perencana dan Operator RKA-K/L dari Seluruh Satker Pusat dan UPT secara hybrid bertujuan untuk memastikan penyusunan dokumen RKA-KL beserta data dukungnya sesuai peraturan yang berlaku.
39. Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BPOM Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam penyusunan, pengisian, serta analisis instrumen penilaian PIPK bagi Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BPOM dalam melakukan penilaian efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
40. Penilaian dan verifikasi Arsip Usul Serah secara berkala (setiap triwulan) melalui pertemuan daring (via Zoom meeting) yang diusulkan unit kerja di lingkungan BPOM.
41. Penilaian dan verifikasi Arsip Usul Musnah secara berkala (setiap triwulan) melalui pertemuan daring (via Zoom meeting) yang diusulkan oleh unit kerja di lingkungan BPOM.
42. Pemusnahan Arsip Periode Penilaian Triwulan IV tahun 2024, dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2025 melalui pertemuan daring (via Zoom meeting) berdasarkan Surat Kepala ANRI perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemusnahan Arsip di Lingkungan BPOM terhadap arsip yang berada pada satuan kerja di lingkungan BPOM.
43. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 untuk RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 pada tanggal 15 September 2025 yang dilaksanakan secara hybrid (luring untuk satuan kerja di lingkungan BPOM Pusat, dan daring untuk satuan kerja di lingkup UPT).
44. Pemutakhiran Data Barang Milik Negara BPOM Semester I Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 07 sampai dengan 10 Juli 2025 yang dilaksanakan secara

hybrid (luring untuk satuan kerja di lingkungan BPOM Pusat, dan daring untuk satuan kerja di lingkup UPT).

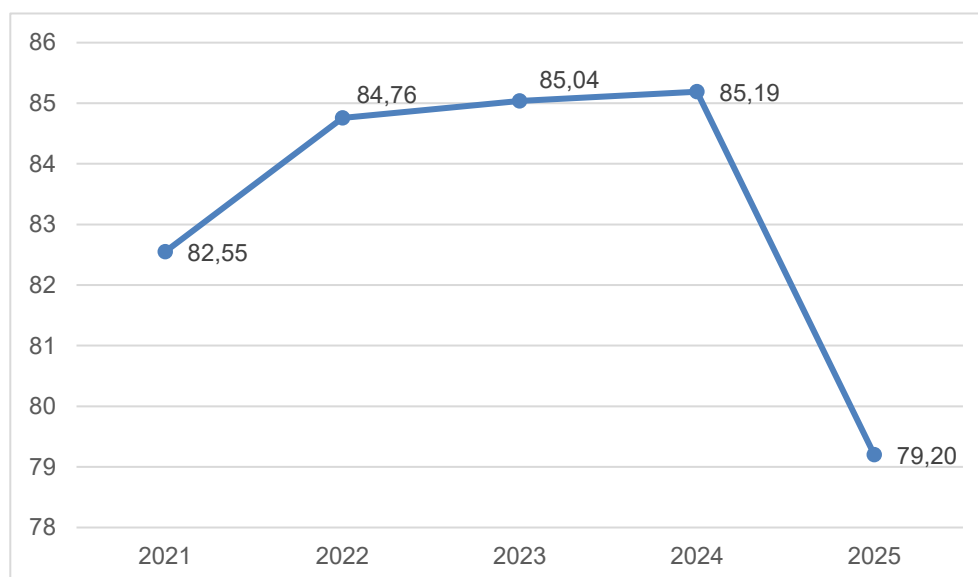
45. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Triwulan III Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 30 September 2025.
46. Finalisasi dan penetapan 7 draft SOP Makro Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BPOM pada tanggal 29 Juli 2025.
47. Sosialisasi Anti Penyuapan, Gratifikasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPOM secara daring melalui Zoom meeting pada tanggal 9 September 2025.
48. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BPOM pada tanggal 1 Juli 2025 seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
49. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 di Lingkungan BPOM yang dilaksanakan selama periode triwulan II s.d. III tahun 2025.
50. Pengoordinasian pelaksanaan SKM BPOM melalui berbagai tahapan kegiatan, antara lain: pengumpulan data dan desk jumlah pengguna layanan per jenis layanan, penghitungan jumlah responden survei, aktivasi tautan survei, validasi data, penyusunan laporan SKM UPP, analisis data SKM POM, dan penyusunan laporan SKM BPOM.
51. Pelaksanaan Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2026 pada 9–14 Oktober 2025.
52. Desk Penyusunan RPD BOK POM TA 2026 bersama Unit Pengampu, Inspektorat, dan UPT POM kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota pada 6–24 Oktober 2025.
53. Pemberian Penghargaan Pemda Berkinerja Baik DAK NF BOK POM TA 2023–2024 pada 28 Agustus 2025 di wilayah Sulawesi Selatan dan pada 17 November 2025 di Kalimantan Selatan.
54. Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 4–5 Desember 2025 di Semarang.
55. Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Usulan RKBMN Tahun 2024 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2026 pada 2 Desember 2025.

3.2 INDEKS OPINI PUBLIK

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Indeks opini publik	79,25	78,25	79,20	101,21 (Sangat Baik)	99,94 ▲ Akan Tercapai

Realisasi indikator “Indeks Opini Publik” tahun 2025 adalah 79,20 dari target tahun 2025 sebesar 78,25, sehingga capaian indikator adalah 101,21% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 79,25, maka capaian indikator adalah 99,94% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning). Namun demikian, capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan target akan tercapai di akhir periode Renstra. Indikator ini merupakan lanjutan dari Renstra 2020-2024. Tren capaian indikator tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 13 Tren Realisasi Indikator Indeks Opini Publik Sekretariat Utama Tahun 2021-2025

Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Tren peningkatan ini karena BPOM menyampaikan publikasi informasi publik melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan

masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap BPOM. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 85,19, maka terdapat penurunan sebesar -7,03% pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan tools dan metode suvey yang digunakan.

Instrumen yang dimaksud adalah kuesioner yang pada Tahun 2025 telah direformulasi dengan mengacu pada Renstra BPOM 2025–2029. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan lima aspek utama, yaitu Keamanan Produk, Pengawasan dan Penindakan, Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Komunikasi Publik, serta Sumber Daya. Perumusan aspek dilakukan melalui diskusi bersama pakar serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan pembobotan aspek dalam opini publik. Proses pembobotan melibatkan unsur internal BPOM, khususnya para perumus Renstra BPOM dan pihak terkait lainnya, dan hasilnya digunakan sebagai acuan dalam perhitungan Indeks Opini Publik Tahun 2025.

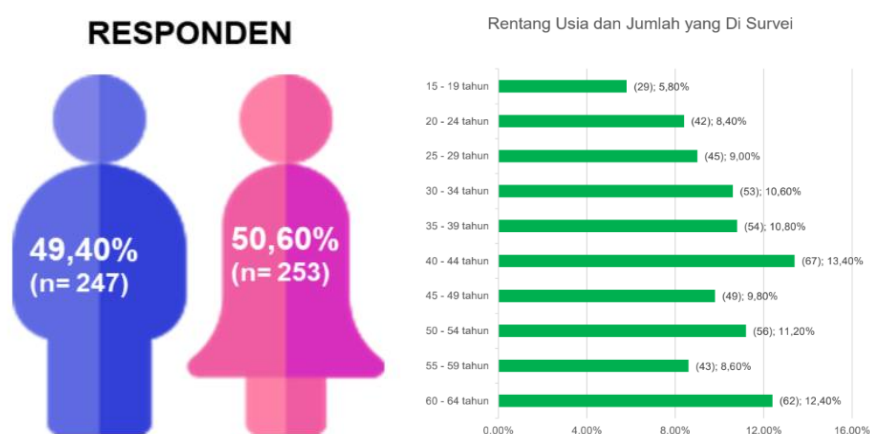
Dari sisi metodologi, pada Tahun 2025 digunakan purposive sampling dalam pemilihan kabupaten/kota, dilanjutkan dengan random sampling untuk pemilihan kecamatan dan kelurahan/desa dengan mempertimbangkan wilayah urban dan rural, serta systematic random sampling dalam penentuan responden. Selain itu, dilakukan penyesuaian jumlah responden akibat keterbatasan anggaran, namun tetap memperhatikan kaidah metodologi penelitian sehingga validitas hasil survei tetap terjaga.

Indeks opini publik diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap BPOM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative and Qualitative Research*. Survei dilakukan tiap tahun yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut. Survei ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPOM serta dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi komunikasi publik BPOM dalam menyampaikan informasi dan kebijakan BPOM.

Survei Opini Publik ini dilaksanakan pada 10 provinsi prioritas yang mewakili proporsi demografi nasional, dengan sampel berjumlah 500 responden. Survei ini

dilaksanakan di 15 kota/kabupaten di Indonesia, dengan penentuan kecamatan dilakukan dengan *random sampling*. Perhitungan sampel berdasarkan sebaran geografis mewakili wilayah Barat, Tengah dan Timur serta representatif dari pulau-pulau besar di Indonesia. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka secara langsung oleh enumerator, serta menggunakan telepon genggam atau tablet untuk merekam data yang diperoleh dari responden.

Survei dilakukan pada responden berusia 17–64 tahun dengan jenis kelamin 50,6% perempuan dan 49,4% laki-laki. Responden dengan usia 40–44 tahun merupakan kelompok yang paling banyak berpartisipasi, yaitu sebanyak 67 orang (13,40%). Disusul oleh kelompok usia 60–64 tahun sebesar 12,40% dan 50–54 tahun sebesar 11,20%. Kelompok usia 35–39 tahun dan 30–34 tahun, masing-masing 10,80% dan 10,60%. Sementara itu, kelompok usia 45–49 tahun mencatatkan angka 9,80%, dan 25–29 tahun sebanyak 9,00%. Adapun kelompok usia yang paling sedikit berpartisipasi dalam survei adalah usia 15–19 tahun, yaitu 29 responden (5,80%), diikuti oleh usia 20–24 tahun sebesar 8,40%, serta 55–59 tahun sebesar 8,60%. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari usia produktif menengah (30–54 tahun).



Gambar 14 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan jenis Kelamin

Data yang diperoleh dari wawancara responden diolah melalui 4 (empat) proses analisis yaitu analisis deskriptif, *crosstab*, korelasi, dan regresi. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum terhadap data yang diperoleh. Analisis *crosstab* dilakukan untuk melihat hubungan antara 2 atau lebih variabel kategorik, membantu mengidentifikasi pola distribusi responden berdasarkan kategori tertentu. Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan linier antara 2 variabel. Analisis regresi/berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh 1

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan indeks dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*) digunakan ketika setiap indikator atau item memiliki bobot yang berbeda sesuai tingkat kepentingannya. Indeks akan diproses dengan menggunakan pembobotan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Pengolahan hasil survei AHP menunjukkan 5 aspek pembentuk opini publik dan bobot kepentingannya Keamanan Produk (46,3%) sebagai aspek paling krusial, Pengawasan & Penindakan (24,29%), Komunikasi Publik (15,7%), Pelayanan Informasi & Pengaduan (8,7%), Sumber Daya BPOM (5,1%).

Hasil survei opini publik terhadap BPOM tahun 2025 menunjukkan bahwa secara nasional tingkat kepercayaan masyarakat berada pada kategori “**Percaya**” dengan nilai **79,20**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai BPOM sebagai lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. Secara detail, indeks opini pada dimensi keamanan produk masuk kategori “Percaya” dengan nilai 78,26; Dimensi Pengawasan dan Penindakan masuk dalam kategori “Percaya” dengan nilai 79,16; Dimensi Pelayanan Informasi dan Pengaduan masuk pada kategori “Percaya” dengan nilai 79,04; Dimensi Komunikasi Publik masuk pada kategori “Sangat Percaya” dengan nilai 81,36; dan dimensi Sumber daya masuk kategori “Sangat Percaya” dengan nilai 81,53.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan dilakukan dengan indikator yang sejenis di K/L lain menggunakan data tahun 2024, karena data tahun 2025 dari K/L lain belum diperoleh pada saat penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 30 Perbandingan Kinerja Indeks Opini Publik dengan K/L Lainnya

No	K/L	Indikator	Realisasi 2024
1	BPOM	Indeks opini publik BPOM	85,19
2	POLRI	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Polri	74
3	KPK	Indeks Integritas Nasional	75

Perbandingan dilakukan terhadap indikator dari POLRI dan KPK karena semua indikator adalah *trust-based indicator* (berbasis persepsi publik), digunakan sebagai dasar kebijakan komunikasi, serta bersifat outcome (bukan output kegiatan). Pada tahun 2024, Indeks Opini Publik BPOM mencapai 85,19, lebih tinggi dibandingkan Indeks Kepercayaan Publik Polri yang berada pada kisaran 74 dan Indeks Integritas KPK sekitar 75. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan relatif tinggi. Capaian tersebut menggambarkan kuatnya upaya perlindungan kesehatan yang dilaksanakan BPOM serta efektivitas komunikasi risiko kepada masyarakat.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Keterbukaan informasi dan respons yang lebih baik terhadap isu publik;
2. Penyampaian informasi melalui berbagai kanal komunikasi;
3. Sinergi dengan pemangku kepentingan turut memperkuat persepsi positif masyarakat.

Meskipun indikator Indeks Opini Publik telah mencapai target, namun masih terdapat kendala/permasalahan sebagai berikut:

Tabel 31 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Indeks Opini Publik

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Adanya persepsi negatif atau penurunan kepercayaan publik terhadap BPOM dan kebijakannya.	1. Monitoring pemberitaan/ isu di media. 2. Meningkatkan publikasi informasi BPOM secara masif. 3. Mengoptimalkan hubungan dengan media.	1. Melakukan monitoring pemberitaan/ isu di media yang berpotensi berdampak pada reputasi BPOM. 2. Menyusun agenda setting dan melibatkan seluruh unit kerja dan UPT.	TW IV	Y	SETTA MA/ REP/....	Terbentuknya persepsi negatif publik terhadap BPOM yang dapat memengaruhi reputasi lembaga

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
		3. Mengoptimalkan hubungan media secara intensif untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi.				

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu Layanan hubungan masyarakat dan informasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

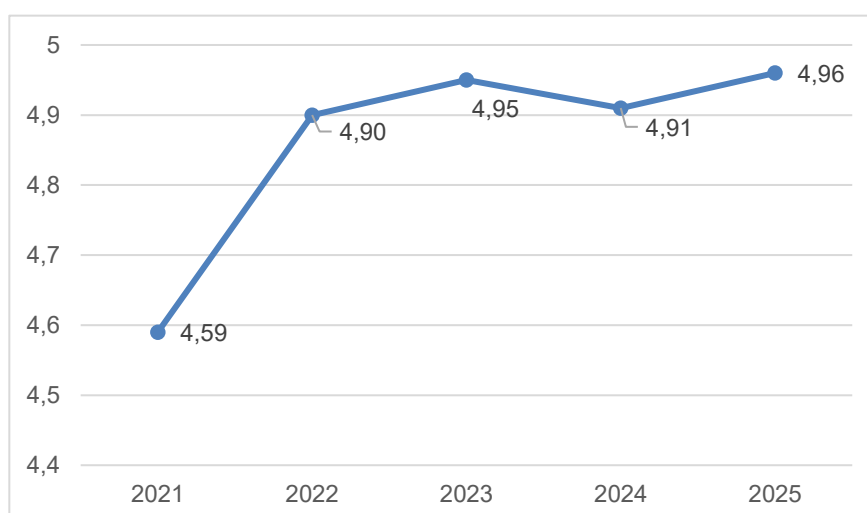
- 1) Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
- 2) Berkolaborasi dengan lintas sektor baik akademisi, influencer, maupun pakar dalam membuat konten kreatif dalam bentuk podcast maupun film agar sebaran informasi di masyarakat menjadi lebih luas sehingga BPOM lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan publikasi informasi publik BPOM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat.

3.3 INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Lingkup Sekretariat Utama	4,90	4,70	4,96	105,53 (Sangat Baik)	101,22 ▲ Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator “Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sekretariat Utama” tahun 2025 adalah 4,96 dari target tahun 2025 sebesar 4,70, sehingga capaian indikator adalah 105,53% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 4,90, maka capaian indikator adalah 101,22% dengan kategori “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target ke depan karena realisasi tahun 2025 telah melebihi target akhir periode Renstra. Indikator ini merupakan lanjutan dari Renstra 2020-2024. Tren capaian indikator tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 15 Tren Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama Tahun 2021-2025

Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode tahun 2020-2023, menurun di tahun 2024, dan meningkat kembali di tahun 2025. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 4,91, maka terdapat peningkatan sebesar 1,02% pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung dengan adanya perbaikan pelaksanaan pelayanan termasuk data dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan evaluasi.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh UPP, dan menjadi salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di BPOM. Penilaian IPP mengacu pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan mencakup pada 6 (enam) aspek dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- b. Profesionalitas SDM (25%);
- c. Sarana Prasarana (18%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- f. Inovasi (12%).

IPP di lingkup Sekretariat Utama BPOM merupakan hasil dari proses evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Sekretariat Utama, yaitu Biro Hukum dan Organisasi sebagai pelaksana layanan pengaduan masyarakat.

Penilaian IPP dilakukan dengan mengukur kinerja pelayanan publik pada setiap aspek sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan secara nasional. Penilaian ini mencakup dimensi kualitas layanan, kecepatan respons, keterbukaan informasi, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Proses PEKPPP di lingkungan Sekretariat Utama dilaksanakan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penyampaian data dukung secara sistematis melalui aplikasi evortala.pom.go.id. Selanjutnya, data dan dokumen tersebut akan diverifikasi dan dinilai oleh Tim Penilai. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

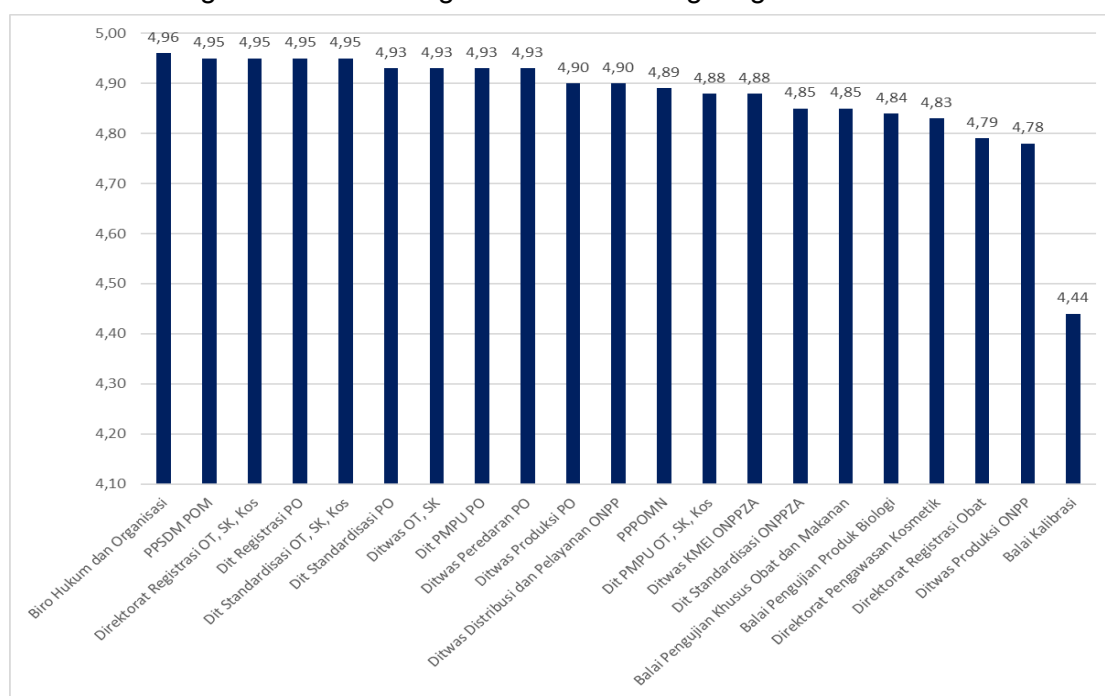
Tabel 32 Kategori Nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh IPP terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. IPP telah disampaikan pada kegiatan *exit meeting* Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM Tahun 2025 pada tanggal 17 September 2025. Dari total 97 UPP yang dilakukan Penilaian PEKPPP, didapatkan perolehan nilai sebagai berikut: 79 UPP kategori Pelayanan Prima, 16 UPP kategori Sangat Baik, 2 UPP kategori Baik. IPP di lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 adalah 4,96 (Kategori A) atau Pelayanan Prima.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan dilakukan dengan UPP lain di lingkungan BPOM.



Gambar 16 Perbandingan IPP Sekretariat Utama dengan Unit Pusat di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IPP Sekretariat Utama yang dilakukan penilaian pada UPP Biro Hukum dan Organisasi, memperoleh indeks peringkat ke-1 yaitu 4,96 (kategori Pelayanan Prima). Rata-rata IPP pada UPP Pusat adalah 4,87 dan IPP BPOM adalah 4,75. Dengan demikian IPP Sekretariat Utama berada di atas rata-rata IPP unit Pusat dan BPOM.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Seluruh petugas layanan menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Dilaksanakan pendampingan secara intensif bersama Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi penilaian PEKPPP Tahun 2024.
3. Dilakukan pemantauan berkala terhadap kinerja layanan pengaduan dan informasi guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

Tabel 33 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai IPP

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Penurunan nilai pada indikator kepuasan pelanggan yang diisikan oleh pengguna layanan yang memengaruhi capaian IPP secara keseluruhan	Peningkatan pemahaman petugas terhadap penerapan standar pelayanan serta regulasi terbaru obat dan makanan	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan/ bimbingan teknis berkala	TW 3 Tahun 2026	Sudah	SETT AMA/SDM/01	Terjadinya penurunan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
	Sosialisasi yang lebih masif terkait Standar	Sosialisasi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	TW 4 Tahun 2026			

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
	Pelayanan yang telah ditetapkan.	melalui berbagai media				

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu Layanan informasi dan pengaduan yang diberikan. Sedangkan output yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja yaitu output lain pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Telah dilakukan reviu dan penetapan atas kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan, yaitu:
 - a. Keputusan Kepala BPOM Nomor 150 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.02.22.03.25.28 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan;
 - c. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.02.22.03.25.29 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Pelayanan Pada *Contact Center* HALOBPOM;
 - d. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.02.02.22.03.25.30 Tahun 2025 tentang Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi

dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.

3. Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
4. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
5. Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.
7. Pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 bersama Tim Pengembangan Pelayanan Publik.
8. Pengembangan aplikasi evortala dalam proses SIT dan UAT untuk digunakan dalam penilaian PEKPPP lingkup BPOM.
9. Pengisian FO2 pada aplikasi evortala dalam pelaksanaan Penilaian PEKPPP.
10. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan secara internal di lingkungan BPOM.

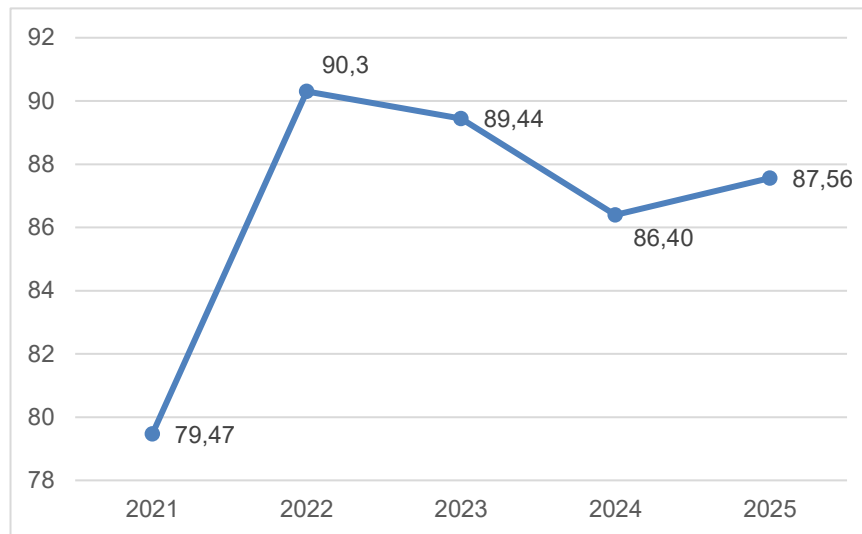
3.4 NILAI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Nilai Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Utama	87,54	86,62	87,56	101,09 (Sangat Baik)	100,02  Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Sekretariat Utama” tahun 2025 adalah 87,56 dari target tahun 2025 sebesar 86,62, sehingga capaian indikator adalah 101,09% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 87,54, maka capaian indikator adalah 100,02% dengan kategori “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target ke depan karena realisasi tahun 2025 telah melebihi target akhir periode Renstra. Indikator ini

merupakan lanjutan dari Renstra 2020-2024. Tren capaian indikator tahun 2021-2025 sebagai berikut:



Gambar 17 Tren Realisasi Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Sekretariat Utama Tahun 2021-2025

Terdapat tren peningkatan nilai pembangunan ZI Sekretariat Utama dalam kurun waktu tahun 2020-2022, namun terjadi penurunan di tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini disebabkan karena terjadi penurunan nilai PMPZI di semua biro. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 86,40, terdapat peningkatan sebesar 1,34% pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung dengan pelaksanaan inovasi pada semua pokja, menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dengan baik, serta melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM

yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan evaluasi ZI yaitu untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Nilai pembangunan ZI Sekretariat Utama tahun 2025 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

Tabel 34 Bobot Komponen Pengungkit Penilaian Satuan kerja/Unit Kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

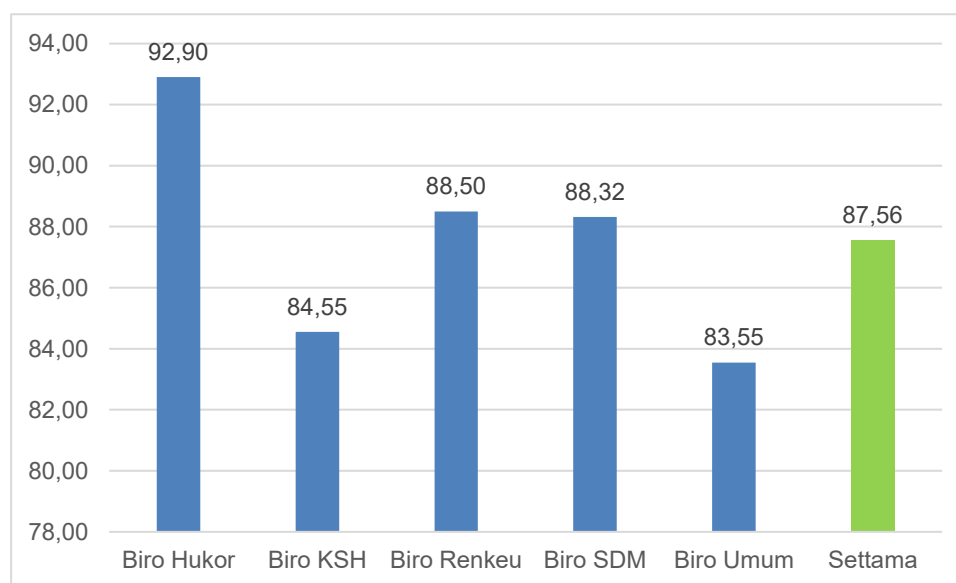
Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

Tabel 35 Rincian Bobot Indikator Hasil Satuan Kerja/Unit Kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/WBBM

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

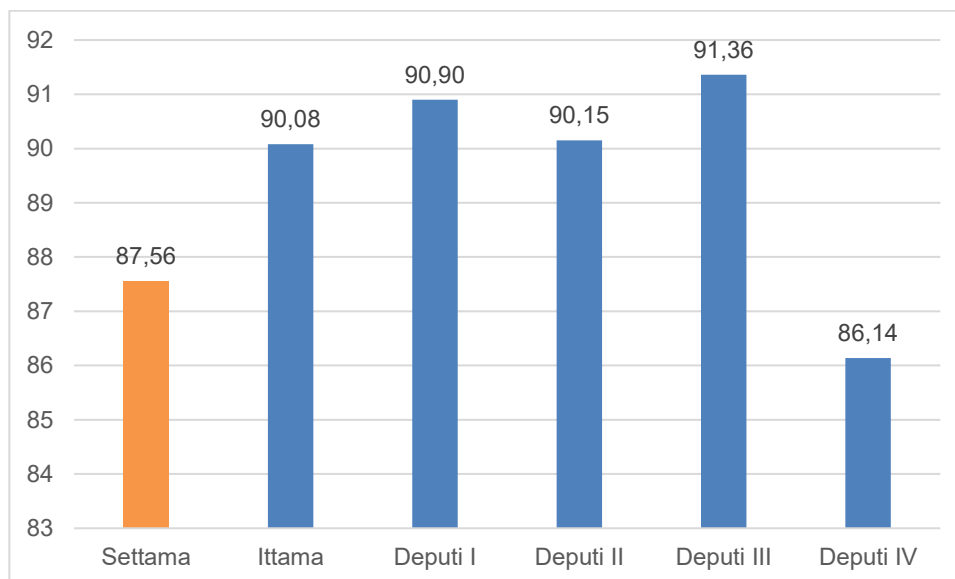
Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama tahun 2025 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama. Realisasi indeks RB Sekretariat Utama tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 18 Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama Tahun 2025

Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi merupakan nilai tertinggi. Capaian ini didukung komitmen pimpinan dan seluruh komponen Biro Hukum dan Organisasi dalam pembangunan ZI dengan berfokus pada perbaikan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi APIP yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi di tahun sebelumnya. Sedangkan nilai pembangunan ZI terendah pada Biro Umum. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang belum terdokumentasikan dengan baik, masih belum terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, masih kurangnya dampak secara langsung dari kegiatan pembangunan Zona Integritas terhadap budaya kerja di lingkungan Biro Umum.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain



Gambar 19 Perbandingan Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama dan Unit Eselon I di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar unit kerja telah mencapai tingkat implementasi yang sangat baik dengan nilai di atas 90. Deputi III memperoleh nilai tertinggi sebesar 91,36 dan dapat menjadi rujukan praktik baik, sedangkan Deputi IV memiliki nilai terendah sebesar 86,14 sehingga masih memerlukan penguatan konsistensi implementasi. Nilai PMPZI Sekretariat Utama lebih rendah dibandingkan Inspektorat Utama, Deputi I, II, III, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi IV. Nilai PMPZI Sekretariat Utama perlu ditingkatkan walaupun bukan *core bussiness* BPOM.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan proses bisnis melalui pemetaan proses bisnis dan penyusunan SOP berbasis risiko. Hal ini mengurangi potensi penyimpangan prosedur dan meningkatkan akuntabilitas proses kerja.
2. Digitalisasi layanan dan transparansi Informasi melalui layanan administrasi berbasis aplikasi. Digitalisasi menurunkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak sesuai ketentuan.

3. Terdapat peningkatan kualitas layanan internal dan kepuasan unit kerja.

Walaupun nilai PMPZI Sekretariat Utama telah mencapai target, namun terdapat beberapa kendala/permasalahan antara lain:

Tabel 36 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai Pembangunan ZI

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik belum melibatkan stakeholder	Melibatkan pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam proses reviu standar pelayanan	Mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menjangkau masukan peningkatan layanan	TW IV 2026	Tidak	-	-
Paramater penilaian pelayanan publik tidak sesuai dengan bisnis proses Biro-Biro sehingga banyak komponen penilaian yang tidak dapat dipenuhi	Melakukan reviu standar pelayanan publik	Melakukan reviu standar pelayanan publik	TW IV 2026	Tidak	-	-
Berdasarkan hasil survei Implementasi Core Value BerAKHLAK, dampak program perubahan belum sepenuhnya bisa dirasakan secara nyata	Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mengakselerasi peningkatan pemahaman core value BerAKHLAK pada unit kerja	Agen Perubahan melakukan survei "Aksi BerAkhlak"	TW IV 2026	Tidak	-	-
Masih terdapat kesenjangan	1. Menyusun perencanaan	1. Menyusun perencanaan				

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural	pengembangan kompetensi yang memadai 2. Melakukan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi	pengembangan kompetensi yang memadai 2. Melakukan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi				

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu Layanan organisasi dan tata kelola internal. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

a. Penataan Tatalaksana

- 1) Tinjau ulang manual sistem manajemen organisasi dengan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi pada BPOM.
- 2) Tinjau Ulang 104 Dokumen SOP Makro BPOM untuk mendukung penerapan sistem manajemen yang terintegrasi.
- 3) Penetapan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.08.25.100 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi
- 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi Tahun 2025, pada tanggal 18 Juni 2025.
- 5) Produksi dan *launching* video pembelajaran e-learning Sistem Manajemen POM Terintegrasi dan Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP.

b. Penataan Sistem Manajemen SDM

- 1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.

- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP per triwulan yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya pada penyusunan SKP periode berikutnya.
- 3) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
- 4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi per triwulan.
- 5) Pemutakhiran data dan pengembangan layanan kepegawaian pada SIASN.
- 6) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural.
- 7) Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen PPPK TA 2025 sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- 8) Reviu perhitungan kebutuhan JF di Lingkungan Badan POM sesuai Renstra Badan POM Tahun 2025 s.d 2029 untuk revisi Keputusan Kepala BPOM tentang Kebutuhan ASN Badan POM Tahun 2020 s.d 2025.
- 9) Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja individu per triwulan tahun 2025.
- 10) Penetapan Suksesor melalui Manajemen Talenta Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.
- 11) Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Siklus Pendek TW III 2025.
- 12) Sosialisasi Perhitungan Kebutuhan JF PFM.
- 13) Sosialisasi SE Terkait Pengelolaan Karier Jabatan Fungsional dan Aplikasi KARFIS.
- 14) Sosialisasi Survey 360 Evaluasi Penempatan Pejabat Manajerial di Lingkungan BPOM.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Rapat Kerja Nasional guna merumuskan Arah Kebijakan Sekretariat Utama tahun 2026.
- 2) Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh pegawai di Sekretariat Utama utamanya tim SAKIP untuk meningkatkan kemampuan terkait SAKIP dan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025.
- 3) Penetapan dokumen Perencanaan Settama tahun 2026 berupa RKT tahun 2026, Rencana Kinerja tahun 2026, DIPA tahun 2026, Renstra Settama tahun 2025-2029.

- 4) Penguatan kelembagaan dan implementasi Pengarusutamaan Gender di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Rapat Evaluasi Internal di Lingkungan Sekretariat Utama.
- 6) Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama 2024.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, serta realiasi pencapaian target kinerja secara berkala, yang kemudian dituangkan ke dalam Laporan Evaluasi Internal Biro-Biro dan Sekretariat Utama.
- 8) Telah disampaikan LK Sekretariat Utama TA 2024 Audited Surat Karorenceu kepada KPPN Jakarta VI sesuai dengan Surat nomor B-KU.05.06.2.21.05.25.1691 tanggal 6 Mei 2025.
- 9) Telah disampaikan LK Sekretariat Utama Semester I Tahun 2025 kepada BPK sesuai surat Kepala BPOM nomor B-KU.05.06.1.2.07.25.263 tanggal 28 Juli 2025.
- 10) Telah disampaikan LK Sekretariat Utama TW III Tahun 2025 Kepada Menteri Keuangan sesuai Surat Kepala BPOM Nomor B-KU.05.06.2.10.25.558 tanggal 28 Oktober 2025.
- 11) Menghadiri pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per triwulan.
- 12) Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra BPOM 2025-2029 tanggal 24-26 Mei 2025 yang dihadiri oleh tim penyusun Renstra Settama dan perwakilan Biro-Biro.
- 13) Mengikuti bimbingan teknis peraturan bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) tanggal 27-28 Mei 2025.
- 14) Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026 tanggal 4-5 Agustus 2025.
- 15) Mengikuti bimbingan teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan POM Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025.
- 16) Mengikuti Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2026 dilaksanakan pada 9–14 Oktober 2025.
- 17) Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 4–5 Desember 2025 di Semarang untuk mengevaluasi kinerja tahun pertama Renstra Settama 2025-2029.

d. Penguatan Pengawasan

- 1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
- 2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama s.d TW IV 2025.
- 3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko.
- 4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
- 5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2025.
- 6) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama s.d TW IV 2025.
- 7) Dokumen penandatanganan pakta integritas.
- 8) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.
- 9) Peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi seluruh pegawai khususnya Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan unit pelaksana teknis BPOM terkait Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Pengumpulan data jumlah pengguna layanan per jenis layanan tahun 2024. SKM BPOM dilakukan terhadap seluruh jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh masing-masing UPP dengan mengacu pada daftar jenis layanan publik BPOM
- 2) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- 3) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- 5) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.

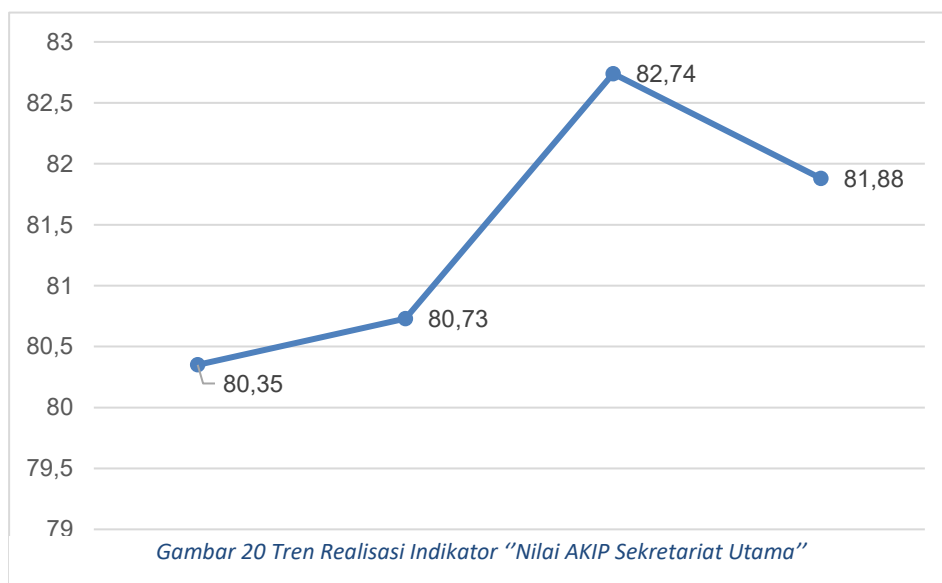
- 6) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 7) Pendampingan UPP dalam pelaksanaan PEKPPP BPOM Tahun 2025.
- 8) Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
- 9) Pelaksanaan Kompetisi Inovasi (KOIN) Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025.

3.5 NILAI AKIP SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,97	83,81	81,88	97,70 (Baik)	95,24 ▲ Akan Tercapai

Realisasi indikator “Nilai AKIP Sekretariat Utama” tahun 2025 adalah 81,88 dari target tahun 2025 sebesar 83,81, sehingga capaian indikator adalah 97,70% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 85,97, maka capaian indikator adalah 95,24% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning). Namun demikian, capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan target akan tercapai di akhir periode Renstra. Indikator ini merupakan lanjutan dari Renstra 2020-2024. Tren capaian indikator tahun 2022-2025 sebagai berikut:



Terdapat tren peningkatan realisasi selama periode 2022-2024, dan menurun di tahun 2025. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 82,74, terdapat peningkatan sebesar -1,04% pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan karena terdapat penurunan nilai pada komponen Capaian Kinerja, karena capaian kinerja tahun 2025 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil reвью LKE oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Evaluasi AKIP oleh TPI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi kriteria: Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,80%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%), dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%).
2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi kriteria: Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,80%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%), Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).
3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi kriteria: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,40%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi

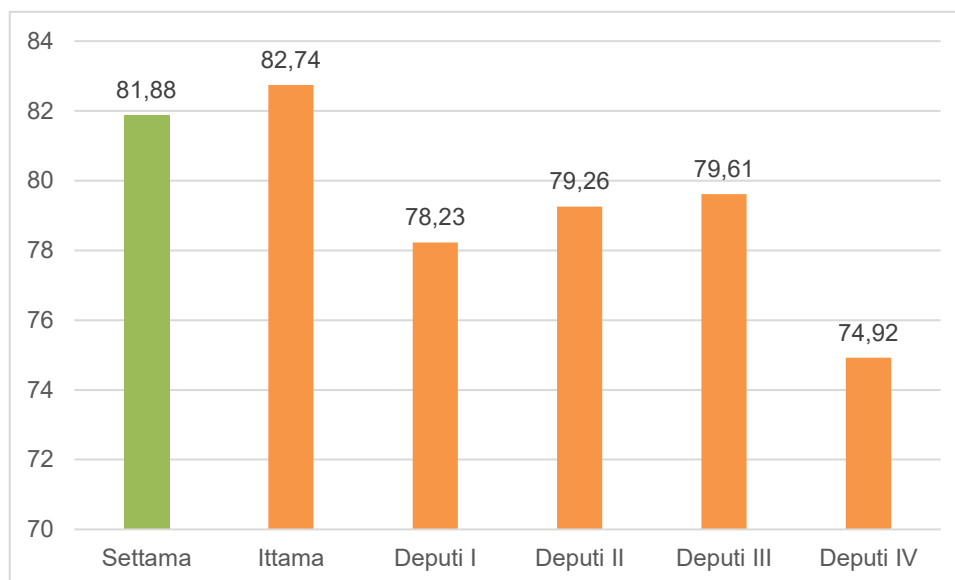
Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,60%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,00%).

4. Evaluasi Internal (20%) meliputi kriteria: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4,00%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6,00%), Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10,00%).
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi kriteria: Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (**Sangat Memuaskan**) dengan nilai >90-100.
2. A (**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90.
3. BB (**Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80.
4. B (**Baik**, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70.
5. CC (**Cukup Memadai**, akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60.
6. C (**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50.
7. D (**Sangat Kurang**, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain



Gambar 21 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2025 Sekretariat Utama dan Eselon I Lain di Lingkungan BPOM

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Inspektorat Utama paling tinggi dibandingkan seluruh unit Eselon I lain di lingkungan BPOM, dimana Sekretariat Utama berada pada peringkat kedua. Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama merupakan unit Eselon I yang mendapatkan predikat A (Memuaskan), dimana unit Eselon I lain mendapatkan kategori BB (Sangat Baik). Sekretariat Utama akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja.

c. Analisis penyebab kegagalan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Nilai AKIP Sekretariat Utama tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan nilai AKIP Sekretariat Utama tahun 2022-2025 berdasarkan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2022-2025

Komponen	Nilai					Selisih
	Bobot	2022	2023	2024	2025	
Perencanaan Kinerja	24	19,68	19,68	20,16	20,16	■
Pengukuran Kinerja	24	19,68	19,68	20,16	20,16	■
Pelaporan Kinerja	12	9,84	9,84	9,48	10,08	↑ 0,60
Evaluasi Internal	20	15,40	16,80	15,80	16,80	↑ 1,00
Capaian Kinerja	20	15,75	14,73	17,21	14,68	↓ -2,53

Komponen	Nilai					Selisih
	Bobot	2022	2023	2024	2025	
		80,35 A	80,73 A	82,81 A	81,88 A	↓ -0,93

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 komponen evaluasi, terdapat peningkatan pada 2 (dua) komponen evaluasi dan penurunan pada 1 (satu) komponen evaluasi. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan pada komponen capaian kinerja yaitu:

1. Indikator kinerja *outcome* (IKSP) tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 45,83%, dimana terdapat 8 (delapan) IK yang tidak mencapai target dari 34 IK pada tahun 2024 (23,53%). Pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) IK yang tidak mencapai target dari 27 IK (18,52%).
2. Indikator kinerja output (RO) tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 26,32%.

Tabel 38 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai AKIP ZI

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Terdapat indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang tidak mencapai target	Melakukan reviu target dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pada masing-masing indikator yang tidak mencapai target	1. melakukan reviu target pada PK tahun 2026 2. memantau pelaksanaan rekomendasi pada seluruh indikator kinerja dan RO utamanya yang tidak mencapai target pada tahun 2025	Februari 2026 Tiap triwulan	Ya	SETTAMA/ OPR/ ...	Penurunan nilai SAKIP Sekretariat Utama

Sekretariat utama juga melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 melalui aplikasi SAPA APIP. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Sekretariat Utama Tahun 2024 dapat dilihat pada tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zH_KSMCCUSNE_MXhObx7tWYBC_RGWg4IVmW1GtFJwIE/edit?gid=103424810#gid=103424810.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Rapat Kerja Nasional guna merumuskan Arah Kebijakan Sekretariat Utama tahun 2026 tanggal 18 – 19 Maret 2025.
- b. Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 pada tanggal 10 – 12 Februari 2025 yang diikuti oleh perwakilan dari Biro-Biro dan Tim SAKIP Settama untuk meningkatkan kemampuan terkait SAKIP dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Settama.
- c. Penetapan dokumen Perencanaan Settama tahun 2026 berupa RKT tahun 2026, Rencana Kinerja tahun 2026, DIPA tahun 2026, Renstra Settama tahun 2025-2029.
- d. Rapat Evaluasi Internal di Lingkungan Sekretariat Utama.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama 2024 dan triwulan I, II, III tahun 2025.
- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, serta realiasi pencapaian target kinerja secara berkala, yang kemudian dituangkan ke dalam Laporan Evaluasi Internal Biro-Biro dan Sekretariat Utama per triwulan.
- g. Telah disampaikan LK Sekretariat Utama TA 2024 Audited Surat Karoreнке kepada KPPN Jakarta VI sesuai dengan Surat nomor B-KU.05.06.2.21.05.25.1691 tanggal 6 Mei 2025.
- h. Telah disampaikan LK Sekretariat Utama Semester I Tahun 2025 kepada BPK sesuai surat Kepala BPOM nomor B-KU.05.06.1.2.07.25.263 tanggal 28 Juli 2025.
- i. Telah disampaikan LK Sekretariat Utama TW III Tahun 2025 Kepada Menteri Keuangan sesuai Surat Kepala BPOM Nomor B-KU.05.06.2.10.25.558 tanggal 28 Oktober 2025.
- j. Menghadiri pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per triwulan.

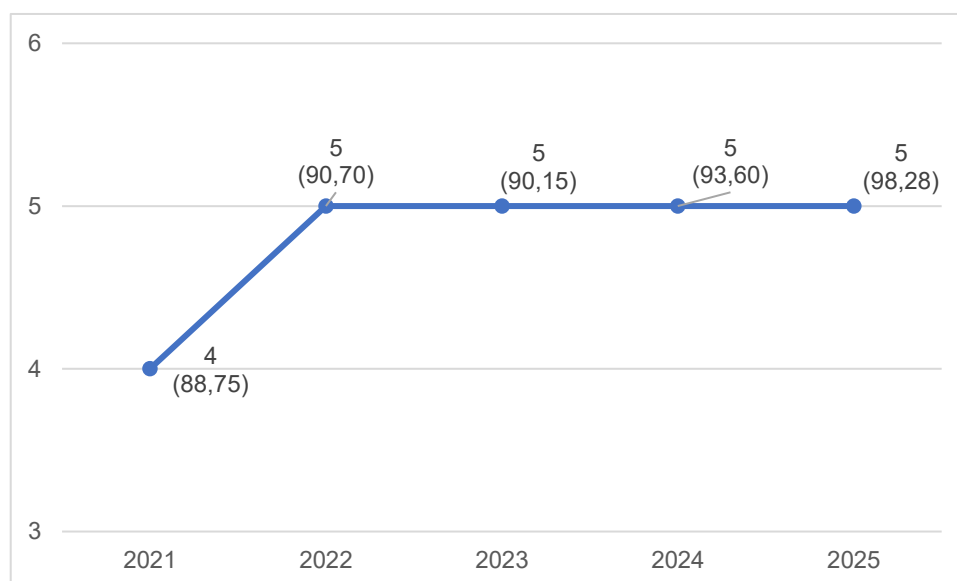
- k. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra BPOM 2025-2029 tanggal 24-26 Mei 2025 yang dihadiri oleh tim penyusun Renstra Settama dan perwakilan Biro-Biro.
- l. Mengikuti bimbingan teknis peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) tanggal 27-28 Mei 2025.
- m. Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026 tanggal 4-5 Agustus 2025.
- n. Mengikuti bimbingan teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan POM Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025.
- o. Mengikuti Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2026 dilaksanakan pada 9–14 Oktober 2025.
- p. Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 4–5 Desember 2025 di Semarang untuk mengevaluasi kinerja tahun pertama Renstra Settama 2025-2029.

3.6 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Utama	5	5	5	100,00	100,00  Tercapai/Melampaui

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Utama” tahun 2025 adalah 5 dari target tahun 2025 sebesar 5, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori “Baik” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 5, maka capaian indikator adalah 100,00% dengan kategori “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari Renstra 2020-2024. Namun, target pada Renstra 2020-2024 menggunakan nilai, sedangkan pada Renstra 2025-2029 menggunakan konversi nilai. Tren capaian indikator tahun 2021-2025 menggunakan katgeori nilai sebagai berikut:



Gambar 22 Tren Realisasi Indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”

Terdapat tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2025. Target ditetapkan sama setiap tahun yaitu NKA dengan kategori “Sangat Baik” (nilai 5). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran direncanakan dengan tepat, dilaksanakan dengan baik, dan benar-benar menghasilkan kinerja yang sejalan dengan target organisasi.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (EKA). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, komponen NKA yaitu nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA (bobot 50%) dan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (bobot 50%). Untuk nilai EKA Unit Eselon I, dihitung berdasarkan nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung menggunakan indikator “Agregasi Capaian RO Satker” (45%) dan “Capaian Indikator Kinerja Program (IKP)” (30%). Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator agregasi nilai efisiensi satker dengan indikator “Penggunaan SBK” (10%) dan “Efisiensi SBK” (15%).

Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), IKPA meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian

Tagihan (10%), Pengeloan UP dan TUP (10%), dan Capaian Output (25%). Dispensasi SPM dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

Kategori nilai NKA sebagai berikut:

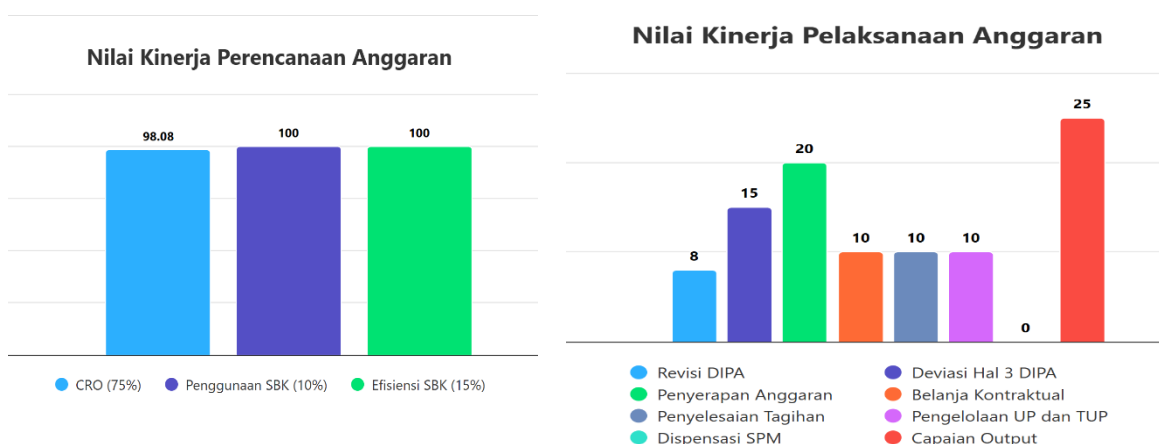
Tabel 39 Kategori nilai NKA

Nilai	Kategori	Konversi
0 – <50	Sangat Kurang	1
50 – <60	Kurang	2
60 – <80	Cukup	3
80 – <90	Baik	4
90 – 100	Sangat Baik	5

Perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran} &= (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%) \\
 &= (98,56 \times 50\%) + (98,00 \times 50\%) \\
 &= 98,28
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data per 20 Februari 2025 dari aplikasi Monev Kemenkeu, diperoleh Nilai EKA adalah 98,56 dan nilai IKPA adalah 98,00, sehingga didapat nilai kinerja anggaran tahun 2025 adalah 98,28 (kategori Sangat Baik).

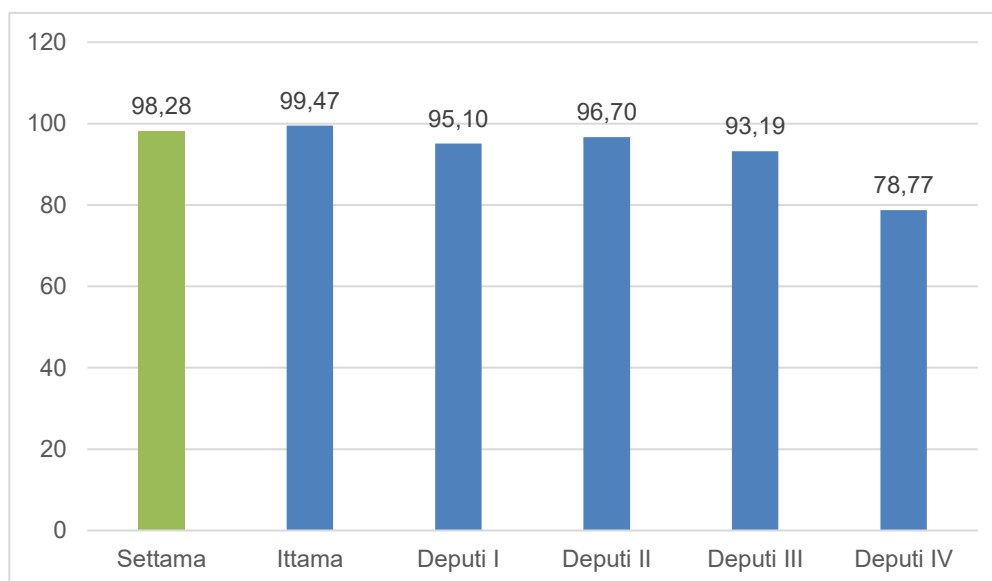


Gambar 23 Rincian NKA Sekretariat Utama Tahun 2025 per Indikator Pembentuk

Terdapat penurunan NKA tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 karena:

1. penambahan jumlah revisi DIPA untuk penambahan belanja pegawai dan pembukaan blokir anggaran berdasarkan Inpres 1/2025.
2. terdapat beberapa RO dan IKSP yang tidak mencapai target karena efisiensi anggaran.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain



Gambar 24 Perbandingan NKA Sekretariat Utama dengan Unit Eselon I di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa NKA Sekretariat Utama berada pada peringkat kedua setelah Inspektorat Utama dengan nilai 5. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran di Sekretariat Utama telah berkinerja Sangat Baik. Sedangkan unit Eselon I dengan NKA terendah yaitu satker Deputi IV dengan kategori Cukup (nilai 3).

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan monev secara berkala untuk memastikan pencapaian IKP dan target RO, terutama RO SBKU.
2. Menjadikan Halaman III DIPA (RPD) sebagai alat kendali KPA untuk melakukan monitoring ketercapaian pelaksanaan dan output program/kegiatan.
3. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan segera mengatasi kendala tersebut serta memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Meskipun indikator Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama telah mencapai target, namun masih terdapat kendala/permasalahan sebagai berikut:

Tabel 40 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai Kinerja Anggaran

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Terdapat penurunan nilai kinerja perencanaan anggaran karena terdapat IKSP dan RO yang tidak mencapai target	1. Melakukan monev realisasi RO dan IKSP secara berkala 2. Melakukan realokasi anggaran untuk RO dan IKSP yang berpotensi tidak tercapai di akhir tahun 3. Melakukan reviu target	1. Melakukan monev realisasi RO dan IKSP secara berkala 2. Melakukan realokasi anggaran untuk RO dan IKSP yang berpotensi tidak tercapai di akhir tahun 3. Melakukan reviu target	Per triwulan	Ya	SETTA MA/ OPR/...	Penurunan nilai kinerja perencanaan anggaran anggarannya Settama
Meskipun tetap berada pada kategori sangat	Penjadwalan dan pembatasan	Membuat surat	TW I TA 2026	Y	SETTA MA/ OPR/...	Penurunan nilai IKPA

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
baik (> 95), nilai IKPA Settama TA 2025 (sebesar 98,00) mengalami penurunan 0,38 poin dibandingkan nilai IKPA TA 2024 (sebesar 98,38). Hal ini disebabkan adanya penurunan pada indikator revisi yang disebabkan adanya peningkatan frekuensi revisi DIPA Satker Settama. Sesuai ketentuan penilaian IKPA dalam Perdirjen 5/PB/2024, revisi dibatasi hanya maksimal 2 kali dalam 1 semester.	revisi DIPA hanya sesuai jadwal	penjadwalan revisi DIPA				Satker Settama

a. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu Layanan organisasi dan tata kelola internal. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik setiap triwulan bersama Kementerian Keuangan dan seluruh unit kerja termasuk biro di lingkungan Sekretariat Utama.
- Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi IKPA BPOM kepada seluruh Kepala Satker di lingkungan BPOM serta hasil monitoring IKPA Settama kepada seluruh Biro secara berkala triwulanan.
- Sosialisasi kebijakan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan terkait penilaian IKPA dan pelaksanaan anggaran terkini agar unit kerja dapat memahami risiko yang harus dikendalikan.

- d. Koordinasi pejabat perbendaharaan Satker Settama dalam hal pelaksanaan anggaran (pengelolaan UP/TUP, proses pencairan tagihan, dan implementasi Langkah-Langkah Akhir Tahun).
- e. Memastikan seluruh biro telah menginput target RO pada aplikasi SAKTI.
- f. Memastikan seluruh RO dengan kriteria SBKU telah di-tagging pada e-monev kemenkeu.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaporan capaian RO Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada e-monev kemenkeu.
- h. Monev capaian sasaran program per triwulan.

3.7 INDEKS MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT UTAMA

a. Perbandingan kinerja

No	Indikator	2029	Capaian 2025			Capaian Terhadap Target 2029
		T	T	R	%	
1	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	3,23	2,91	2,94	100,96 (Sangat Baik)	90,96  Akan Tercapai

Realisasi indikator “Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama” tahun 2025 adalah 2,94 dari target tahun 2025 sebesar 2,91, sehingga capaian indikator adalah 100,96% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 3,23, maka capaian indikator adalah 90,96% dengan kategori “Akan Tercapai” (Kuning). Namun demikian, capaian ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan target akan tercapai di akhir periode Renstra. Indikator ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas

penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko Sekretariat Utama adalah 2,94 atau berada dalam kategori *Risk Aware* atau Sadar Risiko. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Utama telah mendefinisikan risiko namun masih dengan cara yang berbeda-beda dengan kedisiplinan dan proses yang belum sesuai standar. Proses manajemen risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif, disamping itu komitmen dan pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap implementasi risiko juga masih rendah.

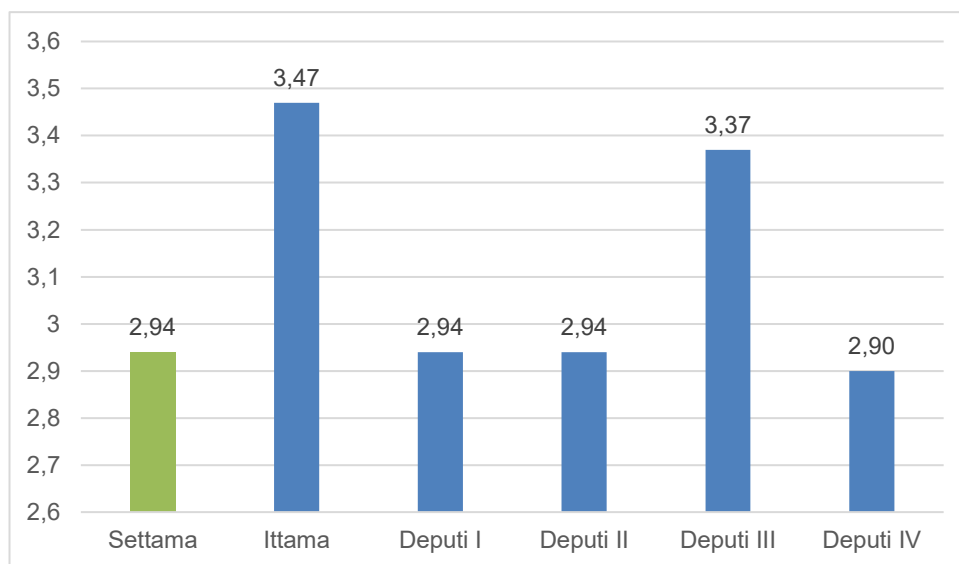
Tabel 41 Kategori Nilai Maturitas Manajemen Risiko

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Nilai maturitas manajemen risiko Sekretariat Utama adalah 2,94. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik serta mulai diimplementasikan secara sistematis dalam proses kerja, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan

keputusan dan budaya organisasi sehingga masih memerlukan penguatan konsistensi implementasi dan pemanfaatan hasil analisis risiko.

b. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain



Gambar 25 Perbandingan Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama dengan unit Eselon I di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama masih dibawah rata-rata Indeks Manajemen Risiko Eselon I yang mencapai 3,094 (Risk Defined). Sekretariat Utama berada pada peringkat ketiga (bersama Deputi 1 dan Deputi 2) dibawah Inspektorat Utama dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dan pegawai masih perlu ditingkatkan dan proses manajemen risiko masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar. Sebagai Unit Organisasi yang memiliki tugas untuk meningkatkan sadar risiko organisasi, maka Sekretariat Utama perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa berada pada level 3 Risiko Ditetapkan (*Risk Defined*). Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Sekretariat Utama perlu meninjau kembali proses manajemen risiko agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko;
2. Sekretariat Utama perlu melakukan pengujian aktivitas pengendalian (*existing control*) dan merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dengan existing control bagi risiko residual yang berada level diatas selera risiko; dan

3. Menjalankan konsep dua lini dalam proses manajemen risiko dengan melibatkan Auditor Internal dalam reviu dan pemantauan risiko.

c. Analisis pendukung keberhasilan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Pimpinan mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja. Manajemen risiko telah masuk dalam agenda perencanaan, monitoring kinerja, dan evaluasi kegiatan.
2. Identifikasi dan pemetaan risiko dilakukan pada kegiatan strategis dan operasional.
3. Risiko telah dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja. Manajemen risiko mendukung pencegahan kegagalan pencapaian target kinerja.

Ke depan, diperlukan penguatan pemanfaatan hasil analisis risiko dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas monitoring mitigasi, pengembangan budaya sadar risiko, serta optimalisasi sistem informasi agar maturitas manajemen risiko meningkat menuju level terukur dan terkelola secara menyeluruh.

Sekretariat Utama mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,91 dengan capaian 2,94 (101,03%) yang didukung oleh penyusunan manajemen risiko Semester I dan Semester II dan pelaporan tepat waktu melalui SAPA APIP. Namun demikian masih terdapat kendala dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Sekretariat Utama periode berikutnya sebagai berikut:

Tabel 42 Matriks Kendala, Rekomendasi, dan RTL Nilai Indeks Manajemen Risiko

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
Belum optimalnya koordinasi Tim SPI di lingkup Sekretariat Utama	Pembentukan dan optimalisasi Tim SPI di lingkup Sekretariat	a. Penataan Tim SPI (MR dan AI) dan penunjukkan koordinator	TW I 2026	Y	SETTAMA/OPR/ 07	Proses manajemen risiko tidak sesuai Juklak

Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	RTL	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa risiko
	Utama dan pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai Juklak	b. Proses Manajemen risiko sesuai Juklak c. Pelibatan Sekretaris Utama dalam pengelolaan risiko kinerja d. Peningkatan kompetensi manajemen risiko pegawai				

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Output utama yang menunjang pencapaian indikator yaitu Layanan organisasi dan tata kelola internal. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan Manajemen Risiko BPOM dan Sekretariat Utama semester I 2025 bersama Sekretaris Utama dan Kepala Biro-Biro serta melakukan pelaporan ke Inspektorat melalui SAPA APIP bulan Maret 2025.
2. Pembahasan Lanjutan Manajemen Risiko Semester I 2025 terkait pemetaan risiko positif di Lingkup Sekretariat Utama bersama Sekretaris Utama dan Tim Manajemen Risiko Kesettamaan pada bulan April 2025.
3. Pembahasan Manajemen Risiko Semester II 2025 di lingkup Sekretariat Utama pada bulan Agustus 2025.
4. Pemantauan pengelolaan risiko Sekretariat Utama Semester II 2025 pada bulan September 2025.

III.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Telah dilakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2025 dapat diakses melalui tautan berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HYf4DT1WZX9kZnsS4K4Z2tu13cFjA9Jmjnv_bg_nB0/edit?gid=421297577#gid=421297577

III.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi selama periode Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, masih ditemukan beberapa kendala diantaranya masih terdapat indikator kinerja yang berulang pada level BPOM dan Sekretariat Utama. Hal ini menunjukkan bahwa *cascading* kinerja BPOM belum ideal. Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Perencanaan Kinerja disusun berbasis *Logical Framework*. Renstra harus disusun secara sistematis dengan hubungan sebab-akibat yang jelas dari input sampai *impact*, berorientasi pada *outcome*, memiliki indikator terukur, dan dapat diturunkan secara konsisten sampai level unit kerja, dan terlihat keterkaitan kinerja dan kebutuhan anggaran.

Sekretariat Utama telah menyusun Renstra 2025-2029 berbasis hasil, dimana terlihat keterkaitan logis antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran kegiatan. Dengan demikian, terdapat beberapa indikator kinerja baru di Renstra 2025-2029 yang belum memiliki baseline data. Hal ini menjadi tantangan dalam penetapan target, sehingga terdapat 1 (satu) IKSP yang tercapai jauh melebihi target yaitu "Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif". Kinerja tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penetapan target pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2026.

Realisasi indikator "Persentase Kerja Sama yang Efektif" mencapai 90,66% dari target 90,50% dengan capaian 100,18%. Informasi ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi praktik kerja sama yang memberikan kontribusi nyata terhadap tugas dan fungsi BPOM, serta menjadi dasar penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut kerja sama dan peningkatan peran aktif unit kerja.

Realisasi indikator "Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif" sebesar 96,05% melampaui target 86,00% (capaian 111,69%). Informasi ini menjadi dasar untuk mempertahankan model koordinasi dan pembinaan UPT yang telah efektif, sekaligus menyusun strategi replikasi praktik baik ke wilayah dengan karakteristik berbeda.

Dalam aspek tata kelola, "Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama" mencapai 4,96 dari target 4,70 (105,53%). Data ini dimanfaatkan untuk memperkuat standar layanan, mempercepat digitalisasi layanan, serta meningkatkan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat.

Untuk “Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama”, realisasi 34,27 dari target 33,80 (101,39%) menunjukkan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi integratif atas komponen pendukung seperti Nilai SAKIP, IPPN, IKPA, tingkat digitalisasi arsip, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta opini BPK, sehingga pembenahan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar biro.

Capaian “Indeks Opini Publik” sebesar 79,20 dari target 78,25 (101,21%) dimanfaatkan sebagai dasar penguatan strategi komunikasi publik dan peningkatan kualitas diseminasi informasi, khususnya dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap kinerja BPOM.

Pada pembangunan Zona Integritas, nilai 87,56 dari target 86,62 (101,09%) menunjukkan komitmen peningkatan integritas dan kualitas layanan. Unit kerja dengan kinerja kurang optimal, dapat digunakan untuk *benchmarking* internal dan pembinaan unit dengan capaian relatif lebih rendah agar terjadi pemerataan kualitas tata kelola.

Pada “Nilai AKIP Sekretariat Utama”, realisasi sebesar 81,88 belum mencapai target 83,81 (97,70%). Informasi ini dimanfaatkan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, penajaman indikator outcome, konsistensi cascading kinerja, serta penguatan pemanfaatan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan hasil optimal (nilai EKA 98,56 dan IKPA 98,00). Informasi ini digunakan untuk memastikan kesinambungan praktik penganggaran berbasis kinerja dan menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

Terakhir, “Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama” mencapai 2,94 dari target 2,91 (101,03%). Data ini dimanfaatkan untuk memperkuat budaya manajemen risiko, meningkatkan kualitas identifikasi risiko strategis, serta memastikan mitigasi risiko terintegrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Ke depan, optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja akan diarahkan pada penguatan analisis tren, integrasi sistem informasi kinerja, serta peningkatan kualitas indikator outcome agar nilai AKIP dan reformasi birokrasi dapat meningkat secara berkelanjutan.

III.4. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.1.432731/2025, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2025 adalah Rp674.848.879.000,00. Berdasarkan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-170/AG/AG.4/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 BPOM TA 2025, Sekretraiat Utama mendapatkan tambahan pagu sejumlah Rp4.635.218.000,00 untuk pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN, sehingga total pagu Sekretariat Utama Tahun 2025 menjadi Rp679.484.097.000,00.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, terdapat blokir anggaran pada satker Sekretariat Utama sejumlah Rp91.403.553.000,00 sehingga total pagu Sekretariat Utama dikurangi blokir adalah Rp588.080.544.000,00. Terdapat beberapa revisi anggaran yang berdampak terhadap total pagu Settama sebagai berikut:

- a. Surat Dirjen Anggaran Nomor S-353/AG/AG.4/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang pengesahan Revisi 5 DIPA BPOM: Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Belanja K/L, terdapat relaksasi blokir sejumlah Rp101.711.093.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, pemenuhan belanja operasional, diklatsar, dan perjalanan dinas penempatan CASN sehingga total pagu Settama menjadi Rp689.791.637.000,00.
- b. Surat Dirjen Anggaran Nomor S-397/AG/AG.4/2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Pengesahan Revisi VI Pergeseran Anggaran Satker Lingkup BPOM TA 2025, terdapat pergeseran pagu Settama untuk satker lain di BPOM sebesar

Rp1.818.250.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan belanja operasional, pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat, pelaksanaan *on-site evaluation* WLA, pengadaan reagensia, suku cadang, dan bahan fungsional, serta penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga pagu Settama menjadi Rp687.973.387.000,00.

- c. Surat Dirjen Anggaran Nomor S-566/AG/AG.4/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pengesahan Revisi IX pada BPOM TA 2025, terdapat pergeseran pagu Settama untuk satker lain di BPOM sebesar Rp786.390.000,00 yang digunakan untuk pemenuhan belanja operasional (002), penyelesaian perkara/penyidikan obat dan makanan, penyusunan standar, dan pengujian khusus sehingga pagu Settama menjadi Rp687.186.997.000,00

Berdasarkan aplikasi OMSPAN, pada tahun 2025 telah direalisasikan sejumlah Rp681.388.241.329,00 atau 99,16% terhadap pagu Rp687.186.997.000,00. Rincian realisasi per program dan per sasaran program dengan pagu dikurangi blokir sebagai berikut:

Tabel 43 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2025

Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Program Dukungan Manajemen	687.186.997.000	681.388.241.329	99,16
1. Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	2.284.947.000	2.281.494.697	99,85
1.1. Persentase Kerja Sama yang Efektif	2.284.947.000	2.281.494.697	99,85
2. Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	135.371.000	135.368.716	100,00
2.1. Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	135.371.000	135.368.716	100,00
3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dan layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	684.766.679.000	678.971.377.916	99,15
3.1. Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	681.625.643.000	675.833.389.564	99,15

Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Pagu Dikurangi Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.2. Indeks Opini Publik	1.255.554.000	1.255.530.290	100,00
3.3. Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	423.534.000	423.528.256	100,00
3.4. Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	284.401.160	282.497.498	99,33
3.5. Nilai AKIP Sekretariat Utama	147.911.420	147.720.188	99,87
3.6. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	885.171.300	884.764.616	99,95
3.7. Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	144.464.120	143.947.505	99,64

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program **“Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dan layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama”** yaitu sebesar 99,65%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal, dan pemeliharaan).

Tabel 44 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Sekretariat Utama Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target RO	Realisasi RO	% Capaian RO	Pagu Dikurangi Blokir	Realisasi	% Realisasi Anggaran
	WA Program Dukungan Manajemen	-	-	-	687.186.997.000	681.388.241.329	99,16%
1	3158 Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	-	-	-	3.555.790.000	3.551.057.278	99,87%
a	AEC.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	70	70	100,00%	2.028.158.000	2.024.821.855	99,84%
b	EBA.958 Layanan hubungan masyarakat dan informasi	16	16	100,00%	1.255.554.000	1.255.530.290	100,00%
c	EBA.960 Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	1	100,00%	133.195.000	131.912.366	99,04%
d	PEC.002 Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST)	1	1	100,00%	138.883.000	138.792.767	99,94%
2	3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	-	-	-	3.143.956.000	3.141.838.800	99,93%
a	EBA.960 Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	1	100,00%	462.927.000	461.182.575	99,62%

No.	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target RO	Realisasi RO	% Capaian RO	Pagu Dikurangi Blokir	Realisasi	% Realisasi Anggaran
b	EBD.952 Layanan perencanaan dan penganggaran	15	15	100,00%	1.503.566.000	1.503.358.655	99,99%
.c	EBD.953 Layanan pemantauan dan evaluasi	13	13	100,00%	527.556.000	527.483.127	99,99%
d	EBD.955 Layanan manajemen keuangan	9	9	100,00%	649.907.000	649.814.443	99,99%
3	4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Advokasi Hukum. serta Organisasi dan Tata Laksana	-	-	-	2.509.343.000	2.509.257.058	100,00%
a	AAH.001 Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	142	142	100,00%	283.887.000	283.885.605	100,00%
b	ABL.001 Rekomendasi kebijakan Reformasi Birokrasi	2	2	100,00%	56.954.000	56.948.733	99,99%
c	ABM.001 Rekomendasi kebijakan pelayanan publik	5	5	100,00%	151.960.000	151.958.268	100,00%
d	BIC.001 UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	3	3	100,00%	135.371.000	135.368.716	100,00%
e	BMB.001 Layanan informasi dan pengaduan yang diberikan	4	2	50,42%	423.534.000	423.528.256	100,00%
f	EBA.960 Layanan organisasi dan tata kelola internal	9	9	100,00%	797.619.000	797.550.287	99,99%

No.	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target RO	Realisasi RO	% Capaian RO	Pagu Dikurangi Blokir	Realisasi	% Realisasi Anggaran
g	EBA.969 Layanan bantuan hukum	200	207	103,50%	660.018.000	660.017.193	100,00%
4	4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	-	-	-	2.021.064.000	2.021.038.010	100,00%
a	ABQ.001 Kebijakan Transformasi Manajemen ASN	4	4	100,00%	185.565.000	185.561.159	100,00%
b	EBA.960 Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	1	100,00%	491.199.000	491.190.570	100,00%
c	EBC.954 Layanan manajemen SDM	4.116	4.615	112,12%	1.344.300.000	1.344.286.281	100,00%
5	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	-	-	-	675.956.844.000	670.165.050.183	99,14%
a	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	63	63	100,00%	944.000.000	943.950.722	99,99%
b	EBA.956 Layanan BMN	1	1	100,00%	14.381.000	14.379.800	99,99%
c	EBA.959 Layanan protokoler	1	1	100,00%	4.318.017.000	4.318.008.854	100,00%
d	EBA.960 Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	1	100,00%	27.550.000	27.550.000	100,00%
e	EBA.962 Layanan umum	1	1	100,00%	3.575.232.000	3.572.877.161	99,93%

No.	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target RO	Realisasi RO	% Capaian RO	Pagu Dikurangi Blokir	Realisasi	% Realisasi Anggaran
f	EBA.994 Layanan perkantoran	1	1	100,00%	662.608.093.000	656.818.770.353	99,13%
g	EBB.951 Layanan sarana internal	66	66	100,00%	1.116.054.000	1.116.017.943	100,00%
h	EBB.971 Layanan prasarana Internal	8	8	100,00%	3.353.517.000	3.353.495.350	100,00%

Berdasarkan realisasi Rincian Output (RO) tahun 2025 pada tabel 45 diketahui bahwa dari 26 (dua puluh enam) RO di Sekretariat Utama, terdapat 2 (dua) RO yang tercapai lebih dari 100% yaitu “Layanan Bantuan Hukum” dan “Layanan manajemen SDM” dan 1 RO yang tidak mencapai target yaitu “Layanan Informasi dan pengaduan yang Diberikan” karena adanya efisiensi anggaran. RO dengan kontribusi besar pada capaian Sasaran Program (SP) 1 adalah Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan dengan total anggaran (dikurangi blokir dan belanja pegawai) sebesar Rp2.028.158.000,00 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 99,84%. Ditinjau dari kinerja, telah direalisasikan 70 dokumen dari target 70 (100,00%). Capaian SP 2 didukung oleh RO UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif dengan total anggaran (dikurangi blokir dan belanja pegawai) sebesar Rp135.371.000,00 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 100,00%. Ditinjau dari kinerja, telah direalisasikan 3 laporan dari target 3 (100,00%). Capaian SP 3 didukung oleh seluruh RO lainnya.

Upaya yang telah dilakukan agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2025 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
 - b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

II. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Output merupakan perbandingan realisasi IKSP per Sasaran Program dengan target IKSP per Sasaran Program. Input merupakan perbandingan realisasi anggaran per Sasaran Program dengan pagu anggaran per Sasaran Program.

Efisiensi suatu program diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Gambar 26 Range Capaian Indikator Tingkat Efisiensi

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 45 Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	INPUT	IE	TE	CAPAI AN	KATEGO RI
1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	100,18	99,85	1,00	0,00	100%	Efisien
1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	100,18	99,85	1,00	0,00	100%	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	111,69	100,00	1,12	0,12	100%	Efisien
2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	111,69	100,00	1,12	0,12	100%	Efisien
3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dan layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	101,14	99,15	1,02	0,02	100%	Efisien
3.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	101,39	99,15	1,02	0,02	100%	Efisien
3.2	Indeks Opini Publik	101,21	100,00	1,01	0,01	100%	Efisien
3.3	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	105,53	100,00	1,06	0,06	100%	Efisien

No	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	INPUT	IE	TE	CAPAI AN	KATEGO RI
3.4	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	101,09	99,33	1,02	0,02	100%	Efisien
3.5	Nilai AKIP Sekretariat Utama	97,70	99,87	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien
3.6	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	100,00	99,95	1,00	0,00	100%	Efisien
3.7	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	101,03	99,64	1,01	0,01	100%	Efisien
Total		102,19	99,16	1,03	0,03	100%	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi, sampai dengan akhir tahun 2025 dari 3 (tiga) sasaran program di Sekretariat Utama, seluruh sasaran program mendapatkan kategori “Efisien”. Secara total, Sekretariat Utama mendapatkan capaian 100% dengan kategori “Efisien”. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, dimana sebagian besar IK mencapai dan/atau melebihi target kinerja yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Capaian output (realisasi kinerja) 102,19% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 99,16% menunjukkan **efisiennya** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,03 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,03.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap efisiensi anggaran antara lain adalah optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan asistensi yang dilakukan secara daring telah mengurangi biaya operasional, seperti akomodasi dan transportasi, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya. Selain itu, pemanfaatan *e-office* dalam penyelenggaraan administrasi dan kegiatan kantor juga berkontribusi dalam efisiensi anggaran dengan mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen serta biaya dokumentasi.

Sekretariat Utama juga menerapkan kebijakan efisiensi lainnya, seperti pembatasan kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat urgensinya. Hal ini membantu mengalokasikan anggaran hanya untuk kegiatan yang benar-benar

berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran program. Lebih lanjut, optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan yang telah mencapai outputnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satker lain di lingkungan BPOM melalui revisi DIPA antara lain untuk pemenuhan belanja operasional (002) UPT, kegiatan penyidikan Obat dan Makanan, penyusunan standar Obat dan Makanan, dll.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada IKSP 3.5 mendapatkan kategori “Tidak Efisien”. Hal ini disebabkan IKSP tidak mencapai target yang ditetapkan. Anggaran terealisasi secara optimal karena Sekretariat Utama telah berupaya secara maksimal dalam pemanfaatan sumber daya.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 sebagai berikut:

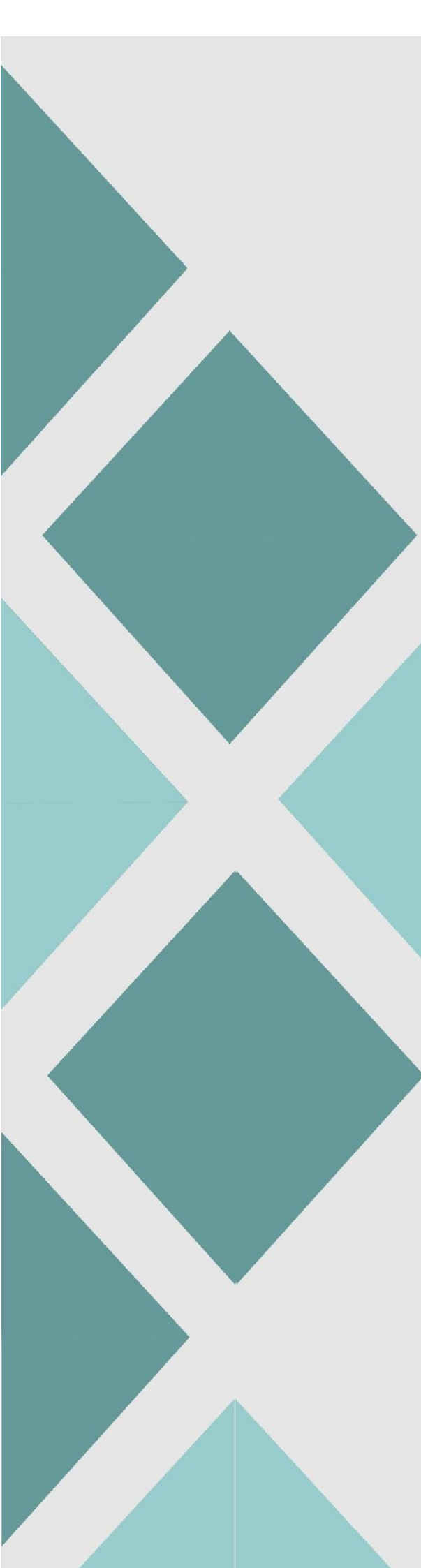
1. Sekretariat Utama memiliki 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (sembilan) IKSP. Dari 9 (sembilan) IKSP, terdapat 6 (enam) IKSP dengan kategori "Sangat Baik", 2 (dua) IKSP dengan kategori "Baik", dan 1 IKSP dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".
2. Dari 2 (dua) IKSP dengan kategori "Baik", terdapat 1 (satu) IKSP yang tidak mencapai target yaitu Nilai AKIP Sekretariat Utama.
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 adalah 102,01 dengan kategori "Istimewa" (Biru).
4. Dari 26 (dua puluh enam) RO di Sekretariat Utama, terdapat 2 (dua) RO yang tercapai lebih dari 100%, 23 (dua puluh tiga) RO tercapai 100%, dan 1 RO yang tidak mencapai target
5. Realisasi anggaran Sekretariat Utama tahun 2025 adalah Rp687.186.997.000,00 atau 99,16% terhadap pagu dikurangi blokir sebesar Rp687.186.997.000,00.
6. Tingkat Efisiensi (TE) Sekretariat Utama tahun 2025 adalah 0,03 (capaian 100%) dengan kategori "Efisien".

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, kinerja Sekretariat Utama secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kehadiran/ perwakilan BPOM di forum internasional dan kerja sama bilateral.
3. Melakukan evaluasi target tahun 2026 dengan prinsip SMART-C.

4. Monitoring pemberitaan/isu di media.
5. Meningkatkan publikasi informasi BPOM secara masif.
6. Mengoptimalkan hubungan dengan media.
7. Peningkatan pemahaman petugas terhadap penerapan standar pelayanan serta regulasi terbaru obat dan makanan
8. Sosialisasi yang lebih masif terkait Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
9. Melibatkan pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam proses reviu standar pelayanan
10. Melakukan reviu standar pelayanan publik
11. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mengakselerasi peningkatan pemahaman core value BerAKHLAK pada unit kerja
12. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang memadai
13. Melakukan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi
14. Melakukan reviu target dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pada masing-masing indikator yang tidak mencapai target
15. Penjadwalan dan pembatasan revisi DIPA hanya sesuai jadwal
16. Pembentukan dan optimalisasi Tim SPI di lingkup Sekretariat Utama dan pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai Juklak



LAMPIRAN

Lampiran 1 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025-2029

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen						
SP 1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM					
1.1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5	91	91,5	92	92,5
SP 2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
2.1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61	82	87	91	100
SP 3	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima					
3.1	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SP 4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama					
4.1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	31,69	31,77	31,88	31,99	32,04
4.2	Indeks Opini Publik	85,15	85,2	85,25	85,3	85,35
4.3	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	91,09	91,18	91,27	91,36	91,45
4.4	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81,77	82,80	83,83	84,85	85,88
4.5	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,58	91,84	92,05	92,26	92,53
4.6	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	3,4	3,7	4	4,2	4,3
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana						
Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima						
1	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,63	99,64	99,65	99,66	96,67
2	Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
3	Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4	4	4	4
RO 1: Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan		4	4	4	4	4
Meningkatnya Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	55	66	76	87	96
RO 1: UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif		3	3	3	3	3
Tersedianya Kebijakan RB General dan RB Tematik BPOM yang efektif						
1	Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2	2	2	2	2
RO 1: Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi		2	2	2	2	2
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum						
1	Indeks Reformasi Hukum	92,25	95,5	95,75	96	96,1
2	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
RO 1: Peraturan Menteri/Pimpinan lembaga		142	207	211	216	221
Meningkatnya efektifitas bantuan hukum						
1	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
RO 1: Layanan Bantuan Hukum		200	362	336	341	346
Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal						
1	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen terintegrasi	100	100	100	100	100
2	Jumlah Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	4	2	2	2	2
3	Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	94,13	94,22	94,31	94,4	94,49
4	Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100	100	100	100	100

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organsiasi	100	100	100	100	100
6	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,2	3,4	3,7	4	4,2
RO 1: Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal		11	11	11	11	11
Layanan Publik BPOM yang prima						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92,75	93	93,25	93,5	93,75
2	Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,15	94,2	94,25	94,5	94,55
RO 1: Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik		5	5	5	5	5
Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM						
Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global						
1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,5	91	91,5	92	92,5
2	Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,5	91	91,5	92	92,5
RO 1: Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan		70	77	85	95	105
Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional						
1	<i>Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti</i>	20	40	60	70	90
RO 1: Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST)		1	2	2	2	2

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
1	Indeks Opini Publik	85,15	85,2	85,25	85,3	85,35
2	Indeks Kepuasan Media	77,5	78	78,5	79	79,5
RO 1: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		16	17	18	19	20
Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat						
1	Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	86,41	86,50	86,59	86,68	86,77
2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100	100	100	100	100
3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100	100	100	100	100
4	Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	3,2	3,4	3,7	4	4,2
RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1
Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan						
Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	89,1	89,4	89,7	90	90,2
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	64	65	65,7	66,5	67
3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90	91	92	93	94
RO 1: Layanan Perencanaan dan Penganggaran		15	15	15	15	15
RO 2: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		13	19	20	21	22
Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan						

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah						
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100	100	100	100	100
RO 1: Layanan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah		4	4	4	4	4
Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)						
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4	4	4	4	4
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	97,00	97,20	97,50	97,80	98
RO 1: Layanan Manajemen Keuangan		11	11	11	11	11
Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan						
1	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	91,99	92,08	92,17	92,26	92,35
2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100
3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100	100	100
4	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,7	4	4,2	4,3	4,4
RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1
Pengelolaan Sumber Daya Manusia						
Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku						
1	Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	79	81	83	85	87

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
2	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,15	3,17	3,19	3,21	3,23
3	Indeks NSPK Manajemen ASN	91,65	91,75	91,85	91,90	92,00
RO 1: Layanan Manajemen SDM		4116	4527	4979	5476	6023
Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan						
1	Indeks Sistem Merit	0,97	0,98	0,98	1,00	1,00
2	Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui <i>Talent Mobility</i> Internal dan Eksternal	20	22	25	27	30
3	Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100	100	100	100	100
RO 1: Kebijakan Transformasi Manajemen ASN		4	4	4	4	4
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Biro SDM						
1	Nilai Pembangunan ZI Biro SDM	92,37	92,46	92,55	92,64	92,73
2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro SDM sesuai standar	100	100	100	100	100
3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	100	100	100	100
4	Indeks Manajemen Risiko Biro SDM	3,4	3,7	4	4,2	4,3
RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum						
1	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,58	98,68	98,78	98,88	98,98
2	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	64	65	66	67	68
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	85	85,5	86	86,5	87
4	Indeks Pengelolaan Aset	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63
RO 1: Layanan BMN		76	76	76	76	76
RO 2: Layanan Umum		1	1	1	1	1
Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan						

Program/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	90,2	90,4	90,6	90,8	91
RO 1: Layanan Protokoler		1	1	1	1	1
Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal						
1	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan	100	100	100	100	100
RO 1: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		63	90	90	90	90
RO 2: Layanan Perkantoran		76	76	76	76	76
RO 3: Layanan Sarana Internal		66	77	77	77	77
RO 4: Layanan Prasarana Internal		8	21	21	21	21
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal						
1	Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	90,57	90,66	90,75	90,84	90,93
2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100	100	100	100	100
3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	100	100	100	100
4	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	3,7	4	4,2	4,3	4,4
RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1

Lampiran 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Pernetan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.09.24.185 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Sekretariat Utama Pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

- 2 -

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

RITA MAHYONA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.09.24.185 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas kerja sama BPOM	Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,5
2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61
3	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	31,69
		Indeks Opini Publik	85,15
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	91,09
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	81,77
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,58
		Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	3,4

SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

RITA MAHYONA

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama 2025 dapat diunduh melalui:
<https://www.pom.go.id/kinerja/rencana-kinerja-tahunan>

Lampiran 3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAYADI

Jabatan : Sekretaris Utama BPOM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Agustus 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Utama BPOM

JAYADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas kerjasama BPOM	01 - Persentase Kerja Sama yang Efektif	90.5 Persen
2.	02 - Meningkatkan efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86 Persen
3.	03 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	01 - Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33.8 Indeks
		02 - Indeks Opini Publik	78.25 Indeks
		03 - Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4.7 Indeks
		04 - Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86.62 Nilai
		05 - Nilai AKIP Sekretariat Utama	83.81 Nilai
		06 - Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5 Predikat
		07 - Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2.91 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 779,376,940,000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.3158 - Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	12,828,245,000
2.	WA.3159 - Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	14,933,790,000
3.	WA.4110 - Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	10,740,240,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
4.	WA.4112 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia	9,571,070,000
5.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	731,303,595,000

Jakarta, 28 Agustus 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Utama BPOM
JAYADIPihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
TARUNA IKRAR

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama 2025 dapat diunduh melalui:
<https://www.pom.go.id/kinerja/pk>

RAPK Sekretariat Utama Tahun 2025 dapat diunduh melalui:
<https://www.pom.go.id/kinerja/rapk>

Lampiran 4 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025 PER BULAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	PIC		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	Persentase Kerja Sama yang Efektif	Biro KSH	Target	-	-	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	70,00	70,00	70,00	90,50
				% KS yang diTL	-	-	20,62	20,62	20,62	41,69	41,69	41,69	74,86	74,86	74,86	90,77
				% Peran aktif BPOM	-	-	21,23	21,23	21,23	43,15	43,15	43,15	72,60	72,60	72,60	90,54
				Realisasi	-	-	20,93	20,93	20,93	42,42	42,42	42,42	73,73	73,73	73,73	90,66
				Capaian	-	-	104,65	104,65	104,65	106,05	106,05	106,05	105,33	106,05	106,05	100,18
2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	Biro Hukor	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,00
				Pembilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyebut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,90
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,51
3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	Biro Hukor	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,53
4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Semua Biro	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,80
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks Opini Publik	Biro KSH	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,25
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,20
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,21
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	Semua Biro	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,62
				Biro Hukor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,90
				Biro KSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,55
				Biro Renkeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,50
				Biro SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,32
				Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,55
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,56
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Nilai AKIP Sekretariat Utama	Semua Biro	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,81
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,88
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,70
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	Biro Renkeu	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
				Nilai EKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Nilai IKPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	Biro Renkeu dan Hukor	Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
				Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
				Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,03

Dapat diunduh melalui:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QLFXfx0yfrLwS_P0uMQVvUzMLNxAS5FMhBO3U_rHBK8o/edit?gid=0#gid=0

Lampiran 5 CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
1	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Indeks Perencanaan Pembangunan	5	5	100
2	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	61,70	61,60	99,84
3	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90	89,96	Exclude
4	Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100	100	100
5	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4	4	100
6	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96,40	98,75	102,44
7	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,32	88,50	100,20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
8	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100	100	100
9	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	100	100
10	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,60	3,56	98,89
11	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100	100	100
12	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,70	99,77	100,07
13	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,70	4,96	105,53
14	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5	5	100
15	Meningkatnya Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	87,00	93,42	107,38
16	Tersedianya Kebijakan RB General dan RB Tematik BPOM yang efektif	Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2	2	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
17	Tersedianya Kebijakan RB General dan RB Tematik BPOM yang efektif	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,22	4,36	103,32
18	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	100	100	100
19	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100	100	100
20	Meningkatnya efektifitas bantuan hukum	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100
21	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100	100	100
22	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Jumlah Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	100	100	100
23	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	92,50	92,90	100,43

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
24	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100	100	100
25	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100	100	100
26	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,20	3,44	107,50
27	Layanan Publik BPOM yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92,75	93,97	101,32
28	Layanan Publik BPOM yang prima	Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,15	94,94	106,21
29	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	90,77	100,30
30	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,50	90,54	100,04

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
	Olahan di tingkat nasional dan global				
31	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	20	21,05	105,25
32	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Opini Publik (Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media)	97,25	99,87	102,69
33	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Media	78,40	81,41	103,84
34	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	81,00	84,55	104,38
35	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100	100	100
36	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
37	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2,92	2,93	100,34
38	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	90,00	92,01	102,23
39	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,33	0	0 (Blokir)
40	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks NSPK Manajemen ASN	93,50	93,47	99,97
41	Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Indeks Sistem Merit	0,97	0,97	100
42	Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	20,00	0	0 (Blokir)
43	Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100	100	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persentase Capaian
44	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Biro SDM	Nilai Pembangunan ZI Biro SDM	87,76	88,32	100,64
45	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Biro SDM	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro SDM sesuai standar	100	100	100
46	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Biro SDM	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	100	100
47	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Biro SDM	Indeks Manajemen Risiko Biro SDM	3,70	3,71	100,27
48	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,28	96,82	98,51
49	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	62	61,99	Tidak ada penilaian di tahun 2025 (Exclude)
50	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	88,30	88,25	99,94
51	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Indeks Pengelolaan Aset	3,31	3,30	99,70

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW IV	Realisasi TW IV	Persen Capaian
52	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan	100	100	100
53	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	94,1	97,93	104,07
54	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	83,50	83,35	99,82
55	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100	100	100
56	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	100	100
57	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	2,65	2,59	97,74

Lampiran 6 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA PER IKSP S.D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		PER IKSP			
				Pagu Dikurangi Blokir	Realisasi	%	
						RPD	Pagu
1	Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	1	Persentase Kerja Sama yang Efektif	2.284.947.000	2.281.494.697	99,85	99,85
2	Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	135.371.000	135.368.716	100,00	100,00
3	Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	423.534.000	423.528.256	129,97	92,29
4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Sekretariat Utama	1	Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	681.625.643.000	675.833.389.564	99,15	99,15
		2	Indeks Opini Publik	1.255.554.000	1.255.530.290	100,00	100,00
		3	Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	284.401.160	282.497.498	99,33	99,33
		4	Nlai AKIP Sekretariat Utama	147.911.420	147.720.188	99,87	99,87
		5	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	885.171.300	884.764.616	99,95	99,95
		6	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	144.464.120	143.947.505	99,64	99,64
TOTAL				687.186.977.000	681.388.241.329	99,16	99,16

Lampiran 7 MATRIKS EVALUASI KINERJA BIRO DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	a	2	3	b	4	5	6=(5/4)x100	7=(5/b)x100	8	9
1	Biro Hukum Dan Organisasi	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,74	99,70	99,77	100,07	100,03	Tidak terpenuhinya kualitas dan ketepatan waktu layanan informasi publik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat	Peningkatan koordinasi dan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi dalam mengimplementasikan Standar Layanan Permintaan Informasi Publik dan SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam bentuk: 1. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID di lingkungan BPOM 2. Forum edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik 3. Melakukan monitoring dan program pendampingan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM 4. Pemantauan data layanan (termasuk pemenuhan jangka waktu pelayanan) permintaan informasi publik melalui aplikasi subsite PPID BPOM dan Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL)
2	Biro Hukum Dan Organisasi	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,70	4,96	105,53	101,22		
3	Biro Hukum Dan Organisasi	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang Prima	Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00		
4	Biro Hukum Dan Organisasi	Tersedianya Kebijakan RB General dan RB Tematik BPOM yang efektif	Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2	2	2	100,00	100,00	Adanya ketidakpastian kebijakan pelaksanaan RB BPOM	1. Koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait perkembangan kebijakan RB Nasional 2. Mengikuti perkembangan kebijakan RB Nasional melalui media sosialisasi Kementerian PANRB 3. Penyusunan dan Penyampaian Indikasi Rencana Aksi RB General dan Tematik BPOM Tahun 2026
5	Biro Hukum Dan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
6	Biro Hukum Dan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keterlambatan penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan oleh unit pemrakarsa yang tidak mempertimbangkan waktu antrian pelaksanaan harmonisasi	1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan prosedur POM-01.02/CFM.01/SOP.01 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 2. Mensosialisasikan prosedur yang menekankan kebutuhan waktu pelaksanaan harmon yang menyesuaikan layanan Kementerian Hukum 3. Memonitoring progress pelaksanaan penetapan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi yang intensif pasca pengajuan harmonisasi 4. Monitoring dan Evaluasi Program Penyusunan Peraturan BPOM
7	Biro Hukum Dan Organisasi	Meningkatnya efektifitas bantuan hukum	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
8	Biro Hukum Dan Organisasi	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
9	Biro Hukum Dan Organisasi	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
10	Biro Hukum Dan Organisasi	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	93,50	92,50	92,90	100,43	99,36		
11	Biro Hukum Dan Organisasi	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Laporan Kinerja dan Informasi Kerangka Acuan Pelaksanaan belum memuat rekomendasi perbaikan berkelanjutan	1. Pemberian bimbingan dan pengenalan bisnis proses Biro Hukum dan Organisasi 2. Penugasan keikutsertaan pada pelatihan/bimtek SAKIP 3. Reviu berjenjang pada penyusunan dokumen SAKIP

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
12	Biro Hukum Dan Organisasi	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
13	Biro Hukum Dan Organisasi	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	4,20	3,20	3,44	107,50	81,90	Rendahnya pemahaman SDM terkait Manajemen Risiko	1. Pelatihan Manajemen Risiko secara terjadwal 2. Pelatihan tersertifikasi Manajemen Risiko dari eksternal 3. Pelaksanaan QSQL Manajemen Risiko
14	Biro Hukum Dan Organisasi	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif	Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2	2	2	100,00	100,00	Adanya ketidakpastian kebijakan pelaksanaan RB BPOM	1. Koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait perkembangan kebijakan RB Nasional 2. Mengikuti perkembangan kebijakan RB nasional melalui media sosialisasi Kementerian PANRB 3. Penyusunan dan Penyampaian Indikasi Rencana Aksi RB General dan Tematik BPOM Tahun 2026
15	Biro Hukum Dan Organisasi	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif	Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,50	4,22	4,36	103,32	96,89	Tindakan perbaikan (CAPA) belum dilaksanakan secara optimal untuk menjawab rekomendasi temuan audit dan tinjauan manajemen pada MP yang disebabkan oleh kebijakan prosedur atau sistem pemantauan efektivitas pelaksanaan CAPA belum memadai	1. Menyusun/mereviu Kebijakan perkuatan peran Auditor Internal dalam memonitoring pelaksanaan CAPA Unit Kerja. 2. Penyampaian hasil audit internal dan tinjauan manajemen manajemen puncak. 3. Permintaan penyusunan rencana aksi tindak lanjut 4. Desk rencana aksi tindak lanjut 5. Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi tindak lanjut per TW 6. Evaluasi Kebijakan Audit Internal
16	Biro Hukum Dan Organisasi	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	93,75	92,75	93,97	101,32	100,23	Pemanfaatan SKM Online (skm.go.id) secara menyeluruh untuk pelaksanaan SKM oleh seluruh UPP di Indonesia, menyebabkan adanya perbedaan hasil antara SAPA APIP dan SKM Online	1. Koordinasi lanjutan Terkait Pelaksanaan SKM online 2. Penyampaian surat Sekretaris Utama tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2026 3. Koordinasi terkait penggunaan kedua aplikasi (SAPA APIP dan SKM online) untuk menilai Indeks Kepuasan Masyarakat
17	Biro Hukum Dan Organisasi	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,55	94,15	0,00	0,00	0,00	Proses penyampaian lokus penilaian dan hasil evaluasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman) kepada UPP tidak terjadwal secara tetap. Realisasi belum tercapai dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Ombudsman	

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
18	Biro Hukum Dan Organisasi	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,60	4,35	4,75	109,20	103,26		
19	Biro Hukum Dan Organisasi	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	91,00	87,00	93,42	107,38	102,66	Pemahaman petugas terhadap pedoman KIE belum merata serta kepatuhan petugas dalam pelaporan KIE secara tepat waktu masih belum optimal	1. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola KIE di unit teknis pusat dalam penyediaan bahan materi KIE 2. Berkoordinasi dengan Pusdatin dalam rangka integrasi data pengawasan, data kerawanan kejahatan, data pengaduan, dengan data KIE 3. Melakukan koordinasi dan monev secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis agar mengimplementasikan pedoman KIE
20	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	81,88	81,00	84,55	104,38	103,26	Terdapat beberapa saran perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan ZI di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.	Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat, seperti: 1. Menyempurnakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI. 2. Melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta menyusun strategi untuk meningkatkan Indeks BerAKHLAK unit kerja.
21	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
22	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
23	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang optimal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	3,12	2,92	2,93	100,34	93,91	Masih rendahnya pemahaman SDM terkait Manajemen Risiko	Pengembangan kompetensi SDM terkait manajemen risiko secara berkala dan berkesinambungan.
24	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media	98,25	97,25	99,87	102,69	101,65	Tingginya volume dan kecepatan arus informasi yang menuntut pengelolaan isu secara cepat dan konsisten. Fluktuasi isu obat dan makanan, terutama di media sosial, yang berpotensi memengaruhi pemberitaan media arus utama.	1. Melakukan klasifikasi dan filter pemberitaan yang berkaitan dengan BPOM sesuai dengan tonasi pemberitaan. 2. Melakukan klasifikasi media berdasarkan tier yang dinilai berdasarkan kredibilitas, cakupan, segmentasi pembaca, hingga tingkat pengaruhnya.

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
25	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Media	78,90	78,40	81,41	103,84	103,18	Tingginya arus informasi dan isu seputar keamanan obat dan makanan yang menyebabkan kebutuhan media semakin tinggi untuk melakukan konfirmasi kepada BPOM. Beberapa permohonan informasi yang perlu diklarifikasi dengan tindak lanjut lapangan/pengujian berpotensi permohonan informasi tidak dapat terpenuhi atau tidak sesuai tenggat waktu media.	1. Melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait tindak lanjut yang dapat dibagikan kepada media. 2. Melakukan klasifikasi tindak lanjut berdasarkan urgensi dan risiko informasi yang sedang dibahas di kalangan media.
26	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	90,00	20,00	21,05	105,25	23,39	1. Karena adanya pemotongan anggaran, kegiatan KSS tidak bisa lagi dilaksanakan untuk satu negara tertentu 2. Pelaksanaan KSS juga bersifat sangat teknis karena membahas isu Registrasi, Pengawasan serta Laboratorium, sehingga kegiatan seharusnya dilaksanakan secara luring agar manfaat optimal. 3. Beberapa negara mengajukan permintaan capacity building tapi tidak dapat dilakukan scope mission untuk menilai kebutuhan bantuan teknis karena anggarannya tidak cukup.	1. Melakukan penyusunan prioritas kegiatan dan penggabungan negara penerima KSS BPOM dalam 1 (satu) kegiatan dengan tidak melihat secara spesifik dari masing-masing negara dengan ketersediaan anggaran yang ada; 2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan akan berkoordinasi dengan pihak LDKPI
27	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,50	90,50	90,77	100,30	98,13	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan karena adanya efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid (luring dan daring) serta memanfaatkan kerja sama/bantuan dari pihak luar
28	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global	Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	92,50	90,50	90,54	100,04	97,88	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan karena adanya efisiensi anggaran	Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid (luring dan daring)

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
29	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	97,75	5,00	5,00	100,00	100,00	Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.07.21.10.25.399 tanggal 30 Oktober 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur dan target sebagai berikut: 1. Terdapat perubahan tools pengukuran di tiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Bappenas. 2. Penyesuaian nomenklatur semula Indeks Perencanaan Pembangunan (pada Renstra Setlata 2025-2029) menjadi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Penyesuaian target indikator semula 97,55 (PK 2025), 97,75 (Renstra Setlata tahun 2029) menjadi 5 (sangat baik).	Penyesuaian dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja Biro Renkeu tahun 2025.

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
30	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	63,10	61,70	61,60	99,84	97,62	Nilai Hasil Evaluasi AKIP BPOM tahun 2025 dari KemenPANRB sebesar 82,34 (predikat A), dimana senilai 61,60 merupakan nilai atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Terdapat beberapa catatan yang memerlukan perbaikan terhadap implementasi SAKIP di lingkungan BPOM.	Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP dari KemenPANRB terhadap komponen: 1. Perencanaan Kinerja. a. Penajaman target perlu dilakukn agar arah peningkatan kinerja lebih terukur dan bermakna. b. Unit kerja perlu memastikan alur pencaian kinerja berjalan logis dan terukur. c. Unit kerja perlu memetakan ulang keterkaitan antara problem, aksi dan outcome, kemudian menyesuaikan rencana aksi agar alur logisnya lebih runut. Setiap langkah aksi perlu menjawab masalah yang telah diidentifikasi dan menunjukkan kontribusi yang telah terhadap pencapaian hasil. 2. Pengukuran Kinerja. a. Instansi dan unit kerja disarankan melakukan penataan kembali indikator dengan memetakan peran masing-masing bidang, kemudian menyesuaikan indikator agar tidak terjadi tumpang tindih. b. Instansi disarankan meninjau ulang indikator yang masih ambigu dan menyempurnakan definisi operasional, formulasi serta satuannya agar mudah dipahami dan selaras dengan tujuan pengukuran. c. Instansi perlu mewajibkan identifikasi faktor pendukung dan penghambat sebagai bagian dari setiap siklus pengukuran kinerja. 3. Pelaporan Kinerja. a. Instansi perlu memastikan bahwa seluruh indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan wajib dilaporkan secara lengkap. Indikator yang tidak dapat diukur harus disertai alasan resmi, bukti pendukung serta tindakan korektif. b. Instansi disarankan untuk mewajibkan pencantuman status progres perbaikan dalam setiap laporan kinerja berkala, termasuk langkah yang telah dilaksanakan, kendala yang masih dihadapi, dan rencana tindak lanjut berikutnya pada seluruh unit kerja.
31	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	92,00	90,00	83,86	93,18	91,15	Realisasi belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari Kemenkeu, dan diperkirakan di Maret 2026.	-

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
32	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
33	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4	4	4	100,00	100,00	-	-
34	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	97,00	96,40	99,36	103,07	102,43	Realisasi kinerja tercatat sebesar 99,36 per Januari 2026, namun dengan catatan bahwa indikator penilaian dapat mengalami perubahan setiap tahun dan akan dikonfirmasi kembali sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. Indikator IKPA masih mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, perubahan klasifikasi serta penambahan UPT baru yang memerlukan dukungan optimal, serta adanya pergeseran anggaran ke dalam RO khusus yang mensyaratkan persetujuan Kementerian Keuangan sehingga berpotensi memengaruhi proses revisi, pencairan anggaran, dan penerapan RPD sebagai komponen penilaian IKPA.	-

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
35	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,68	88,32	88,50	100,20	99,80	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM Tahun 2025 pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 88,50 (tercapai; target 88,32) sebagaimana disampaikan dalam nota dinas Inspektur Utama No.B-PI.06.06.7.08.25.239 tanggal 14 Agustus 2025. Terdapat beberapa saran perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan ZI di Biro Perencanaan dan Keuangan.	Saran perbaikan sesuai hasil evaluasi dimaksud: 1. Menyempurnakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI. 2. Melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta menyusun strategi untuk meningkatkan Indeks BerAKHLAK unit kerja. 3. Menyempurnakan Standar Pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mempertimbangkan komponen standar pelayanan publik yang berlaku.
36	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
37	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
38	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	4,00	3,60	3,56	98,89	89,00	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 pada Biro Renkeu sebesar 3,563 (tidak tercapai) sesuai nota dinas Irtama No.PI.06.07.71.7.01.26.02 tanggal 2 Januari 2026 dan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko.	Rencana aksi : menindaklanjuti rekomendasi Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Biro Renkeu sbb: 1. Pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko secara berkala dan berkesinambungan. 2. Melaksanakan tinjauan kembali terhadap hasil identifikasi dan analisa risiko, beserta kertas kerja reviu risiko. 3. Reviu manajemen risiko secara berkala melibatkan seluruh pegawai dan pejabat struktural.
39	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal	Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
40	Biro Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	94,00	90,00	92,01	102,23	97,88	-	-
41	Biro Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,37	3,33	0,00	0,00	0,00	Pemblokiran anggaran pelaksanaan survey Indeks Kesejahteraan Pegawai	Kegiatan survey Indeks Kesejahteraan Pegawai dan Survey Opini akan dilaksanakan secara bersama pada Tahun 2026

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
42	Biro Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Indeks NSPK Manajemen ASN	0,00	93,50	93,47	99,97	#DIV/0!	Masih memakai Nilai Tahun 2024 dikarenakan surat hasil dari BKN belum terbit. Indikator ini diusulkan untuk dihapus pada Tahun berikutnya sesuai kebijakan baru BKN.	Akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan indikator kinerja sesuai dengan kebijakan dari BKN
43	Biro Sumber Daya Manusia	Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Pemblokiran anggaran pengembangan aplikasi talent mobility	Pelaksanaan akan dibagi menjadi beberapa tahapan dalam pelaksanaannya dengan adanya penyesuaian definisi operasional dan cara perhitungan
44	Biro Sumber Daya Manusia	Menguatnya SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Indeks Sistem Merit	1,00	0,97	0,97	100,00	97,00	-	
45	Biro Sumber Daya Manusia	Menguatnya SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
46	Biro Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia	88,12	87,76	88,32	100,64	100,23	-	
47	Biro Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
48	Biro Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
49	Biro Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Sumber Daya Manusia yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia	4,00	3,70	3,719	100,51	92,98	-	
50	Biro Sumber Daya Manusia	Menguatnya SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai Ketentuan	Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal		20,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Double	

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
51	Biro Umum	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Tingkat Digitalisasi Arsip	98,68	98,28	96,82	98,51	98,12	Tahun 2025 adalah kali pertama dilakukan Audit TDA secara terpisah dengan memotret penggunaan secara aktif Aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pengguna yang memiliki akun, sehingga Biro Umum sedikit kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan aktif tersebut (penggunaan seluruh fitur yang ada di SRIKANDI secara aktif)	Biro Umum akan melakukan desk penggunaan TDA dalam kurun waktu tertentu terhadap seluruh Unit Kerja untuk mendorong melakukan secara aktif penggunaan seluruh fitur di SRIKANDI
52	Biro Umum	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	66,00	62,00	62,56	100,90	94,79		
53	Biro Umum	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	89,10	88,30	88,26	99,95	99,06	Kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran berupa Automatic Adjustment (AA) sangat berdampak pada pengadaan barang/jasa, sehingga proses pengadaan tidak bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan. Hal ini mengakibatkan total anggaran pengadaan barang/jasa terdampak AA tidak terdeteksi oleh sistem (SPSE). Selain itu, pada akhir Desember 2025 terjadi migrasi Sistem Pengadaan Nasional ke server Inaproc. Dengan kondisi tersebut di atas, maka LKPP melalui Surat Edaran Sekretaris LKPP Nomor 28006/SES/12/2025 perihal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode tanggal 3 Desember 2025, menyampaikan bahwa Nilai ITKP tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu nilai ITKP Tahun 2024 dengan nilai 88,26 predikat "Baik"	UKPBJ tetap melaksanakan perhitungan nilai nilai IPS sesuai dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa TA. 2025, sebagai upaya UKPBJ untuk menggambarkan kinerja pengadaan barang/jasa TA.2025
54	Biro Umum	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Indeks Pengelolaan Aset	3,35	3,31	3,79	114,50	113,13	Adanya penambahan UPT yang akan mengakibatkan penambahan bidang tanah	Akan dilakukan pengelolaan BMN
55	Biro Umum	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	85,50	83,50	83,55	100,06	97,72		
56	Biro Umum	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2029	Target 2025	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
57	Biro Umum	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
58	Biro Umum	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	3,25	2,65	2,59	97,74	79,69	Masih terdapat beberapa kendala pelaksanaan manajemen risiko di Biro Umum salah satunya kurangnya sosialisasi kepada seluruh pegawai sehingga pemahaman akan pengelolaan risiko yang ada di unit kerja menjadi terbatas, serta belum terdokumentasikannya kegiatan manajemen risiko dimulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi secara sistematis	Biro Umum akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh tim penilai dari Inspektorat untuk bahan perbaikan
59	Biro Umum	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
60	Biro Umum	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Biro Umum	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokol dan Kesekretariatan Pimpinan	94,50	94,10	97,93	104,07	103,63		

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN I TAHUN 2025

Lampiran 8 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO) SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Rincian Output	Anggaran					Volume			Ket
			Pagu		Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	
			Awal	Efisiensi		Pagu Awal	Pagu Efisiensi				
1	Biro Kerjasama & Hubungan Masyarakat	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	5.315.127.000		2.027.191.855	38,14%		70	70	100,00%	
2		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6.107.784.000		1.256.392.790	20,57%		16	16	100,00%	
3		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	742.714.000		131.912.366	17,76%		1	1	100,00%	
4		Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST)	662.620.000		138.792.767	20,95%		1	1	100,00%	
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.730.866.000	462.927.000	461.182.575	26,64%	99,62%	1	1	100,00%	
6		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.101.717.000	1.503.566.000	1.503.358.655	21,17%	99,99%	15	15	100,00%	
7		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.718.376.000	527.556.000	527.483.127	19,40%	99,99%	13	13	100,00%	
8		Layanan Manajemen Keuangan	3.382.831.000	649.907.000	649.814.443	19,21%	99,99%	9	9	100,00%	
9	Biro Hukum dan Organisasi	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	1.997.206.000	283.887.000	283.885.605	14,21%	100,00%	142	142	100,00%	
10		Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	675.350.000	56.954.000	56.948.733	8,43%	99,99%	2	2	100,00%	
11		Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik	885.490.000	151.960.000	151.958.268	17,16%	100,00%	5	5	100,00%	
12		UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	819.560.000	135.371.000	135.368.716	16,52%	100,00%	3	3	100,00%	
13		Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan	1.524.045.000	423.534.000	423.528.256	27,79%	100,00%	2	2	100,00%	
14		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.358.589.000	797.619.000	795.447.927	23,68%	99,73%	9	9	100,00%	
15		Layanan Bantuan Hukum	1.480.000.000	660.018.000	660.017.193	44,60%	100,00%	207	207	100,00%	
16	Biro SDM	Kebijakan Transformasi Manajemen ASN	2.366.315.000	185.565.000	185.561.159	7,84%	100,00%	4	4	100,00%	
17		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.482.416.000	491.199.000	491.190.570	33,13%	100,00%	1	1	100,00%	
18		Layanan Manajemen SDM	5.772.651.000	1.344.300.000	1.344.286.281	23,29%	100,00%	4.615	4.615	100,00%	
19	Biro Umum	Perangkat pengolah data dan komunikasi	974.260.000	944.000.000	943.950.722	96,89%	99,99%	63	63	100,00%	
20		Layanan BMN	122.381.000	14.381.000	14.379.800	11,75%	99,99%	1	1	100,00%	
21		Layanan Protokol	7.004.487.000	4.318.017.000	4.304.214.104	61,45%	99,68%	1	1	100,00%	
22		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.031.821.000	27.550.000	27.550.000	2,67%	100,00%	1	1	100,00%	
23		Layanan Umum	14.264.012.000	3.575.232.000	3.559.638.417	24,96%	99,56%	1	1	100,00%	
24		Layanan Perkantoran	702.566.641.000	662.608.093.000	656.735.505.085	93,48%	99,11%	1	1	100,00%	
25		Layanan Sarana Internal	1.116.054.000	1.116.054.000	1.116.017.943	100,00%	100,00%	66	66	100,00%	
26		Layanan Prasarana Internal	3.387.237.000	3.353.517.000	3.353.495.350	99,00%	100,00%	8	8	100,00%	